

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Selatan

FEBRUARI 2026



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sumatera Selatan

“ Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”



Publikasi ini dapat diakses secara online pada :

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>

Salinan Publikasi ini dapat diperoleh dengan menghubungi :

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Fungsi Perumusan KEKDA Provinsi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No.510, Palembang

Telp : 0711 - 354188 ext 8246

Faks : 0711 – 312013

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun “Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi Februari 2026” ini tepat pada waktunya. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal Bank Indonesia mengenai perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, keuangan, dan sistem pembayaran di Provinsi Sumatera Selatan.

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,20% (yoy). Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,54% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,39% (yoy). Tetap tumbuhnya ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 disumbang utamanya oleh Konsumsi Rumah Tangga dan LU Petambangan dan Penggalian, namun tertahan oleh kinerja Ekspor yang mengalami perlambatan. Dari sisi inflasi, realisasi inflasi pada triwulan IV 2025 tercatat 2,91% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi didorong oleh tekanan harga emas perhiasan serta berbagai produk hortikultura akibat permintaan masyarakat yang kuat di tengah gangguan cuaca yang mengganggu pasokan di daerah sentra.

Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini melalui kontribusi data dan informasi, baik melalui forum diskusi maupun media lainnya, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pusat Statistik, perbankan, akademisi, asosiasi, serta pemangku kebijakan lainnya. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa mendatang. Kami juga menyadari bahwa Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, sehingga masukan berupa saran, kritik, dan dukungan informasi maupun data dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas laporan ini ke depan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya, serta memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya menyumbangkan pemikiran untuk pengembangan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya. Akhir kata, kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan Edisi November 2025 ini bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

Palembang, Februari 2026
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Bambang Pramono
Direktur



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Visi dan Misi Bank Indonesia	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	x
Daftar Gambar	x
Indikator Utama	xiii
Ringkasan Umum	xv
	xvii
	xx

01 Perkembangan Ekonomi Daerah

1.1. Perkembangan Ekonomi Secara Umum	2
1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran	2
1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah	3
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi	5
1.2.3. Ekspor Luar Negeri	6
1.2.4. Impor Luar Negeri	8
1.3. Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	9
1.3.1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian	11
1.3.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	12
1.3.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13
1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi	14
Boks 1: Menjaga Inflasi, Mempercepat Digitalisasi: Strategi Terintegrasi Berbuah Prestasi	15

02 Perkembangan Keuangan Daerah

2.1. Gambaran Umum	20
2.2. APBD Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	21
2.2.1. Realisasi Pendapatan APBD Sumatera Selatan	21
2.2.2. Realisasi Belanja APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	22
2.3. APBN Provinsi Sumatera Selatan	23

03 Perkembangan Inflasi Daerah

3.1. Inflasi Secara Umum	28
3.2. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran	29
3.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau	29
3.2.2. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	30
3.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	30
3.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	31
3.2.5. Kelompok Kesehatan	31
3.2.6. Kelompok Transportasi	31
3.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	32
3.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	32
3.2.9. Kelompok Pendidikan	32
3.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	33
3.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	33
3.3. Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tracking Inflasi Triwulan I 2026	33
3.4. Analisis Inflasi Spasial	36
3.3.1. Kota Palembang	36
3.3.2. Kota Lubuklinggau	37
3.3.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	38
3.3.4. Kabupaten Muara Enim	39
3.5. Upaya Pengendalian Inflasi	40
Boks 2: HLM TPID & TP2DD se-Sumatera Selatan: Sinergi Pengendalian Inflasi HBKN Idul Fitri 1447 H, Akselerasi ETPD, dan Himbauan THR pakai QRIS	45

04 Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

4.1. Kondisi Umum Sumatera Selatan	48
4.2. Pembiayaan Daerah	49
4.2.1. Perkembangan Pembiayaan Korporasi	49
4.2.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga	51
4.3. Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM	52

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah	58
5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai	58
5.2.1. Transaksi SKNBI dan BI-RTGS	58
5.2.2. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	59
5.3. Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce	61
5.4. Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)	64
Boks 3 : <i>Kick Off</i> Semarak Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) Tahun 2026 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan	66

Lampiran	90
Daftar Istilah	102

06

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

6.1. Kondisi Ketenagakerjaan	70
6.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja	70
6.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70
6.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	70
6.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan	71
6.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan	71
6.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	71
6.1.7. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)	72
6.2. Kondisi Kesejahteraan	72
6.3. Kemiskinan	74
6.3.1. Perubahan Garis Kemiskinan	75
6.3.2. Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	75
6.3.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk	76

07

Prospek Perekonomian Daerah

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026	80
7.2. Prospek Makroekonomi Keseluruhan Tahun 2026	81
7.3. Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026	83
7.4. Rekomendasi	84

Daftar Grafik

01

Perkembangan Ekonomi Daerah

Grafik 1.1.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.2.	PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010	2
Grafik 1.3.	Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)	4
Grafik 1.4.	Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan	4
Grafik 1.5.	Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan	4
Grafik 1.6.	Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan	4
Grafik 1.7.	Volume Penjualan Semen di Sumatera Selatan	6
Grafik 1.8.	Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan	6
Grafik 1.9.	Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan	6
Grafik 1.10.	Nilai Impor Barang Konsumsi Sumatera Selatan	6
Grafik 1.11.	Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan	7
Grafik 1.12.	Perkembangan Harga Komoditas Internasional	7
Grafik 1.13.	Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan	7
Grafik 1.14.	Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan	7
Grafik 1.15.	Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan	7
Grafik 1.16.	Perkembangan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan	7
Grafik 1.17.	Perkembangan Nilai Ekspor Pulp&Paper Sumatera Selatan	8
Grafik 1.18.	Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan	8
Grafik 1.19.	Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor	8
Grafik 1.20.	Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor	8
Grafik 1.21.	Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan	9
Grafik 1.22.	Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan	9
Grafik 1.23.	Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	9

Grafik 1.24.	Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal	9
Grafik 1.25.	Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalian Sumatera Selatan	11
Grafik 1.26.	Kegiatan Usaha Pertambangan di Sumatera Selatan	11
Grafik 1.27.	Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13
Grafik 1.28.	Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan	13
Grafik 1.29.	Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan	14
Grafik 1.30.	Penyaluran Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14
Grafik 1.31.	Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan	14
Grafik 1.32.	Realisasi Penjualan Semen di Sumatera Selatan	14

02

Perkembangan Keuangan Daerah

Grafik 2.1.	Struktur Anggaran Pendapatan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 (Rp Miliar)	20
Grafik 2.2.	Struktur Anggaran Pendapatan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)	20
Grafik 2.3.	Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 (Rp Miliar)	20
Grafik 2.4.	Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)	20
Grafik 2.5.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025	21
Grafik 2.6.	Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025	22

Grafik 2.7.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025	22
Grafik 2.8.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025	22
Grafik 2.9.	Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 berdasarkan Wilayah	25
Grafik 2.10.	Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 berdasarkan Jenis	25

03

Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 3.1.	Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional	29
Grafik 3.2.	Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan IV 2025	29
Grafik 3.3.	Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi	36

04

Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Grafik 4.1.	Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan	48
Grafik 4.2.	Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan	48
Grafik 4.3.	Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank	48
Grafik 4.4.	Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	50
Grafik 4.5.	Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan	50
Grafik 4.6.	<i>Likert Scale</i> Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan	50
Grafik 4.7.	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi	50
Grafik 4.8.	NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan	51
Grafik 4.9.	Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan	51
Grafik 4.10.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	51

Grafik 4.11.	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan	52
Grafik 4.12.	Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan	52
Grafik 4.13.	NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan	52
Grafik 4.14.	Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (RP TRILIUN)	52
Grafik 4.15.	Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)	53
Grafik 4.16.	Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM	53
Grafik 4.17.	Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	53
Grafik 4.18.	Pertumbuhan Sektoral Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan IV 2025	54
Grafik 4.19.	Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan	54
Grafik 4.20.	Perkembangan NPL Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan	54

05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Grafik 5.1.	Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan	58
Grafik 5.2.	Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan	59
Grafik 5.3.	Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan	59
Grafik 5.4.	Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan	59
Grafik 5.5.	Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan	59
Grafik 5.6.	Jumlah Nominal Kartu ATM/D	60
Grafik 5.7.	Volume Transaksi Kartu ATM/D	60
Grafik 5.8.	Pangsa Transaksi ATM/D	60
Grafik 5.9.	Jumlah Kartu ATM/D	60
Grafik 5.10.	Nominal Transaksi Kartu Kredit	61
Grafik 5.11.	Volume Transaksi Kartu Kredit	61
Grafik 5.12.	Pangsa Transaksi Kartu Kredit	61
Grafik 5.13.	Jumlah Kartu Kredit	61
Grafik 5.14.	Jumlah UE	62
Grafik 5.15.	Jumlah UE reader	62

Grafik 5.16. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal	62	Grafik 6.13. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional	76
Grafik 5.17. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume	62	Grafik 6.14. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk	76
Grafik 5.18. Jumlah <i>Merchant</i> QRIS	63	Grafik 6.15. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan	76
Grafik 5.19. Persebaran <i>Merchant</i> QRIS	63	Grafik 6.16. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan	76
Grafik 5.20. Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	63		
Grafik 5.21. Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako	64		
Grafik 5.22. Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako	64		
Grafik 5.23. Nominal transaksi <i>E-commerce</i>	64		
Grafik 5.24. Frekuensi transaksi <i>E-commerce</i>	64		
Grafik 5.25. Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan	64		
Grafik 5.26. Transfer Dana Domestik- <i>Incoming</i>	65		
Grafik 5.27. Transfer Dana Luar Negeri- <i>Incoming</i>	65		
Grafik 5.28. Transfer Dana Domestik- <i>Outgoing</i>	65		
Grafik 5.29. Transfer Dana Luar Negeri- <i>Outgoing</i>	65		

06

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

Grafik 6.1. Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2021-2025	70
Grafik 6.2. Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2023-2025 (dalam %), 2023-2025	70
Grafik 6.3. Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)	70
Grafik 6.4. Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	71
Grafik 6.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerja Utama	71
Grafik 6.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2023-2025 (dalam %)	72
Grafik 6.7. Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)	72
Grafik 6.8. Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu	72
Grafik 6.9. Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang dibayar dan Nilai Tukar Petani	73
Grafik 6.10. Nilai Tukar Petani Per Subsektor	73
Grafik 6.11. Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan	73
Grafik 6.12. Perkembangan Penduduk Miskin	74

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2022-2025 (%yoy)	3
Tabel 1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)	3
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtq)	3
Tabel 1.4.	Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)	9
Tabel 1.5.	Laju Pertumbuhan Tahunan Sektor PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)	10
Tabel 1.6.	Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektor PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)	10
Tabel 2.1.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp miliar)	21
Tabel 2.2.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp Miliar)	23
Tabel 2.3.	Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Sumatera Selatan 2024-2025	24
Tabel 2.4.	Uraian Belanja Modal K/L Sumatera Selatan	24
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025	24
Tabel 3.1.	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan	28
Tabel 3.2.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025	28
Tabel 3.3.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	29
Tabel 3.4.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki	30
Tabel 3.5.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	31
Tabel 3.6.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga	31
Tabel 3.7.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan	31
Tabel 3.8.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi	32
Tabel 3.9.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	32
Tabel 3.10.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya	32
Tabel 3.11.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan	32
Tabel 3.12.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	33
Tabel 3.13.	Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	33
Tabel 3.14.	Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	37
Tabel 3.15.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kota Palembang	37
Tabel 3.16.	Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	38
Tabel 3.17.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kota Lubuklinggau	38
Tabel 3.18.	Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	39
Tabel 3.19.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kab. OKI	39
Tabel 3.20.	Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	40
Tabel 3.21.	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kab. Muara Enim	40

Tabel 5.1.	Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan	58
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan	61
Tabel 6.1.	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan IV 2025	73
Tabel 6.2.	Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan IV 2025	73
Tabel 6.3.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	74
Tabel 6.4.	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan	75
Tabel 6.5.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan	76
Tabel 7.1.	<i>Global Economic Outlook</i>	80
Tabel 7.2.	Volume Perdagangan Internasional	81

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan	33
Gambar 3.2	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Oktober 2025	34
Gambar 3.3	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada November 2025	34
Gambar 3.4	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Desember 2025	35
Gambar 3.5	Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Januari 2026	35

Indikator Utama

A. PDRB & INFLASI

Indikator	2024					2025				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
MAKRO										
Indeks Harga Konsumen										
Sumatera Selatan	105,93	106,42	105,78	107,01	107,01	107,81	109,02	109,42	110,12	110,12
Palembang	105,71	106,15	105,39	106,33	106,33	107,11	108,42	108,85	109,43	109,43
Lubuk Linggau	104,81	105,23	104,59	105,49	105,49	106,15	107,41	108,00	108,52	108,52
Ogan Komering Ilir	107,00	107,77	106,98	108,80	108,80	110,11	111,14	111,11	111,96	111,96
Muara Enim	106,24	106,77	106,93	109,08	109,08	109,46	110,30	111,00	112,22	112,22
Laju Inflasi Tahunan (yoy)										
Sumatera Selatan	3,24	2,48	1,40	1,20	1,20	1,77	2,44	3,44	2,91	2,91
Palembang	2,90	2,64	1,41	1,24	1,24	1,32	2,14	3,28	2,92	2,92
Lubuk Linggau	2,36	2,16	1,11	1,02	1,02	1,28	2,07	3,26	2,87	2,87
Ogan Komering Ilir	4,56	2,27	1,72	1,48	1,48	2,91	3,13	3,86	2,90	2,90
Muara Enim	3,76	2,17	1,08	0,74	0,74	3,03	3,31	3,81	2,88	2,88

Indikator	2024					2025				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Pertumbuhan Tahunan PDRB Sektoral (yoy)										
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	3,29	2,58	2,39	2,59	5,15	2,17	7,79	7,24	5,60
Pertambangan dan Penggalian	4,19	0,97	3,52	4,71	3,33	3,98	5,93	0,61	3,97	3,47
Industri Pengolahan	4,70	4,89	4,09	3,91	4,39	3,58	5,58	5,13	3,94	4,67
Pengadaan Listrik dan Gas	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,06	5,76	6,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,52	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15
Konstruksi	6,89	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,09	4,96	6,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,72	7,71	7,33	7,88	7,42	8,36	8,78	8,58	8,48	8,47
Transportasi dan Pergudangan	2,77	3,80	3,90	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66
Informasi dan Komunikasi	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,19	8,09	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94	11,19	4,45
Real Estate	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79
Jasa Perusahaan	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02	4,47	3,40
Jasa Pendidikan	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79
Jasa lainnya	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11
Pertumbuhan Tahunan PDRB Penggunaan (yoy)										
Konsumsi Rumah Tangga	4,15	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89	4,90	4,91
Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13	3,79	3,77
Konsumsi Pemerintah	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,90	-3,98	3,65	3,15	1,01
Investasi	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,65	3,05	0,08	2,77
Ekspor Luar Negeri	-18,72	-9,59	16,10	2,54	0,15	25,02	1,25	-2,49	-15,28	-0,56
Impor Luar Negeri	183,00	91,28	42,30	1,42	46,90	-49,97	-2,15	-7,65	-21,25	-5,62

B. Ekspor-Import

Ekspor Impor	2024		2025				
	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Nilai ekspor nonmigas (USD Juta)	1.848,55	6.262,31	1.665,19	1.343,19	1.529,60	1.388,58	2.918,18
Nilai impor nonmigas (USD Juta)	383,60	2.068,72	258,42	253,04	259,82	304,31	564,12
Volume ekspor nonmigas (juta kg)	17022,05	37.837,49	14.646,53	11.362,63	14.356,43	14.646,53	29.002,97
Volume impor nonmigas (juta kg)	510,25	2.004,60	553,14	452,89	448,14	461,37	909,50

C. Perbankan

Indikator	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Perbankan								
Total Aset (Rp Triliun)	139,00	147,13	156,39	156,50	156,50	155,83	157,09	165,26
DPK (Rp Triliun)	102,42	106,55	109,65	108,65	108,65	109,49	110,85	116,50
- Giro	19,4	19,4	21,6	17,3	17,3	19,2	19,3	20,5
- Tabungan	53,2	55,1	56,5	60,3	60,3	58,9	58,9	64,8
- Deposito	29,8	32,1	31,5	31,1	31,1	31,4	32,6	31,2
Jumlah Rekening DPK (Ribu)	12.979	13.256	13.289	13.508	13.508	13.556	13.546	14.319
- Giro	120	121	124	121	121	121	121	126
- Tabungan	12.773	13.049	13.080	13.301	13.301	13.350	13.340	14.113
- Deposito	86	86	86	85	85	85	85	81
Kredit Berdasarkan Penggunaan (Rp Triliun)	163,55	167,37	170,57	174,25	174,25	175,50	177,79	191,36
- Modal Kerja	66,09	67,11	69,05	72,27	68,85	69,84	71,36	69,70
- Investasi	46,99	48,31	47,87	48,70	50,09	50,16	50,42	60,77
- Konsumsi	50,47	51,95	53,65	54,95	55,31	55,49	56,00	60,89
Total Kredit (Rp Triliun)	163,55	167,37	170,57	175,92	174,25	175,50	177,79	191,36
Kredit Lapangan Usaha/Korporasi (RpTriliun)	113,08	115,42	116,93	118,94	118,94	120,01	121,78	130,48
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	28,39	29,22	28,34	28,36	28,36	28,33	28,34	29,51
Pertambangan dan Penggalian	11,09	11,04	13,18	12,76	12,76	12,73	12,93	12,46
Industri Pengolahan	32,68	34,04	34,41	35,78	35,78	36,95	38,44	47,80
Listrik, Gas dan Air Bersih	3,26	33,50	3,03	3,33	3,33	3,34	3,39	3,00
Konstruksi	5,99	58,24	5,57	5,50	5,50	5,39	5,37	5,20
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	22,14	21,98	21,94	21,99	21,99	22,07	21,98	21,32
Transportasi dan Pergudangan dan Komunikasi	2,12	2,21	2,21	2,33	2,33	2,38	2,12	2,93
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	2,09	2,13	2,14	2,14	2,12	2,47	2,14
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	2,85	2,92	2,80	2,98	2,98	2,95	0,56	3,07
Jasa-jasa	2,56	2,74	2,86	2,90	2,90	2,89	3,00	2,63
Kredit Bukan Lapangan Usaha/Kredit Konsumsi (RpTriliun)	50,47	51,95	53,65	55,31	55,31	55,49	56,00	60,89
Rumah Tinggal	14,69	16,06	16,36	16,61	16,61	16,79	16,98	18,51
Flat dan Apartemen	0,11	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14	0,16
Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	1,26	0,46	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,42
Kendaraan Bermotor	3,72	3,81	4,04	4,13	4,13	4,14	4,20	3,96
Multiguna	18,30	18,58	18,94	19,38	19,38	19,35	19,47	20,88
Lainnya	30,68	31,50	13,74	14,61	14,61	14,64	14,77	16,95
LDR	158,4%	157,8%	156,7%	153,5%	158,1%	156,9%	154,2%	151,0%
NPL Gross	2,66%	2,59%	1,86%	1,86%	1,87%	1,89%	1,89%	1,87%

(sumber: Bank Indonesia)

D. Sistem Pembayaran

Keterangan	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Jumlah hari	58	52	65	63	58	60	64	64
1. Perputaran Kliring								
a.Nominal (Rp Miliar)	8.021	7.825	8.442	9.265	6.979	6.890	7.828	8.576
b.Warkat (lembar)	148.544	145.396	162.078	164.598	131.082	126.327	148.910	170.884
2. Rata-rata Harian Kliring								
a.Nominal (Rp Miliar)	138,3	150,5	129,8	147,1	120,3	114,8	122,3	134,0
b.Jumlah Warkat (lembar)	2.561	2.796	2.494	2.613	2.260	2.105	2.327	2.670
3. Rata-rata Harian RTGS								
a.Nominal/Hari (Rp Miliar)	589,7	901,0	759,2	1.019,6	877	780	652	634
b.Jumlah Warkat (lembar)	266	299	264	307	264	13.982	16.726	19.005
4. Penolakan Cek/BG								
a.Nominal (Rp Miliar)	55,2	49,0	50,5	55,1	46,9	51,6	50,6	51,0
b.Warkat (lembar)	997	943	926	876	802	977	908	912
5. Penolakan Cek/BG								
a.Nominal (%)	0,69%	0,63%	0,60%	0,59%	0,67%	0,75%	0,65%	0,59%
b.Warkat (%)	0,67%	0,65%	0,57%	0,53%	0,61%	0,77%	0,61%	0,53%
6. Mutasi kas (Rp Miliar)								
Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB)	975,8	445,2	99,6	57,8	61,8	198,5	1.667,3	570,5
a.Aliran uang masuk/inflow	3.901,4	4.374,2	2.368,1	1.729,2	2.901,3	4.200,8	2.157,8	1.224,5
b.Aliran uang keluar (outflow)	4.996,8	6.189,2	4.284,1	6.398,2	5.756,4	3.057,8	4.843,2	4.582,8
c.Net Inflow (outflow)	(1.095,4)	(1.815,0)	(1.916,0)	(4.669,0)	(2.855,1)	1.143,0	(2.685,4)	(3.358,3)

(sumber: Bank Indonesia)

Ringkasan Eksekutif

Februari 2026



Perkembangan Ekonomi Daerah



Ekonomi Sumatera Selatan tetap tumbuh kuat pada triwulan IV 2025 sebesar 5,54% (yoy) yang didorong oleh percepatan realisasi belanja rumah tangga seiring dengan mobilitas yang tinggi pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru serta terjaganya daya beli masyarakat. Kinerja perekonomian Sumatera Selatan tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,81% (yoy) dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,39% (yoy).

Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan IV 2025 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari konsumsi rumah tangga. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 bersumber dari komponen LU Pertambangan dan Penggalan. Sementara LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU Industri Pengolahan merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Perkembangan Keuangan Daerah



Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan IV 2025 menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang relatif tinggi, meski termoderasi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan transfer ke daerah (TKD). Realisasi pendapatan pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp62,92 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp65,30 triliun. Sejalan dengan penurunan pendapatan, realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp93,16 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp100,33 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan eksekusi belanja belum dapat dilaksanakan dan/atau mengalami penundaan. Namun di lain sisi, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) triwulan IV 2025 sebesar Rp33,76 triliun atau 96,25% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp33,09 triliun atau 98,81% dari pagu. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pagu yang mengakibatkan kenaikan realisasi pada DAU dan DBH.

Perkembangan Inflasi Daerah



Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat meningkat pada triwulan IV 2025 sejalan dengan dorongan konsumsi masyarakat pada momentum HBKN Natal dan tahun baru. Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar 3,44% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan IV 2025 didorong utamanya oleh tekanan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global. Selain itu, tekanan inflasi juga didorong oleh berbagai produk hortikultura (cabai merah dan beras) akibat permintaan masyarakat yang kuat di tengah gangguan cuaca yang mengganggu pasokan di daerah sentra. Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan HBKN Idul Fitri. Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

Pembiayaan Daerah dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian yang mendorong sikap *wait and see* oleh masyarakat dan pelaku usaha. Hal direfleksikan melalui pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan. Di lain sisi, pertumbuhan kinerja intermediasi turut disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga. Kinerja pertumbuhan aset perbankan pada triwulan IV 2025 tumbuh positif sebesar 5,60% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,49% (yoy). Kinerja aset perbankan disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 6,20% (yoy), lebih lambat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 8,83% (yoy). Di lain sisi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 7,22% (yoy) yang positif serta lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2024 yang sebesar 5,15% (yoy). Kinerja DPK tetap tumbuh positif di tengah pembelian aset-aset yang mempunyai imbal hasil, baik aset keuangan maupun riil. Sejalan dengan penyaluran kredit secara umum, kredit UMKM triwulan IV 2025 mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh 2,09% (yoy) yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 15,38% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar berkontraksi sebesar -6,06% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 18,41% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar berkontraksi sebesar -5,93% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

➤ **Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui instrumen tunai maupun nontunai terus memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025.** Sesuai pola historis akhir tahun, transaksi uang kartal tercatat mengalami *net outflow* pada periode laporan.

Dari sisi nontunai, penyelenggaraan transaksi melalui sistem RTGS dan SKNBI masih menunjukkan kontraksi secara tahunan. Nominal transaksi kliring (SKNBI) tercatat sebesar Rp8,56 triliun atau berkontraksi 7,44% (yoy), sedikit lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan. Sementara itu, transaksi melalui BI-RTGS tercatat sebesar Rp63,42 triliun, menurun 1,28% (yoy), dengan volume setelmen sebanyak 19.005 transaksi atau berkontraksi 1,87% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan meningkatnya preferensi penggunaan alternatif pembayaran yang lebih efisien, khususnya BI-FAST.

Di sisi lain, akselerasi digitalisasi pembayaran terus berlanjut. Pertumbuhan positif pada nominal transaksi Uang Elektronik (UE) dan *e-commerce*, mencerminkan tingginya preferensi masyarakat Sumatera Selatan terhadap instrumen pembayaran digital. Perkembangan tersebut turut diperkuat oleh semakin luasnya akseptansi QRIS di berbagai sektor ekonomi.

Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah

➤ **Pada triwulan IV 2025, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik.** Hal ini sejalan dengan peningkatan Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) pada November 2025 tercatat sebesar 6,70 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2025 sebesar 6,67 juta orang. Indikator pengangguran juga membaik, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,59%. Dari sisi tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebelumnya sebesar 127,77 menjadi 130,00. Selanjutnya berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan pendapatan masyarakat saat ini lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu dan tetap optimis akan meningkat ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, pada September 2025, tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan menurun menjadi 8,91%, lebih rendah dibandingkan 10,15% pada Maret 2025.

Prospek Perekonomian Daerah

➤ **Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2025, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.** Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diproyeksikan berada pada kisaran 4,8-5,6% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan. Ke depan, inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ setelah pada tahun sebelumnya berada di bawah rentang target. Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.





01

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah



Ekonomi Sumatera Selatan tumbuh tetap kuat pada triwulan IV 2025 dengan realisasi sebesar 5,54% (yoy), didukung oleh percepatan realisasi belanja rumah tangga seiring dengan mobilitas yang tinggi pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru serta terjaganya daya beli masyarakat.

- Dari sisi pengeluaran, kinerja Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan IV 2025 bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB atau investasi yang memberikan andil tertinggi. Sementara secara pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan berasal dari konsumsi rumah tangga. Kinerja positif tersebut didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun baru, berlanjutnya penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sumatera Selatan; dan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP).
- Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 bersumber dari komponen LU Pertambangan dan Penggalian. Sementara LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta LU Industri Pengolahan merupakan LU dengan andil pertumbuhan tertinggi sehingga menjadi faktor pendorong lebih kuatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya.

1.1. Perkembangan Ekonomi Secara Umum

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 5,54% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,20% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan antar triwulan pada triwulan IV 2025 juga tercatat lebih lambat sebesar 2,25% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,65% (qtq) (Grafik 1-2). Jika dibandingkan dengan regional Sumatera dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan lebih tinggi dibandingkan regional Sumatera yang tercatat sebesar 4,90% (yoy) dan Nasional yang tercatat sebesar 5,04% (yoy). Sementara itu, pangsa ekonomi Sumatera Selatan di ekonomi Sumatera pada triwulan laporan tercatat 13,85%.

Tetap kuatnya kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi rumah tangga. Kinerja konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 4,90% (yoy) pada triwulan IV 2025, atau tumbuh stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 4,89% (yoy). Kinerja konsumsi rumah tangga yang terjaga stabil pada triwulan laporan utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun baru seiring dengan dorongan mobilisasi oleh pemerintah melalui pemberian insentif tarif transportasi. Kemudian, berlanjutnya penguatan konsumsi rumah tangga didorong oleh penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, perbaikan daya beli masyarakat Sumatera Selatan juga didorong oleh faktor perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalan serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kinerja LU tersebut pada triwulan laporan tercatat tumbuh menguat dibandingkan

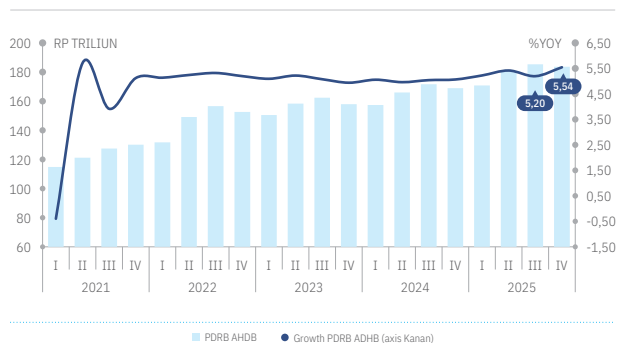
triwulan sebelumnya yang didorong oleh adanya peningkatan kebutuhan batu bara untuk mendukung kinerja industri domestik; peningkatan kebutuhan hasil galian C; dan optimalisasi pencarian sumur minyak baru yang terus berlanjut dan upaya *Development Drilling Program* (DDP) yang terus ditingkatkan.

Selanjutnya, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan laporan tetap kuat didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Capaian kinerja tersebut sejalan dengan semakin insentifnya pelaksanaan berbagai program swasembada pangan dilakukan di Sumatera Selatan, diantaranya OPLA, Cetak Sawah, padi gogo, serta dibarengi dengan dukungan perluasan irigasi. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan juga diikuti dengan perbaikan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

1.2. Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran

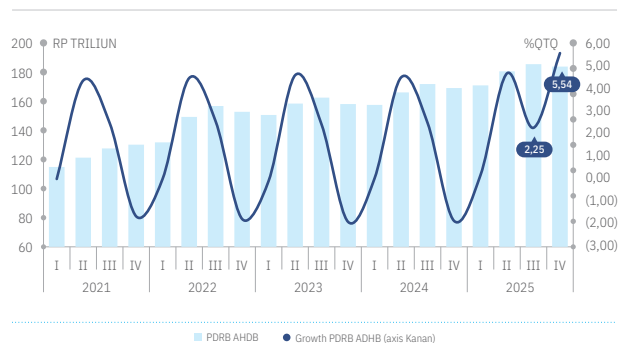
Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, struktur perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pangsa sebesar 61,34% terhadap total PDRB. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan konsumsi rumah tangga memberikan andil sebesar 2,90% (yoy) (Tabel 1-1). Perkembangan ini tercatat meningkat dibandingkan andil pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,79% (yoy). Selanjutnya, PMTB atau investasi pada triwulan IV 2025 memberikan kontribusi terbesar kedua yaitu sebesar 30,02% terhadap PDRB Sumatera Selatan dan memiliki andil pertumbuhan sebesar 0,03% (yoy). Sementara, kinerja ekspor barang dan jasa memberikan kontribusi sebesar 20,41% dan memberikan andil pertumbuhan yang berkontraksi sebesar 6,11% (yoy).

Grafik 1.1. PDRB dan Laju Pertumbuhan Tahunan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 1.2. PDRB dan Laju Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.1. Andil Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 2022-2025 (%yoy)

Komponen Pengeluaran	2024					2025				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,52	2,83	2,73	2,93	2,75	2,92	2,91	2,79	2,90	2,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,50	1,20	1,38	1,34	1,35	0,69	1,69	0,98	0,03	0,85
Ekspor Luar Negeri	(5,48)	(2,75)	4,11	3,92	0,04	5,86	(0,82)	(2,34)	(6,11)	(1,09)
Lainnya	6,52	3,68	(3,18)	(3,12)	0,89	(4,25)	1,68	3,77	8,72	2,71
P D R B	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

1.2.1. Konsumsi Rumah Tangga dan Pemerintah

Pada triwulan IV 2025, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh stabil dengan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan IV 2025 tercatat sebesar 4,90% (yoy), atau tumbuh stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,89% (yoy) (Tabel 1-2). Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga secara triwulanan tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih baik sebesar 1,79% (qtd) pada triwulan laporan. Kondisi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 0,96% (qtd). (Tabel 1-3). Kinerja konsumsi rumah tangga yang terjaga stabil pada triwulan laporan utamanya didorong oleh kuatnya aktivitas konsumsi masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun baru seiring dengan dukungan mobilisasi oleh pemerintah melalui pemberian

insentif tarif transportasi. Kemudian, berlanjutnya penguatan konsumsi rumah tangga didorong oleh penyaluran bantuan sosial di Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Subsidi Upah (BSU) dijadwalkan disalurkan secara bertahap mulai Juli hingga Desember 2025. Penyaluran berbagai subsidi tersebut menjadi *social shock absorbers* yang disalurkan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, perbaikan daya beli masyarakat Sumatera Selatan juga didorong oleh faktor perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang tercatat sebesar 130,48. Kondisi tersebut tercatat tumbuh sebesar 1,78% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 1,84% (yoy).

Tabel 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%yoy)

Komponen Pengeluaran	2024					2025				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,19	4,79	4,77	4,95	4,68	4,91	4,93	4,89	4,90	4,91
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,41	17,99	16,32	7,42	15,53	1,21	4,99	5,13	3,79	3,77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,32	8,29	10,64	3,37	8,38	3,30	(5,91)	3,44	3,15	1,01
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,82	3,97	4,63	4,20	4,41	2,21	5,66	3,29	0,08	2,77
Ekspor Luar Negeri	(18,72)	(9,59)	0,84	14,18	0,15	17,65	1,11	(2,23)	(15,28)	(0,56)
Impor Luar Negeri	183,00	91,28	42,83	(18,54)	46,90	14,15	(2,74)	(7,10)	(21,25)	(5,62)
PDRB	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan Sisi Pengeluaran (%qtd)

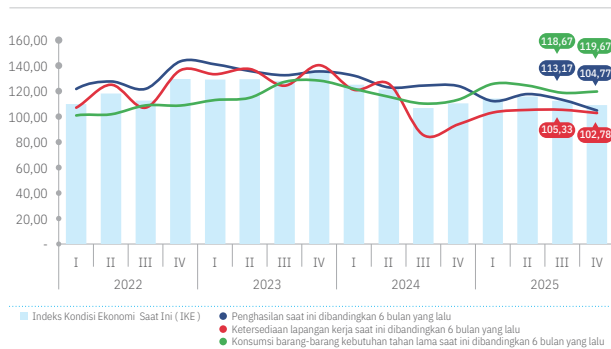
Komponen Pengeluaran	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,63	3,42	(0,92)	1,77	0,59	3,44	(0,96)	1,79
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,50	2,78	(7,46)	2,03	4,92	5,97	(7,34)	0,73
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(39,35)	32,73	(8,56)	42,62	(39,28)	18,82	0,36	42,22
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(2,67)	0,12	2,17	4,66	(4,54)	3,50	(0,12)	1,41
Ekspor Luar Negeri	(15,72)	9,95	7,25	9,58	(5,54)	(8,92)	3,59	(5,04)
Impor Luar Negeri	14,85	(18,70)	(2,76)	36,90	(17,25)	(11,71)	(7,29)	16,05
PDRB	0,02	4,47	2,47	(1,85)	0,16	4,65	2,25	(1,53)

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Kinerja konsumsi rumah tangga yang tetap kuat terkonfirmasi dari hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut tercermin pada Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang terjaga berada di atas level optimis (>100) sebesar 109,07. Kondisi tersebut juga tercermin pada 2 (dua) indikator penyusun IKE, yakni indeks penghasilan saat ini dan indeks ketersediaan lapangan kerja yang masing-masing tercatat sebesar 104,77 dan 102,78 (Grafik1-3).

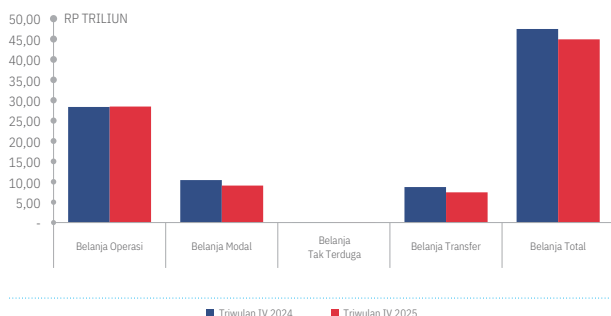
Dukungan pada kinerja konsumsi rumah tangga juga bersumber dari penyaluran kredit rumah tinggal dan flat/apartemen yang tumbuh kuat pada triwulan laporan. Adapun penyaluran kredit rumah tinggal yang disalurkan perbankan di Wilayah Sumatera Selatan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,40% (yoy) atau tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,36% (yoy). Perbaikan kinerja penyaluran kredit rumah tinggal didorong oleh faktor akselerasi program 3 juta rumah yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman semakin masif untuk diperluas sejak triwulan III 2025. Selanjutnya, perbaikan pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran kredit flat/apartemen. Kredit tersebut tercatat tumbuh sebesar 21,19% (yoy) pada triwulan IV 2025 atau tumbuh signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,33%.

Grafik 1.3. Indeks Konsumsi Saat Ini (IKE Survei Konsumen Bank Indonesia)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.5. Realisasi Belanja APBD Sumatera Selatan

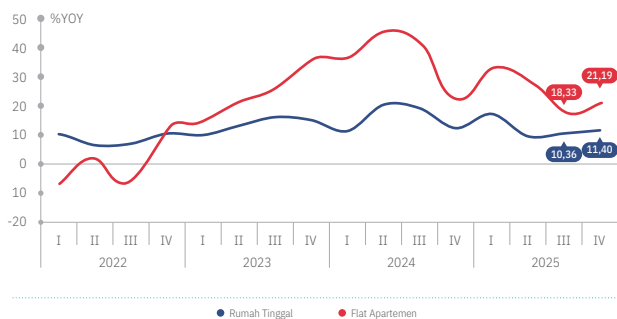


Sumber: BPKAD Sumsel, diolah

Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan IV 2025 mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV 2025, kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 3,15% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh kuat sebesar 3,44% (yoy). Di sisi lain, kinerja konsumsi pemerintah secara triwulanan pada triwulan laporan mencatatkan pertumbuhan sebesar 42,22% (qtq), tumbuh signifikan dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh terbatas sebesar 0,74% (qtq). Perkembangan ini sejalan dengan pola historisnya, dimana pertumbuhan pada triwulan IV secara triwulanan tumbuh secara signifikan dibanding triwulan sebelumnya.

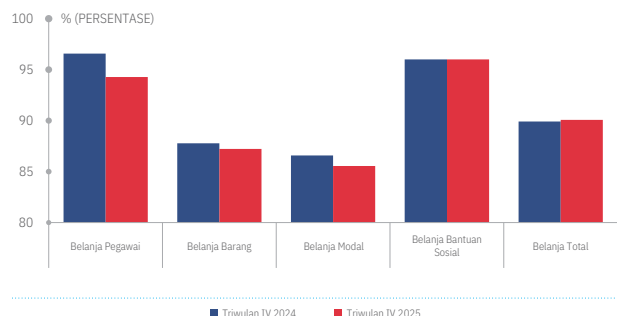
Secara umum, tetap kuatnya pertumbuhan secara tahunan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan didorong oleh percepatan penyaluran dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada triwulan IV 2025 di Sumatera Selatan. Adapun realisasi TKD pada triwulan IV 2025 mencapai Rp33,75 triliun (96,52% dari pagu), mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terealisasi sebesar Rp25,59 triliun (74,16% dari pagu). Akselerasi penyaluran TKD pada triwulan IV 2025 didorong oleh faktor perbaikan kinerja penyaluran DBH dan DAK Non Fisik, serta stabilitas DAU yang tetap kuat di tengah kontraksi pagu yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 1.4. Pertumbuhan Kredit Multiguna dan Ruko/Rukan Sumatera Selatan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.6. Realisasi Belanja APBN di Sumatera Selatan



Sumber: Kanwil DJPb Sumsel, diolah

Adapun realisasi DBH sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp12,20 triliun, meningkat sebesar 8,92% (yoy) dibandingkan realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp11,20 triliun. Peningkatan realisasi DBH tersebut terjadi di tengah adanya kebijakan pengurangan penyaluran DBH sebesar 50% dari nilai rekomendasi pada Desember 2025 untuk menjaga keberlanjutan fiskal APBN. Selanjutnya, pada komponen DAK Non Fisik, realisasi sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp4,95 triliun atau meningkat sebesar 18,42% (yoy) dibandingkan realisasi sampai dengan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar Rp4,18 triliun. Capaian ini didorong oleh kenaikan pagu dan kebijakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang dilaksanakan langsung ke rekening guru. Kemudian, komponen DAU tercatat tumbuh stabil dengan realisasi sampai dengan triwulan IV 2025 sebesar Rp13,82 triliun. Kondisi tersebut tercatat tumbuh sebesar 3,52% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp13,35 triliun. Di tengah kebijakan efisiensi yang berlangsung sepanjang tahun 2025, DAU tetap mengambil peran sebagai instrumen penyangga utama fiskal Sumatera Selatan dan menopang kesinambungan belanja wajib pemda (Kanwil DJPb Sumatera Selatan, 2025).

Dengan penyaluran TKD yang tetap kuat sampai dengan triwulan IV 2025, mendorong keberlangsungan fiskal di daerah yang tercermin pada penyaluran belanja APBD yang juga tetap kuat. Realisasi APBD Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp44,91 triliun atau meningkat 77,49% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya sebesar Rp25,30 triliun (Grafik 1-5). Hal yang sama juga terjadi pada APBN dimana realisasi APBN pada triwulan IV 2025 mencapai 92,59% terhadap pagu atau meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat realisasi sebesar 55,86% terhadap pagu (Grafik 1-6).

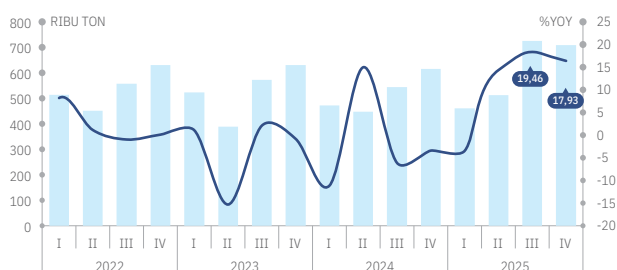
Percepatan realisasi belanja pemerintah di Sumatera Selatan juga didukung oleh belanja berbagai program prioritas pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Selatan. Program tersebut diantaranya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, sekolah rakyat, dan program strategis lainnya. Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus turut serta dalam mendukung percepatan realisasi belanja pemerintah melalui digitalisasi ekonomi keuangan di daerah pada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta perluasan *merchant* QRIS terutama UMKM.

1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB)/Investasi

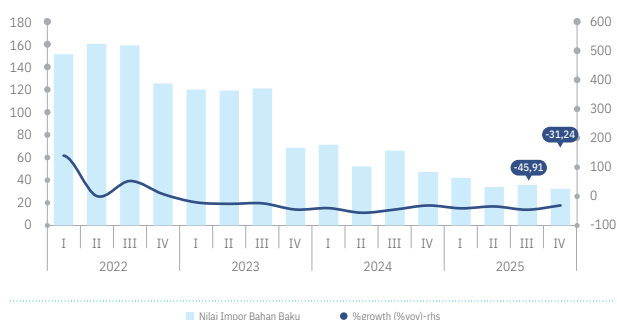
Kinerja investasi pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja investasi pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 0,08% (yoy), atau lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,05% (yoy). Faktor yang menyebabkan adanya perlambatan kinerja investasi pada triwulan IV 2025 adalah terbatasnya aktivitas investasi berupa pembelian mesin, peralatan, kendaraan bermotor, dan hal-lain yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta pada triwulan IV 2025. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan pertumbuhan triwulanan, kinerja investasi mengalami pertumbuhan sebesar 1,41% (qto) sepanjang triwulan IV 2025 atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,36% (qto). Jika ditinjau berdasarkan tren triwulanan, terdapat persamaan tren pertumbuhan PMTB pada tahun 2025 dibandingkan dengan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan aktivitas investasi pada triwulan III dan terus berlanjut hingga triwulan IV setiap tahunnya.

Jika ditinjau berdasarkan sub komponennya, faktor penahan kinerja investasi pada triwulan IV 2025 utamanya berasal dari subkomponen investasi non bangunan. Sub komponen investasi tersebut tercatat tumbuh berkontraksi sebesar 12,15% (yoy), atau berkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 8,47% (yoy). Hal tersebut tercermin dari realisasi impor barang modal, impor bahan baku, dan impor barang konsumsi yang seluruhnya tetap berada pada zona kontraksi pada triwulan IV 2025. Adapun kontraksi masing-masing komponen barang tersebut tercatat sebesar 12,21% (yoy); 31,24% (yoy); dan 69,30% (yoy) (Grafik 1-8-10).

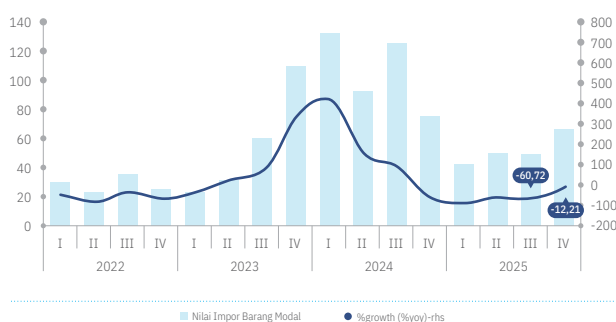
Selanjutnya, subsektor investasi bangunan juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Subsektor investasi tersebut tercatat tumbuh sebesar 2,39% (yoy) pada triwulan IV 2025 atau lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy). Pertumbuhan kinerja investasi tersebut juga tercermin pada tingkat penjualan semen di Sumatera Selatan juga tercatat tumbuh lebih lambat. Tingkat penjualan semen pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 17,93% (yoy), atau sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 19,46% (yoy) (Grafik 1-7).

Grafik 1.7 Volume Penjualan Semen di Sumatera Selatan

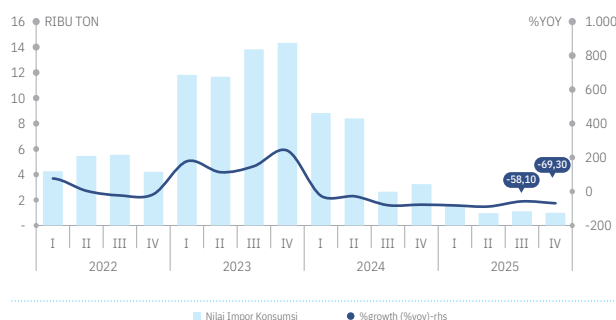
Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.9. Nilai Impor Bahan Baku Sumatera Selatan

Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

Grafik 1.8. Nilai Impor Barang Modal Sumatera Selatan

Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

Grafik 1.10. Nilai Impor Barang Konsumsi Sumatera Selatan

Sumber: DJBC Kemenkeu, diolah

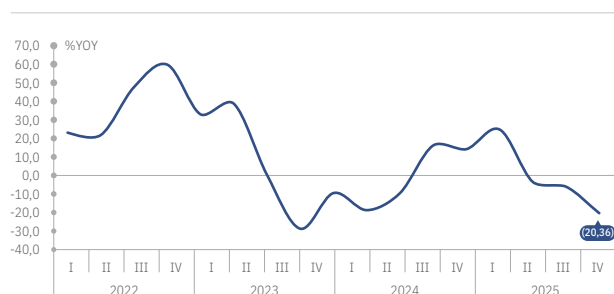
1.2.3. Ekspor Luar Negeri

Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja ekspor luar negeri Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat terkontraksi sebesar 20,36% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 8,30% (yoy) (Grafik 1-11). Kinerja ekspor yang terkontraksi pada triwulan IV 2025 disebabkan oleh harga komoditas unggulan Sumatera Selatan yang berada pada tren penurunan, khususnya CPO, batubara, dan minyak. Harga CPO pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar USD1.002,30/MT atau terkontraksi sebesar 12,48% (yoy). Kondisi tersebut tercatat berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu mendorong harga tumbuh sebesar 8,16% (yoy) atau tercatat sebesar USD1.013,62/MT. Selanjutnya, pada komoditas batubara, harga mengalami kontraksi sebesar 21,69% (yoy) pada triwulan IV 2025 atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 21,57% (yoy). Adapun harga pada periode pelaporan tercatat sebesar USD109,26/MT. Kemudian, pelemahan harga juga terjadi pada komoditas minyak yang tercatat terkontraksi sebesar 15,80% (yoy) pada triwulan IV 2025 dengan realisasi harga sebesar USD59,24/bbl. Kondisi tersebut terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 13,52% (yoy) (Grafik 1-12). Kondisi yang terjadi pada ekspor Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025

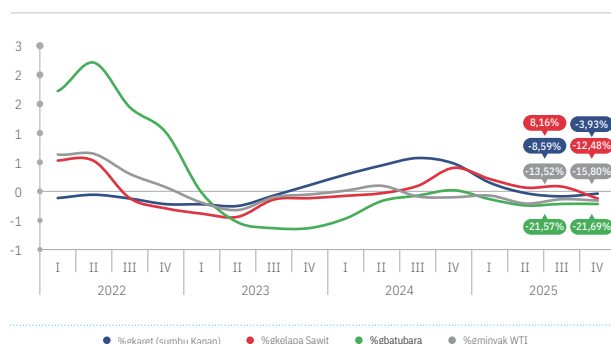
juga tercermin pada kinerja nilai dan volume ekspor yang juga turut mengalami kontraksi yang dapat dilihat pada Grafik 1-13.

Nilai ekspor Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar USD1,38 miliar atau tercatat mengalami kontraksi sebesar 23,54% (yoy). Kondisi tersebut mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 10,41% (yoy). Kontribusi ekspor terbesar pada triwulan IV 2025 adalah komoditas batu bara yang mencapai USD592,57 juta (pangsa 42,68%), diikuti oleh komoditas karet yang mencapai USD316,39 juta (pangsa 22,79%), kemudian komoditas *pulp and paper* yang mencapai USD311,90 juta (pangsa 22,46%), dan komoditas kelapa sawit dengan nilai sebesar USD20,74 juta (pangsa 1,49%) (Grafik 1-17).

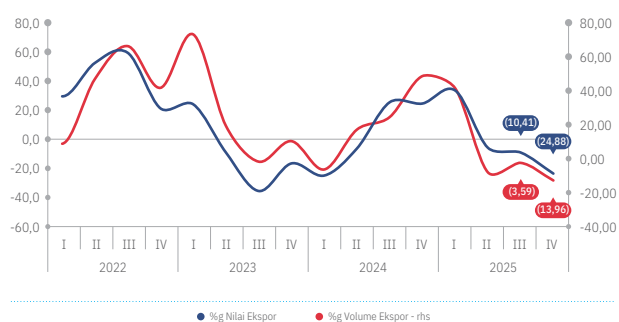
Seperti triwulan sebelumnya, pangsa ekspor komoditas terbesar pada triwulan IV 2025 adalah komoditas batu bara. Pada triwulan laporan, kinerja ekspor batu bara tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan (Grafik 1-15). Ekspor batu bara pada triwulan laporan tercatat USD592,57 juta atau terkontraksi sebesar 34,96% (yoy), atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 23,06% (yoy). Perlambatan kinerja ekspor yang masih berlanjut tersebut disebabkan oleh pelemahan

Grafik 1.11. Perkembangan PDRB Komponen Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan

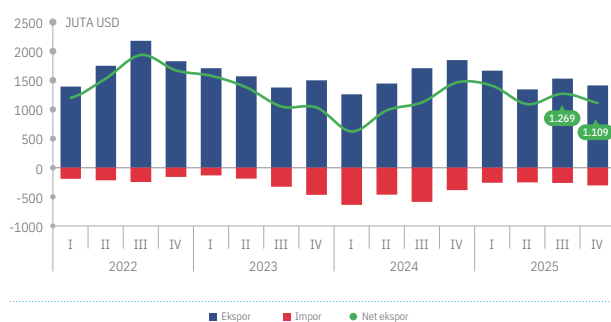
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 1.12. Perkembangan Harga Komoditas Internasional

Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik 1.13. Perkembangan Nilai dan Volume Ekspor Sumatera Selatan

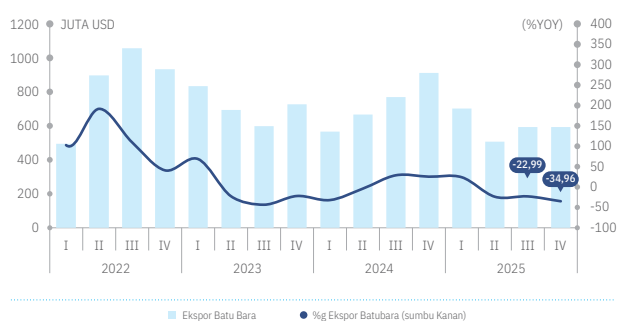
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.14. Perkembangan Volume Ekspor Impor Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

permintaan India dan Tiongkok yang gencar meningkatkan produksi domestik. Selain itu, perlambatan kinerja ekspor juga terjadi di tengah tertekannya tingkat harga batu bara global yang melemah akibat oversupply di negara mitra.

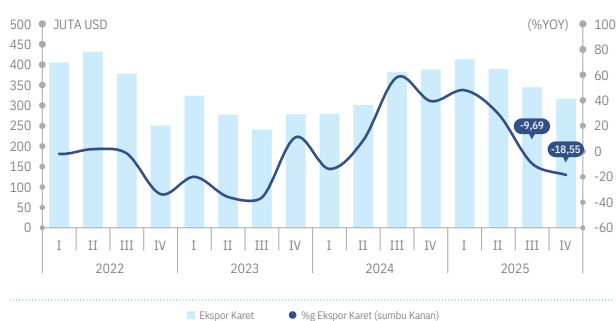
Nilai ekspor karet pada triwulan IV 2025 juga tercatat mengalami kontraksi. Pertumbuhan nilai ekspor karet mengalami kontraksi sebesar 18,55% (yoy) setelah pada triwulan III 2025 mengalami kontraksi sebesar 9,69% (yoy) (Grafik 1-16). Perlambatan kinerja ekspor karet pada triwulan laporan utamanya disebabkan oleh terbatasnya peningkatan produksi pada karet dengan jenis *crumb rubber*, sir 10, dan sir 20 pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan triwulan III 2025.

Grafik 1.15. Perkembangan Nilai Ekspor Batu Bara Sumatera Selatan

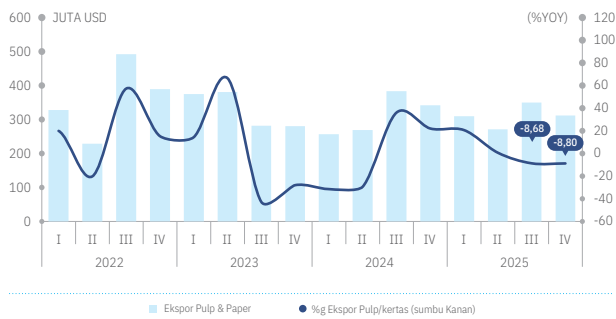
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Selanjutnya, kinerja ekspor *pulp & paper* juga tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan IV 2025. Kinerja ekspor *pulp & paper* pada triwulan IV 2025 tercatat terkontraksi sebesar 8,80% (yoy). Kondisi tersebut terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang terkontraksi sebesar 5,78% (yoy). Kondisi tersebut utamanya disebabkan oleh berlanjutnya pelemahan harga komoditas dan permintaan negara mitra dagang utama yang mengalami penurunan akibat kebijakan tarif resiprosal AS.

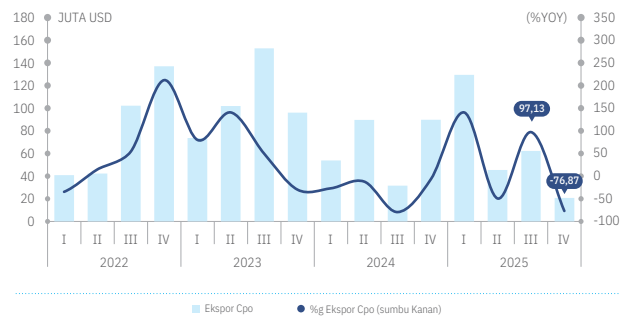
Terakhir, kinerja ekspor kelapa sawit Sumatera Selatan juga tercatat kembali mengalami kontraksi pada triwulan IV 2025. Kinerja ekspor kelapa sawit pada triwulan laporan tercatat

Grafik 1.16. Perkembangan Nilai Ekspor Karet Sumatera Selatan

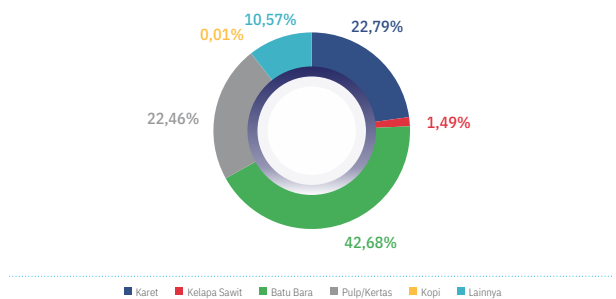
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.17. Perkembangan Nilai Ekspor Pulp&Paper Sumatera Selatan

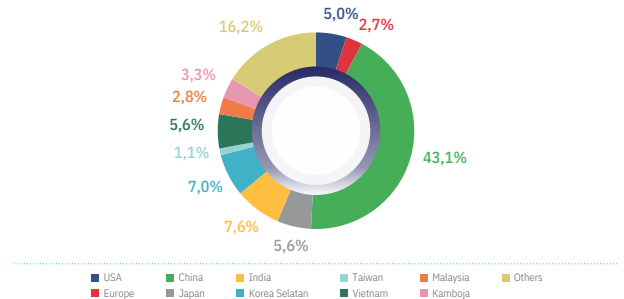
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.19. Pangsa Ekspor Luar Negeri Sumatera Selatan berdasarkan Nilai Ekspor

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.20. Pangsa Negara Tujuan Ekspor Berdasarkan Nilai Ekspor

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

tumbuh terkontraksi sebesar 76,87% (yoy) atau hanya mencatatkan realisasi sebesar USD20,74 juta. Kondisi tersebut berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh akseleratif sebesar 86,16% (yoy) (Grafik 1-18). Perlambatan kinerja ekspor kelapa sawit disebabkan oleh terbatasnya produksi kelapa sawit akibat musim trek dan tingginya intensitas curah hujan di penghujung triwulan IV 2025 yang berakibat pada terhambatnya proses panen. Selain itu, juga terjadi tekanan harga yang semakin menahan kinerja ekspor kelapa sawit. Harga CPO global sebagai produk turunan kelapa sawit tercatat sebesar USD1.002,30/MT pada triwulan IV 2025 atau mengalami penurunan sebesar 8,91% (yoy) dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya.

1.2.4. Impor Luar Negeri

Impor luar negeri Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Komponen impor luar negeri pada periode laporan tercatat terkontraksi sebesar 20,70% (yoy), lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 54,33% (yoy). Kenaikan permintaan akan komponen impor utamanya berasal dari peralatan industri (pangsa 14,99%) peralatan khusus industri (pangsa 29,89%), dan peralatan elektronik (pangsa 0,62%).

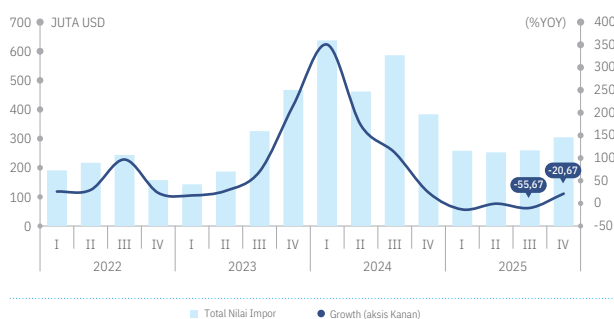
Secara khusus, naiknya permintaan peralatan khusus industri didorong oleh peningkatan kebutuhan industri pada berbagai pembangunan pabrik dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang terus berlanjut pada triwulan IV 2025. Jika ditinjau berdasarkan negara asalnya, impor di triwulan IV 2025 didominasi berasal dari Tiongkok dengan pangsa sebesar 47,75%, selanjutnya disusul oleh ASEAN (14,52%), India (0,60%), Uni Eropa (19,67), Amerika Serikat (3,55%), Jepang (8,53%), dan negara lainnya (5,38%) (Grafik 1-24).

Jika ditinjau berdasarkan kategorinya, pertumbuhan impor di Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 ditopang oleh impor barang modal dan impor barang baku. Impor barang modal pada triwulan IV 2025 tercatat terkontraksi sebesar 12,21% (yoy) atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 60,72% (yoy). Selanjutnya, impor barang baku tercatat terkontraksi sebesar 31,24% yoy pada triwulan laporan. Kondisi tersebut tercatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 45,91% (yoy). Di sisi lain, pada kelompok impor barang konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan. Kelompok tersebut tercatat terkontraksi sebesar 69,30% (yoy) pada triwulan IV 2025, atau mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat sebesar 58,10% (yoy).

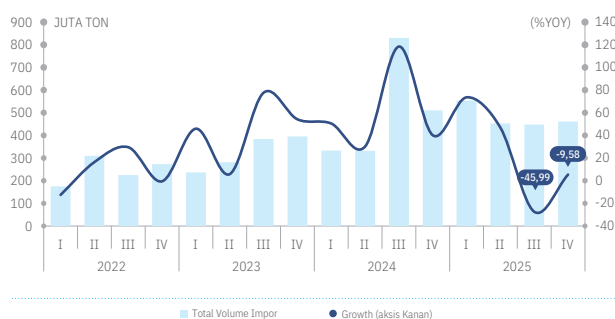
Tabel 1.4. Perkembangan Nilai Impor Komoditas Utama Provinsi Sumatera Selatan (Juta US\$)

Nilai	2024				2025				Pangsa (%)
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Total Nilai Impor	637,2	461,8	586,1	383,6	258,4	253,0	259,8	304,3	100,00
Peralatan Elektrik	16,5	23,6	34,5	11,5	14,3	4,8	1,6	7,4	0,62
Besi dan Baja	24,5	7,6	14,2	8,8	2,3	7,4	3,1	5,1	1,19
Peralatan industri	157,6	110,1	118,7	74,9	48,9	27,6	39,0	86,9	14,99
Gandum	24,9	23,1	5,7	7,8	2,7	0,0	9,3	0,0	3,59
Peralatan Khusus Industri	122,7	108,8	210,0	122,6	74,0	80,3	77,7	92,6	29,89

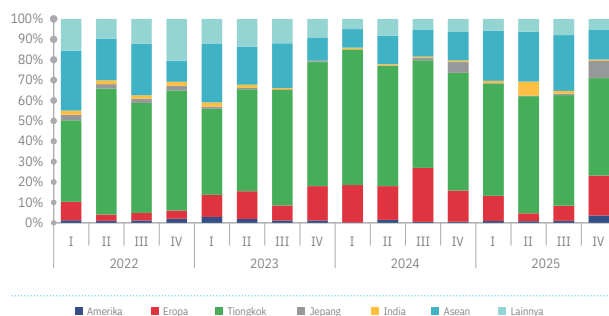
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.21. Perkembangan Nilai Impor Provinsi Sumatera Selatan

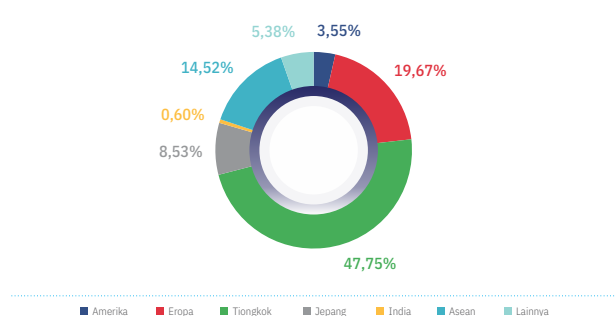
Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.22. Perkembangan Volume Impor Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.23. Perkembangan Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

Grafik 1.24. Pangsa Impor Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Negara Asal

Sumber: Direktorat Jenderal Bea Cukai, diolah

1.3. Perkembangan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 bersumber dari empat lapangan usaha (LU) utama, yaitu LU Pertambangan dan Penggalian (pangsa 24,11%), LU Industri Pengolahan (pangsa 18,11%), LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (pangsa 14,66%), serta LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (pangsa 13,03%) (BPS Sumatera Selatan, 2025). Kinerja LU utama tersebut tercatat tetap tumbuh positif, sehingga menjadi penopang perekonomian Sumatera Selatan pada triwulan laporan (Tabel 1-5). Secara kumulatif keempat LU memberikan kontribusi sebesar 69,99% terhadap struktur PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pertumbuhan, peningkatan kinerja ekonomi pada triwulan laporan utamanya berasal dari peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian. Adapun yang menjadi penahan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada triwulan laporan adalah LU Industri Pengolahan dan Konstruksi.

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian pada triwulan laporan tercatat tumbuh menguat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja LU Pertambangan dan Penggalian didorong oleh adanya peningkatan kebutuhan batu bara untuk mendukung kinerja industri domestik; peningkatan kebutuhan hasil galian C; dan optimalisasi pencarian sumur minyak baru yang terus berlanjut dan upaya *Development Drilling Program* (DDP) yang terus ditingkatkan.

Tabel 1.5. Laju Pertumbuhan Tahunan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%yoy)

Sektor	2024					2025				
	I	II	III	IV	Total	I	II	III	IV	Total
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	3,38	2,66	2,39	2,59	5,15	2,17	7,85	7,24	5,60
Pertambangan dan Penggalian	4,19	0,94	3,51	4,71	3,33	3,98	5,93	0,52	3,97	3,47
Industri Pengolahan	4,64	4,84	4,04	3,91	4,39	3,58	5,54	5,20	3,94	4,67
Pengadaan Listrik, Gas	8,07	8,89	9,01	7,94	8,48	11,39	4,68	6,04	5,76	6,88
Pengadaan Air	2,52	2,67	2,16	3,27	2,66	-0,06	1,27	1,98	1,39	1,15
Konstruksi	6,89	7,28	5,49	4,04	5,89	2,92	8,11	8,12	4,96	6,03
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	7,72	7,33	7,88	7,42	8,36	8,85	8,52	8,48	8,47
Transportasi dan Pergudangan	2,72	3,74	3,85	3,27	3,44	6,65	4,85	6,03	2,70	5,03
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,65	9,57	9,34	9,05	9,39	8,71	10,29	11,58	8,07	9,66
Informasi dan Komunikasi	6,12	9,88	10,20	9,17	8,84	8,85	4,97	5,39	5,30	6,10
Jasa Keuangan	10,17	8,08	10,23	0,12	7,09	2,26	2,74	1,94	11,19	4,45
Real Estate	6,51	8,41	8,81	8,91	8,17	7,31	7,74	7,98	8,09	7,79
Jasa Perusahaan	3,96	5,07	5,41	6,23	5,18	4,96	6,50	6,36	6,57	6,11
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,02	9,95	8,62	8,83	9,35	10,84	-0,75	-0,02	4,47	3,40
Jasa Pendidikan	4,94	5,98	6,41	9,43	6,76	7,90	-0,02	4,86	4,58	4,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,67	7,65	4,29	13,62	7,34	5,66	5,96	5,74	5,81	5,79
Jasa lainnya	4,92	6,49	5,49	-0,05	4,12	3,90	4,11	4,72	3,69	4,11
P D R B	5,06	4,96	5,04	5,07	5,03	5,22	5,42	5,20	5,54	5,35

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan Triwulanan Sektoral PDRB Provinsi Sumatera Selatan ADHK 2010 (%qtq)

Sektor	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,43	4,58	2,20	-12,54	12,36	1,73	7,83	-13,03
Pertambangan dan Penggalian	-5,64	8,01	8,30	-5,15	-6,26	10,04	2,84	-1,89
Industri Pengolahan	0,67	1,48	0,51	1,36	0,35	3,22	0,13	0,14
Pengadaan Listrik, Gas	-2,87	6,91	3,28	0,64	0,23	0,48	4,62	0,39
Pengadaan Air	-0,53	-0,88	1,01	2,86	-3,73	1,24	1,72	2,26
Konstruksi	0,16	0,35	0,64	2,97	-1,03	5,41	0,63	-0,04
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,04	2,97	2,54	2,18	0,40	3,47	2,29	2,14
Transportasi dan Pergudangan	-3,08	5,75	-1,07	1,85	0,09	3,97	0,03	-1,34
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4,32	7,93	0,05	5,54	-4,61	9,49	1,22	2,22
Informasi dan Komunikasi	2,43	3,34	0,15	2,98	2,13	-0,34	0,55	2,89
Jasa Keuangan	3,60	-0,18	4,78	-7,61	5,84	0,27	3,96	0,78
Real Estate	2,11	1,92	1,29	3,32	0,61	2,32	1,52	3,42
Jasa Perusahaan	-1,02	1,19	2,29	3,69	-2,20	2,67	2,16	3,89
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,94	22,78	-9,88	2,34	-2,11	9,94	-9,31	6,94
Jasa Pendidikan	-6,93	6,86	0,05	9,98	-8,23	-0,98	4,93	9,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,17	3,76	0,16	9,52	-7,17	4,06	-0,05	9,59
Jasa lainnya	-3,82	1,26	1,26	1,35	-0,02	1,46	1,86	0,35
P D R B	0,02	4,47	2,47	-1,85	0,16	4,65	2,25	-1,53

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Selanjutnya, kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada triwulan laporan tetap kuat didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Capaian kinerja tersebut sejalan dengan semakin insentifnya pelaksanaan berbagai program swasembada pangan dilakukan di Sumatera Selatan, diantaranya OPLA, Cetak Sawah, padi gogo, serta dibarengi dengan dukungan perluasan irigasi. Selanjutnya, pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semakin kuat turut ditopang oleh kondisi iklim yang lebih stabil pasca-El Niño serta dukungan program pemerintah daerah, khususnya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang secara keseluruhan mendorong peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan juga diikuti dengan perbaikan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

1.3.1. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalan

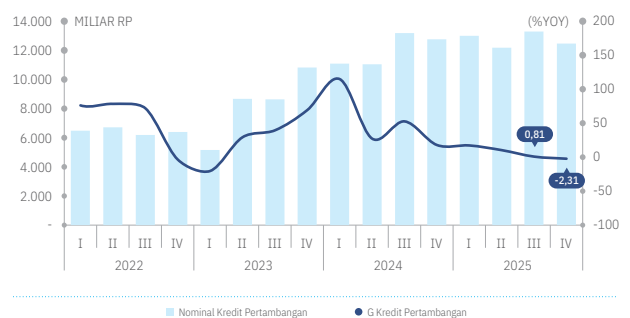
Pertumbuhan kinerja LU Pertambangan dan Penggalan pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh akseleratif. Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 3,97% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 0,52% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan triwulan tercatat terkontraksi sebesar 1,89% (qto), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,84% (qto).

Akselerasi kinerja pada triwulan IV 2025 terjadi pada seluruh subsektor. Perbaikan kinerja utamanya terjadi pada subsektor pertambangan batu bara dan lignit yang tercatat mengalami peningkatan dari 0,64% (yoy) pada triwulan III 2025 menjadi 6,52% (yoy) pada triwulan IV 2025. Peningkatan kinerja LU Pertambangan dan Penggalan didorong oleh adanya peningkatan kebutuhan batu bara untuk mendukung kinerja industri domestik. Selanjutnya, percepatan pertumbuhan juga terjadi pada subsektor pertambangan dan penggalan lainnya yang tumbuh sebesar 5,02% (yoy) pada triwulan IV 2025, atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 4,90% (yoy). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor peningkatan kebutuhan hasil galian C, khususnya pembangunan perumahan. Terakhir, perbaikan pertumbuhan juga terjadi pada subsektor pertambangan minyak dan gas bumi. Capaian subsektor tersebut tercatat terkontraksi sebesar 0,04% (yoy) pada triwulan IV 2025, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 2,46% (yoy). Kondisi tersebut terjadi didorong optimalisasi pencarian sumur minyak baru yang terus berlanjut dan upaya *Development Drilling Program* (DDP) yang terus ditingkatkan pada triwulan IV 2025 untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi.

Di tengah perbaikan kinerja LU Pertambangan pada triwulan IV 2025, terjadi pelemahan harga batu bara dan minyak mentah. Harga batu bara internasional pada triwulan laporan tercatat sebesar USD109,26/MT atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2024 yang tercatat sebesar USD139,52/MT. Kondisi pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 21,69% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, penurunan juga terjadi pada harga minyak mentah (WTI) yang tercatat sebesar \$59,23/bbl pada triwulan IV 2025. Kondisi tersebut mengalami penurunan sebesar 15,82% (yoy), dimana pada triwulan IV 2024 tercatat sebesar \$70,36/bbl.

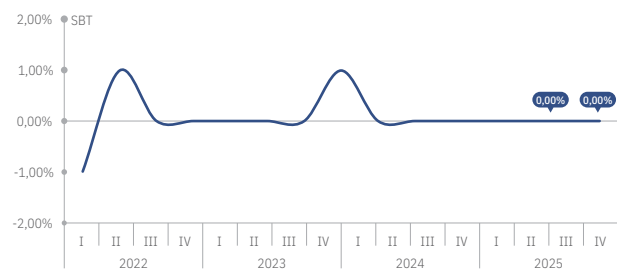
Selanjutnya, ekspor batu bara juga tercatat terkontraksi lebih dalam pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan nilai ekspor batu bara Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat terkontraksi sebesar 30,76% (yoy), atau terkontraksi lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 23,06% (yoy). Masih terjadinya perlambatan kinerja ekspor tersebut disebabkan oleh pelemahan permintaan India dan Tiongkok yang gencar meningkatkan produksi domestik. Selain itu, perlambatan kinerja ekspor juga terjadi di tengah tertekannya tingkat harga batu bara global yang melemah akibat *oversupply* di negara mitra.

Grafik 1.25. Penyaluran Kredit Sektor Pertambangan dan Penggalan Sumatera Selatan



Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.26. Kegiatan Usaha Pertambangan di Sumatera Selatan



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, diolah

Selain itu, perlambatan kinerja LU Pertambangan juga tertahan oleh tingkat penyaluran kredit yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Kredit pertambangan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp12,46 triliun atau berkontraksi sebesar 2,31% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,81% (yoy).

Selain itu, perlambatan kinerja LU Pertambangan juga tertahan oleh tingkat penyaluran kredit yang mengalami perlambatan pada triwulan laporan. Kredit pertambangan pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp12,46 triliun atau berkontraksi sebesar 2,31% (yoy), berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,81% (yoy).

1.3.2. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan LU Industri Pengolahan tercatat mengalami sedikit perlambatan. Kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 3,94% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,20% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan triwulanan tercatat tumbuh sebesar 0,14% (qtq), mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 0,13% (qtq).

Perlambatan kinerja tahunan LU Industri Pengolahan terutama bersumber dari terbatasnya kinerja subsektor pada industri pengolahan, diantaranya industri makanan dan minuman; industri kertas dan barang dari kertas; dan industri karet, barang dari karet dan plastik. Adapun subsektor industri makanan dan minuman mengalami pertumbuhan sebesar 6,42% (yoy) pada triwulan IV 2025, mengalami perlambatan dibandingkan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 9,77% (yoy). Perlambatan kinerja subsektor industri makanan dan minuman disebabkan oleh terbatasnya produksi kelapa sawit akibat musim trek dan tingginya intensitas curah hujan di penghujung triwulan IV 2025 yang berakibat pada terhambatnya proses panen. Selanjutnya, perlambatan kinerja juga terjadi pada subsektor industri kertas dan barang dari kertas yang tercatat berkontraksi sebesar 0,08% (yoy). Kondisi tersebut berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 6,31% (yoy). Perlambatan kinerja disebabkan oleh adanya penurunan permintaan oleh negara mitra dagang utama dan adanya kerusakan pada mesin di pabrik salah satu perusahaan *pulp & paper* di Sumatera Selatan yang mengakibatkan adanya pengurangan produksi. Selanjutnya, penurunan kinerja juga dirasakan oleh subsektor industri karet, barang dari karet dan plastik. Subsektor ini tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam sebesar 1,64% (yoy) pada triwulan IV 2025 dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tercatat berkontraksi sebesar 0,02% (yoy). Kondisi ini disebabkan

industri karet yang terus mengalami pelemahan seiring harga global yang terus berkontraksi. Pada triwulan IV 2025, harga karet global tercatat berkontraksi sebesar 16,61% (yoy) menjadi USD2,03/kg atau turun signifikan dibandingkan triwulan IV 2024 dengan harga USD2,44/kg. Dengan penurunan harga yang terus berlanjut tersebut, berdampak kepada tenaga penyadap yang terus mengalami pengurangan dan berpindah ke profesi lainnya. Berdasarkan kinerja pada ketiga subsektor tersebut, terjadi pelemahan pada seluruh komoditas unggulan selain batu bara di Sumatera Selatan.

Adapun satu-satunya faktor pendorong pertumbuhan LU Industri Pengolahan adalah dari kinerja subsektor industri batu bara dan pengilangan migas. Kinerja industri tersebut pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 1,95% (yoy) atau lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,02% (yoy). Perbaikan kinerja industri batu bara dan pengilangan migas sejalan dengan kinerja LU Pertambangan dan Penggalan yang tumbuh akseleratif pada triwulan IV 2025.

Jika ditinjau berdasarkan komoditasnya, terdapat kecenderungan bahwa peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan untuk aktivitas domestik. Hal tersebut sejalan dengan aktivitas komoditas ekspor unggulan di Sumatera Selatan cenderung mengalami perlambatan.

1.3.3. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada triwulan IV 2025, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mencatatkan pertumbuhan yang tetap kuat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tercatat tumbuh sebesar 7,24 % (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 7,85% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan triwulanan tercatat berkontraksi sebesar 13,03% (qtq), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 7,83% (qtq).

Tetap kuatnya akselerasi kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 terutama didorong oleh adanya peningkatan signifikan pada luas dan tingkat produksi padi di Sumatera Selatan. Luas lahan padi Sumatera Selatan tumbuh akseleratif sebesar 13,48% (yoy) pada triwulan IV 2025. Hal tersebut juga sejalan dengan tingkat produksi yang tumbuh hingga 21,63% (yoy) pada triwulan III 2025. Capaian kinerja tersebut sejalan semakin insentifnya pelaksanaan berbagai program swasembada pangan dilakukan di Sumatera Selatan, diantaranya OPLA, Cetak Sawah, padi gogo, serta dibarengi dengan dukungan perluasan irigasi.

Selanjutnya, pertumbuhan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semakin kuat turut ditopang oleh kondisi iklim yang lebih stabil pasca-El Niño serta dukungan program pemerintah daerah, khususnya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang secara keseluruhan mendorong peningkatan produksi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terjaga sejalan dengan kinerja penyaluran kredit yang mengalami perbaikan. Kredit pertanian pada triwulan IV 2025 tercatat bertumbuh sebesar 4,04% (yoy), mengalami percepatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,70% (yoy). Selain itu, risiko kredit pertanian yang dilihat dari NPL telah berada dalam batas aman atau senilai 2,04%, berada di batas bawah (*threshold*) yang ditetapkan sebesar 5,00%.

Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada periode pelaporan juga diikuti dengan perbaikan daya beli petani yang tercermin pada Indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Indeks NTP pada triwulan laporan tercatat sebesar 130,48, meningkat signifikan dibandingkan indeks pada triwulan sebelumnya sebesar 121,82. Perbaikan NTP tersebut utamanya bersumber dari adanya penguatan penerimaan pendapatan yang diterima oleh para petani tanaman pangan dan petani hortikultura. Kondisi tersebut tercermin pada indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) yang mengalami

peningkatan dari 102,32 pada triwulan III 2025 menjadi 102,67 pada triwulan IV 2025. Hal yang sama juga terjadi pada indeks Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH) yang mengalami peningkatan dari 94,26 pada triwulan III 2025 menjadi 99,62 pada triwulan IV 2025.

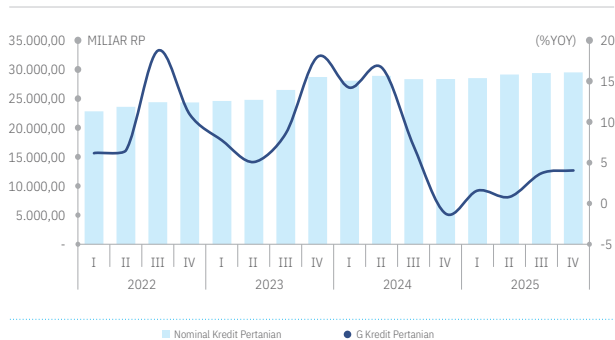
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Pada Triwulan IV 2025, kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencatatkan pertumbuhan yang stabil. Secara tahunan, lapangan usaha ini tumbuh sebesar 8,48% (yoy), tumbuh stabil dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,52% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan secara triwulanan mengalami sedikit perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 2,14% (qtq), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh lebih baik sebesar 2,29% (qtq).

Pertumbuhan tahunan pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terutama didorong oleh penguatan kinerja subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran. Adapun subsektor perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya mencatatkan pertumbuhan tahunan sebesar 2,82% (yoy), tumbuh akseleratif dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,07% (yoy). Subsektor ini memberikan kontribusi dominan terhadap keseluruhan kinerja lapangan usaha seiring dengan tingkat penjualan mobil yang juga turut mengalami percepatan pertumbuhan pada triwulan IV 2025. Hal tersebut tercermin pada tingkat penjualan kendaraan bermotor pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 3,28% (yoy) atau berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat berkontraksi 7,89% (yoy). Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia juga menunjukkan bahwa Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk kegiatan perdagangan besar dan eceran meningkat dari 2,35% pada triwulan III 2025 menjadi sebesar 3,31% pada triwulan IV 2025. Hal tersebut mengindikasikan adanya penguatan kinerja pelaku usaha di subsektor perdagangan besar dan eceran.

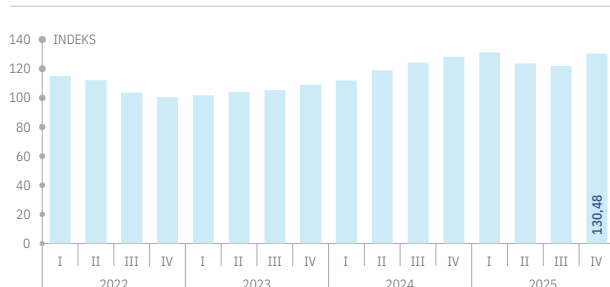
Di sisi lain, subsektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan perlambatan pertumbuhan dimana pada triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 9,55% (yoy), dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang tumbuh sebesar 10,22% (yoy). Hal tersebut tercermin dari penyaluran kredit di sektor perdagangan yang tercatat berkontraksi sebesar 3,06% (yoy) pada triwulan IV 2025. Kondisi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 0,57% (yoy).

Grafik 1.27. Penyaluran Kredit Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

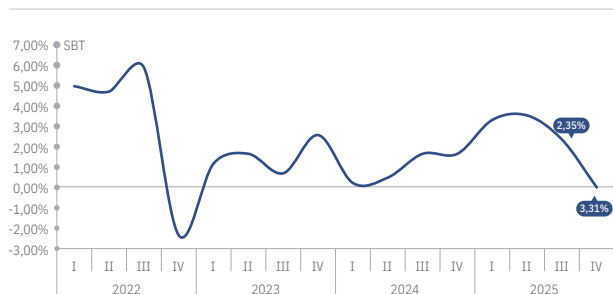


Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

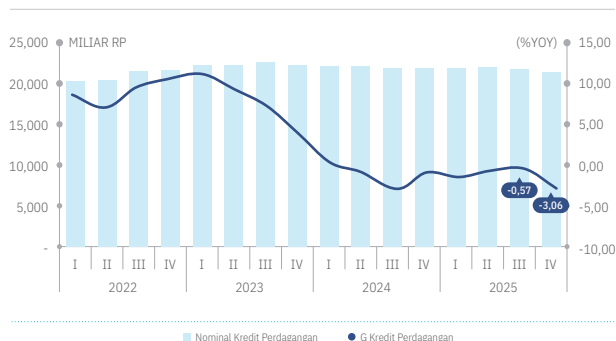
Grafik 1.28. Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan



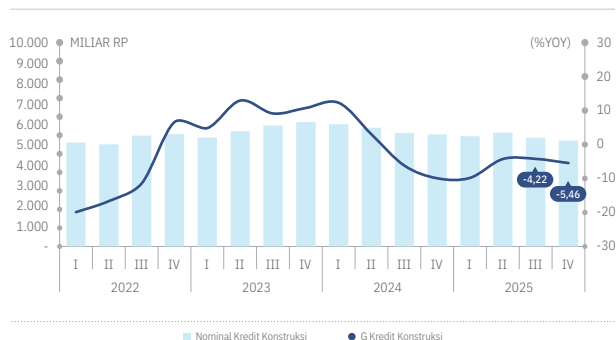
Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.29. Kegiatan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran di Sumatera Selatan

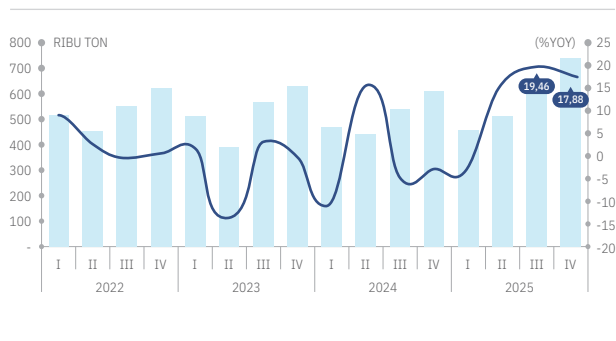
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.30. Penyaluran Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.31. Penyaluran Kredit Sektor Konstruksi Sumatera Selatan

Sumber: LBU Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.32. Realisasi Penjualan Semen di Sumatera Selatan

Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

Pada triwulan IV 2025, LU Kontruksi mencatatkan perlambatan pertumbuhan. Kinerja LU Konstruksi pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 4,96% (yoy), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,12% (yoy). Secara triwulanan, LU Konstruksi tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04% (qtq), setelah pada triwulan sebelumnya masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,63% (qtq).

Perlambatan laju pertumbuhan LU Konstruksi pada triwulan IV 2025 terkonfirmasi dari tingkat kredit yang disalurkan pada sektor konstruksi di Sumatera Selatan. Pada triwulan IV 2025, kredit yang disalurkan oleh perbankan pada LU konstruksi tercatat terkontraksi sebesar 5,46% (yoy). Kontraksi tersebut tercatat lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,22% (yoy).

Kinerja LU Konstruksi yang tumbuh melambat sejalan dengan realisasi penjualan semen di Sumatera Selatan pada triwulan IV tahun 2025. Tingkat penjualan semen pada triwulan IV 2025 tercatat tumbuh sebesar 17,88% (yoy), atau mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya yang tumbuh akseleratif sebesar 19,46% (yoy) (Grafik 1-7).

Selanjutnya, kinerja sektor konstruksi tertahan oleh mundurnya target penyelesaian sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Sumatera Selatan menjadi tahun 2026. Sejumlah pengerjaan PSN yang mendukung sektor pertanian dan penyelesaiannya mundur diantaranya yakni Bendungan Tiga Dihaji, Jaringan Irigasi Lematang, dan Jaringan Irigasi Lempuing.

BOKS 1 :

Menjaga Inflasi, Mempercepat Digitalisasi: Strategi Terintegrasi Berbuah Prestasi

Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan capaian kinerja yang kuat dalam pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, percepatan digitalisasi, dan perluasan akses keuangan daerah sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut tercermin dari diraihnya sejumlah penghargaan, yakni:

1. TPID Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025: Provinsi Sumatera Selatan;
2. TP2DD Provinsi Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025: Provinsi Sumatera Selatan;
3. TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sumatera Tahun 2025: Provinsi Sumatera Selatan;
4. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera Tahun 2025: Kota Palembang;
5. TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2 Kawasan Sumatera Tahun 2025: Kabupaten Ogan Komering Ilir

Selain itu, Gubernur Sumatera Selatan juga memperoleh apresiasi sebagai *People of The Year 2025* kategori Pemberdaya Pangan dan Petani Lokal. Rangkaian penghargaan tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan dan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari penguatan implementasi strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025. Dari sisi Keterjangkauan Harga, TPID Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan Operasi Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang lebih tepat

asaran, termasuk menjual komoditas dengan harga lebih terjangkau melalui berbagai jaringan, seperti Toko KePo (Kebutuhan Pokok), RPK (Rumah Pangan Kita), Toko Penyeimbang, maupun OKI-MART. Upaya ini didukung oleh pemantauan harga secara rutin melalui sidak pasar dan pemanfaatan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pada aspek Ketersediaan Pasokan, penguatan produksi pangan lokal menjadi fokus utama melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), optimalisasi lahan pekarangan, pemberdayaan kelompok tani dan kelompok wanita tani, serta penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Diversifikasi komoditas dan pemanfaatan teknologi pertanian adaptif iklim turut dilakukan guna memitigasi risiko gangguan produksi akibat faktor cuaca.

Dari sisi Kelancaran Distribusi, TPID Sumatera Selatan mendorong optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) baik dalam skema *government to government* maupun *business to business* serta memperkuat peran BUMD dan distributor lokal untuk menjaga kelancaran pasokan antarwilayah. Sementara itu, pada aspek Komunikasi Efektif, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota secara aktif melaksanakan rapat koordinasi rutin, publikasi informasi pasar murah dan jaringan penyalur SPHP kepada masyarakat, serta penguatan edukasi mengenai inflasi dan bijak belanja guna menjaga ekspektasi harga tetap terjangkau. Transparansi informasi dan respons kebijakan yang cepat menjadi faktor penting dalam memitigasi potensi gejolak harga. Selain itu, sinergi dengan berbagai



Gambar 1. Penyampaian capaian penghargaan TPID, TP2DD, dan TPAKD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025



Gambar 2. Rapat Koordinasi dan High Level Meeting TPID-TP2DD se-Sumatera Selatan dalam rangka penguatan sinergi pengendalian inflasi menjelang HBKN serta penyampaian capaian penghargaan Tahun 2025



pemangku kepentingan seperti Bulog, BPS, hingga KPPG terus dilakukan oleh TPID Sumatera Selatan untuk memastikan ketersediaan stok strategis tetap terjaga dan inflasi Sumatera Selatan berada pada rentang yang terkendali.

Di luar aspek pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi melalui TP2DD dan perluasan akses keuangan melalui TPAKD juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan fondasi ekonomi daerah. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), optimalisasi QRIS dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta peningkatan inklusi keuangan di sektor

UMKM dan pesantren memperkuat efisiensi fiskal dan memperluas akses pembiayaan produktif.

Secara keseluruhan, penghargaan yang diraih Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mencerminkan keberhasilan bauran kebijakan pengendalian inflasi dan transformasi digital yang terintegrasi. Ke depan, penguatan sinergi kebijakan melalui strategi 4K, percepatan digitalisasi, dan pemberdayaan sektor pangan lokal diharapkan terus mendukung stabilitas harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.





Perkembangan Keuangan Daerah



Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan IV 2025 menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja yang relatif tinggi, meski termoderasi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan transfer ke daerah (TKD).

- Realisasi pendapatan pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp62,92 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp65,30 triliun. Namun demikian, realisasi pendapatan tersebut secara persentase meningkat dari 86,80% pada triwulan IV 2024 menjadi 91,32% pada triwulan IV 2025, yang terutama disebabkan oleh penurunan pada penerimaan pajak provinsi dan kabupaten/kota..
- Sejalan dengan penurunan pendapatan, realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp93,16 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp100,33 triliun. Secara persentase, realisasi belanja tersebut turut menunjukkan penurunan dari 91,39% pada tahun 2024 menjadi 89,32% pada triwulan IV 2025. Hal ini terutama disebabkan oleh dampak efisiensi anggaran yang menyebabkan eksekusi belanja belum dapat dilaksanakan dan/atau mengalami penundaan.
- Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) triwulan IV 2025 sebesar Rp33,76 triliun atau 96,25% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp33,09 triliun atau 98,81% dari pagu. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pagu yang mengakibatkan kenaikan realisasi pada DAU dan DBH.

2.1. Gambaran Umum

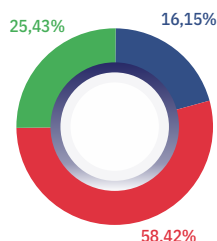
Pada periode laporan, pendapatan daerah pada APBD dan APBN Provinsi Sumatera Selatan ditargetkan sebesar Rp68,9 triliun, menurun 8,43% (yoy) dibandingkan tahun 2024. Target pendapatan tersebut terdiri dari target APBD Pemerintah Provinsi sebesar Rp11,13 triliun (pangsa 16,15%), target APBD gabungan Kabupaten/Kota sebesar Rp40,25 triliun (pangsa 58,42%), dan target APBN Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp17,52 triliun (pangsa 25,43%) (Grafik 2-1 dan 2-2).

Hingga akhir triwulan IV 2025, realisasi pendapatan pemerintah¹ di Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp62,92 triliun, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan secara persentase meningkat dari 86,80% pada triwulan IV 2024 menjadi 91,32% di triwulan IV 2025. Namun demikian, penurunan ditengarai oleh realisasi pendapatan di tingkat pemerintah provinsi yang mengalami kontraksi sebesar 6,69% diikuti oleh Kabupaten/Kota yang juga mengalami kontraksi sebesar 4,48% seiring dengan efisiensi anggaran pemerintah daerah, implementasi peraturan baru daerah yakni UU no.1 tahun 2022, serta lebih rendahnya target penerimaan negara di Sumatera Selatan pada tahun ini. Berdasarkan sumbernya, realisasi pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan daerah Provinsi

Sumatera Selatan sebesar Rp10,06 triliun atau 90,39% dari target, pendapatan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp36,40 triliun atau 90,45% dari target, serta pendapatan APBN K/L sebesar Rp16,45 triliun atau 93,91% dari target.

Sementara itu, pagu anggaran belanja pemerintah di Sumatera Selatan triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp104,31 triliun, menurun sebesar 4,98% (yoy) dibandingkan tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pagu anggaran belanja APBN diikuti oleh anggaran belanja Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran belanja terdiri dari tiga komponen yaitu APBD Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp11,24 triliun (pangsa 10,58%), APBD gabungan kabupaten/kota senilai Rp42,44 triliun (pangsa 40,69%), dan APBN yang dialokasikan untuk wilayah Sumatera Selatan senilai Rp50,63 triliun (pangsa 48,54%) (Grafik 2-3 – 2-4). Lebih lanjut, realisasi belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Sumatera Selatan sampai dengan triwulan IV 2025 mencapai Rp93,14 triliun atau 89,32% dari pagu, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja periode yang sama tahun 2024 yang tercatat sebesar 91,39% dari pagu.

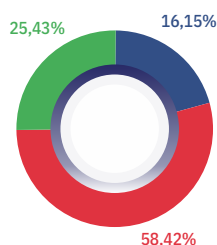
Grafik 2.1. Struktur Anggaran Pendapatan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 (Rp Miliar)



■ Pemprov Sumatera Selatan ■ Kabupaten/ Kota ■ APBN

Sumber: BPKAD dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

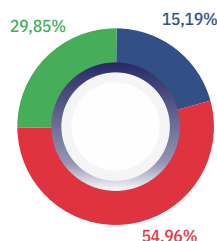
Grafik 2.3. Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 (Rp Miliar)



■ Pemprov Sumatera Selatan ■ Kabupaten/ Kota ■ APBN

Sumber: BPKAD dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

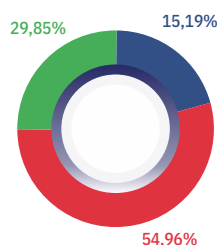
Grafik 2.2. Struktur Anggaran Pendapatan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)



■ Pemprov Sumatera Selatan ■ Kabupaten/ Kota ■ APBN

Sumber: BPKAD dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 2.4. Struktur Anggaran Belanja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2024 (Rp Miliar)



■ Pemprov Sumatera Selatan ■ Kabupaten/ Kota ■ APBN

Sumber: BPKAD dan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

1. Merupakan konsolidasi pendapatan APBN dan APBD di Provinsi Sumatera Selatan

2.2. APBD Wilayah Provinsi Sumatera Selatan²

2.2.1. Realisasi Pendapatan APBD Sumatera Selatan

Komponen Pendapatan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 secara persentase keseluruhan terealisasi sebesar 95,64%, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 92,64%. Nominal realisasi pendapatan daerah pada triwulan IV 2025 adalah sebesar Rp46,46 triliun. Komponen pendapatan yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi 92,77%, Pendapatan Transfer terealisasi 96,40%, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar 99,20%. (Tabel 2-1).

Secara spasial, persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi dicapai oleh Kabupaten Muara Enim (114,04% dari target Rp3,47 triliun), diikuti Kabupaten OKU (104,46% dari target Rp1,55 triliun), serta Kota Palembang (104,30% dari target Rp4,64 triliun). Sementara, realisasi terendah berasal dari Kabupaten Empat Lawang (73,57% dari target Rp1,48 triliun), Kabupaten Ogan Ilir (88,67% dari target Rp1,71 triliun) dan Kabupaten Musi Banyuasin (90,03% dari target Rp4,29 triliun) (Grafik 2-5).

2.1.2.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara nominal, realisasi PAD pada triwulan IV 2025 meningkat. Realisasi PAD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 secara keseluruhan sebesar Rp9,53 triliun, meningkat sebesar 3,88% (yoy) dibandingkan

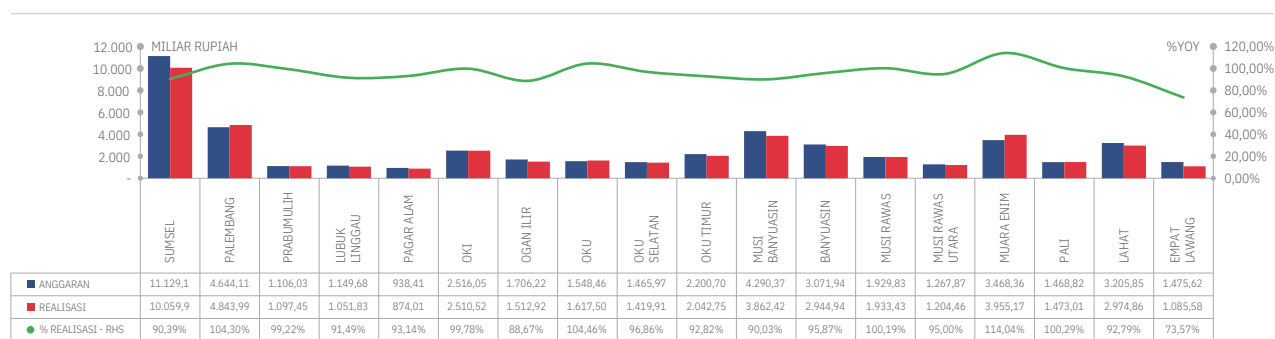
dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp9,17 triliun. Secara persentase, realisasi PAD pada triwulan IV 2025 turut meningkat menjadi 92,77% dari target anggaran dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 85,04%. Peningkatan persentase realisasi PAD disebabkan oleh lebih tingginya realisasi pendapatan pajak daerah yang sebesar Rp6,97 triliun atau 97,14% dari target diikuti oleh retribusi daerah yang sebesar Rp512,34 miliar atau 79,95% dari target. Upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera Selatan tahun 2025 dilakukan melalui berbagai inovasi, antara lain penguatan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui perjanjian kerja sama pertukaran data perpajakan, pengawasan kepatuhan, dan peningkatan layanan publik yang transparan dan akuntabel. Pemprov Sumsel juga memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pajak kendaraan bermotor dengan skema berbeda sesuai kategori, untuk menjaga minat wajib pajak sekaligus memperhatikan aspek sosial ekonomi. Selain itu, dilakukan digitalisasi retribusi dan pengembangan transaksi non-konvensional melalui integrasi dengan *e-commerce*, optimalisasi BLUD melalui investasi teknologi dan penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan kapabilitas manajerial dan transparansi keuangan BUMD agar mampu menghasilkan laba yang berkelanjutan. Selain itu, berkat berbagai inovasi digitalisasi, Provinsi Sumsel meraih penghargaan *Champions Digital* TP2DD Provinsi Terbaik dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendik) Republik Indonesia (RI) sebagai provinsi paling mendukung kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Tabel 2.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp miliar)

Uraian	IV 2024			IV 2025		
	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi
Pendapatan	52.778,75	48.893,39	92,64%	48.583,43	46.464,75	95,64%
Pendapatan Asli Daerah	10.782,31	9.169,60	85,04%	10.268,11	9.525,49	92,77%
Pendapatan Transfer	41.455,86	39.244,17	94,66%	38.156,51	36.781,73	96,40%
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	540,5	479,62	88,72%	158,81	157,53	99,20%

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

2. Merupakan APBD konsolidasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 17 (tujuh belas) Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan

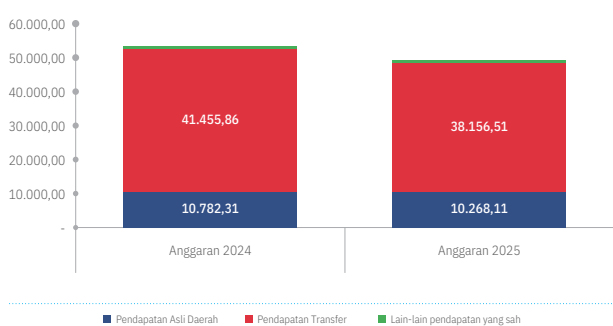
2.1.2.2. Realisasi Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer masih menjadi komponen terbesar dengan pangsa mencapai 78,54% atau sebesar Rp38,16 triliun dari keseluruhan target pendapatan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang secara total sebesar Rp48,58 triliun. Target Pendapatan Transfer ini bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp34,84 triliun (pangsa 91,31%), Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp2,69 triliun (pangsa 7,04%), dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar Rp631,22 miliar (pangsa 1,65%). Hingga triwulan IV 2025, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp36,78 triliun (96,40% dari target), lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp39,24 triliun (94,66% dari target).

2.1.2.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pos lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercatat menurun. Pada triwulan IV 2025, realisasi pos lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp157,53 miliar, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp479,62 miliar. Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan memberikan kontribusi sebesar Rp158,81 miliar atau 0,33% terhadap target total pendapatan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sebesar Rp48,58 triliun.

Grafik 2.6. Target Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025



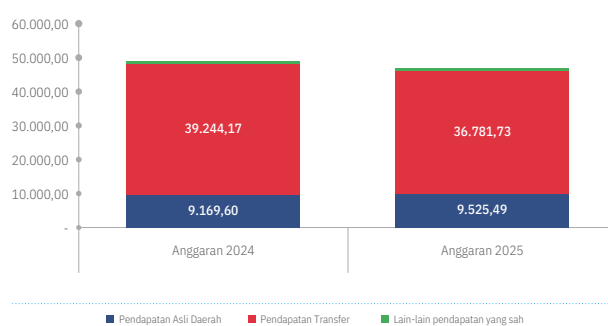
Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

2.2.2. Realisasi Belanja APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pada triwulan IV 2025, pagu anggaran belanja dan transfer APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024. Pagu anggaran Belanja dan Transfer APBD menurun sebesar 8,71% (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024, dari Rp55,07 triliun menjadi Rp50,27 triliun. Pagu belanja terdiri atas belanja operasi sebesar Rp32,28 triliun atau dengan pangsa 64,21%, belanja modal sebesar Rp9,36 triliun dengan pangsa 18,62%, belanja transfer sebesar Rp8,39 triliun dengan pangsa 16,69%, dan belanja tidak terduga sebesar Rp241,15 miliar dengan pangsa 0,48%.

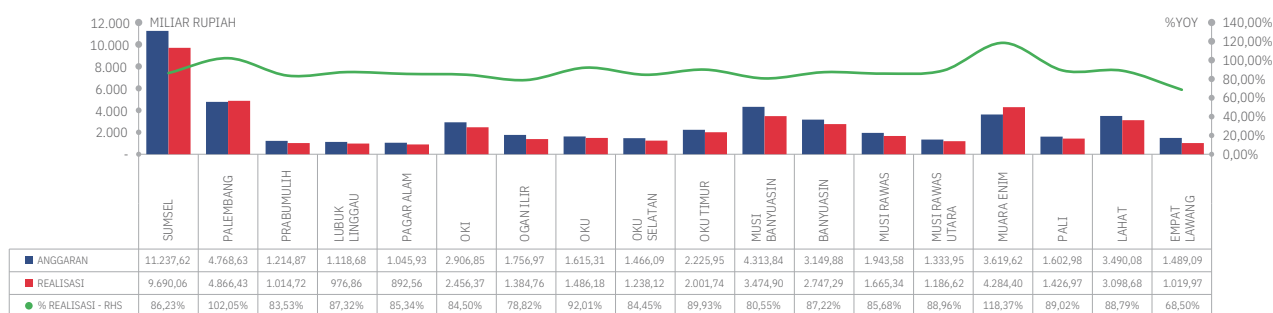
Realisasi belanja APBD triwulan IV 2025 secara keseluruhan menurun dibanding triwulan IV 2024. Realisasi belanja dan transfer APBD di Provinsi Sumatera Selatan hingga triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp44,91 triliun atau 89,34%, lebih rendah dari realisasi belanja tahun 2024 yang sebesar Rp47,46 triliun. Realisasi belanja terdiri dari belanja operasi dengan pangsa sebesar 63,30%, belanja modal dengan pangsa sebesar 11,91%, belanja transfer dengan pangsa sebesar 20,21%, dan belanja tidak terduga dengan pangsa sebesar 0,01%. Adapun belanja operasi pada triwulan IV 2025 terealisasi sebesar Rp28,43 triliun (88,08% dari pagu Rp32,28 triliun). Sementara itu, belanja modal, belanja transfer, dan belanja tidak terduga

Grafik 2.7. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 2.8. Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2025



Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025 (Rp Miliar)

Uraian	IV 2024			IV 2025		
	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Target Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi
BELANJA DAN TRANSFER	55.071,80	47.455,69	86,17%	50.272,78	44.911,97	89,34%
BELANJA OPERASI	32.735,26	28.336,18	86,56%	32.277,70	28.430,74	88,08%
Belanja Pegawai	15.949,87	14.376,91	90,14%	17.833,33	15.654,04	87,78%
Belanja Barang dan Jasa	14.328,66	11.816,77	82,47%	12.844,84	11.513,47	89,63%
Belanja Bunga	33,86	31,85	94,07%	21,63	17,62	81,49%
Belanja Subsidi	20,13	18,37	91,27%	35,85	26,36	73,54%
Belanja Hibah	2.305,56	2.032,97	88,18%	1.410,05	1.114,73	79,06%
Belanja Bantuan Sosial	97,18	59,31	61,03%	132,00	104,52	79,18%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	13.041,13	10.406,76	79,80%	9.361,93	9.075,32	96,94%
Belanja Tanah	174,25	76,56	43,94%	174,34	43,44	24,92%
Belanja Peralatan dan Mesin	1.985,85	1.553,24	78,22%	1.769,08	1.828,95	103,38%
Belanja Gedung dan Bangunan	2.729,97	2.057,37	75,36%	2.061,52	1.805,93	87,60%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.907,10	6.534,37	82,64%	5.097,37	5.189,65	101,81%
Belanja Aset Tetap Lainnya	208,52	162,09	77,73%	235,42	184,67	78,45%
Belanja Aset Lainnya	35,43	23,13	65,29%	24,20	22,67	93,69%
BELANJA TIDAK TERDUGA	381,70	12,39	3,25%	241,15	5,07	2,10%
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	#DIV/0!	241,15	5,07	2,10%
TRANSFER	8.913,72	8.700,36	97,61%	8.392,00	7.400,84	88,19%

Sumber: BPKAD Provinsi Sumatera Selatan, diolah

masing-masing terealisasi sebesar Rp9,08 triliun (96,94% dari pagu Rp9,36 triliun), Rp7,40 triliun (88,19% dari pagu Rp8,39 triliun), dan Rp5,07 miliar (2,10% dari pagu Rp241,15 miliar (Tabel 2-2).

Dalam rangka mendukung percepatan digitalisasi dan peningkatan akuntabilitas transaksi Pemerintah Daerah, Bank Indonesia telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota untuk mendorong perluasan implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Hal ini terkonfirmasi dari hasil penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) yang menunjukkan seluruh Pemerintah Daerah telah berada pada Tahap Digital sejak 2023. Selain itu, untuk mempermudah belanja pemerintah daerah, 7 dari 18 pemerintah daerah di Sumatera Selatan telah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel.

Secara spasial, realisasi belanja tertinggi berada pada Kabupaten Muara Enim (118,37% dari pagu Rp3,62 triliun), diikuti oleh Kota Palembang (102,5% dari pagu Rp4,77 triliun) dan Kabupaten OKU (92,01% dari pagu Rp1,62 triliun). Adapun realisasi belanja terendah berada pada Kabupaten Empat Lawang (68,50% dari pagu Rp1,49 triliun) diikuti oleh Kabupaten Ogan Ilir (78,82% dari pagu Rp1,76 triliun) dan Kabupaten Musi Banyuasin (80,55% dari pagu Rp4,31 triliun (Grafik 2-8).

2.3. APBN Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum, realisasi pendapatan Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 secara persentase meningkat jika dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 mencapai 93,91% dari target Rp17,52 triliun atau secara nominal Rp16,45 triliun (Tabel 2-3). Adapun peningkatan pendapatan bersumber dari penerimaan pajak dan kepabeanan & cukai triwulan IV 2025 yang masing-masing meningkat sebesar 7,31% (yoy) dan 40,83% (yoy). Meningkatnya persentase realisasi pendapatan Pemerintah Pusat ini disebabkan oleh peningkatan setoran masa PPN dan PPh Badan dari komoditas unggulan, serta ditopang dari penerimaan kepabeanan dan cukai dipengaruhi kenaikan harga patokan ekspor (HPE) dan meningkatnya volume ekspor produk CPO & turunannya.

Penerimaan bea cukai pada triwulan IV tahun 2025 mencapai Rp482,72 miliar, mengalami kenaikan yang signifikan dipengaruhi oleh peningkatan realisasi bea keluar. Terdorongnya realisasi bea keluar disebabkan oleh meningkatnya volume ekspor komoditas, khususnya CPO dan produk turunannya, serta didukung oleh kenaikan HPE dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan bea masuk hingga

triwulan IV 2025 sebesar Rp143,28 miliar atau 123,05% dari target seiring restitusi dan penurunan impor, sementara penerimaan bea keluar sebesar Rp337,04 miliar atau 597,38% dari target. Sedangkan kinerja PNBP wilayah Sumsel hingga triwulan IV 2025 menunjukkan pencapaian yang tinggi dengan total penerimaan sebesar Rp2,74 triliun, meski sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya akibat perubahan status Universitas Sriwijaya sebagai PTN BH. Pendapatan PNBP terdiri dari komponen PNBP BLU yang mencapai Rp1,67 triliun atau 87,32% dari target, sebagian besar berasal dari layanan dari BLU Rumah Sakit, utamanya dari RSMH Palembang. Sementara itu, pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp1,07 triliun atau telah mencapai 199,71% dari pagu yang berasal dari meningkatnya pendapatan jasa kepelabuhanan.

Pagu belanja Pemerintah Pusat atas beban APBN di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 mengalami penurunan terutama disebabkan kebijakan efisiensi anggaran. Pagu belanja APBN Kementerian/Lembaga di Sumatera Selatan pada tahun 2025 sebesar Rp15,66 triliun, menurun 26,70% dibandingkan pagu tahun 2024 yang sebesar Rp21,16 triliun. Berdasarkan strukturnya, komposisi pagu

belanja K/L terdiri atas belanja barang dengan pangsa sebesar 44,61% atau secara nominal sebesar Rp6,98 triliun, diikuti oleh belanja pegawai dengan pangsa sebesar 43,05% setara Rp6,59 triliun, belanja modal dengan pangsa sebesar 12,16% atau Rp1,66 triliun, dan sisanya belanja bantuan sosial dengan pangsa 0,18% atau sebesar Rp27,99 miliar. Penurunan pagu terbesar terjadi pada pagu belanja modal dan barang sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang mulai berjalan di tahun ini.

Realisasi penyerapan belanja Pemerintah Pusat atas beban APBN di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp14,49 triliun atau 92,59% dari pagu. Realisasi serapan ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp19,78 triliun atau 93,46% dari pagu. Persentase realisasi belanja terbesar terdapat pada belanja pegawai dengan realisasi sebesar 97,85% atau senilai Rp6,59 triliun dan belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar 100,00% atau Rp27,99 miliar. Selanjutnya, belanja barang dan modal masing-masing terealisasi sebesar 89,03% dan 86,93% atau secara nominal sebesar Rp6,22 triliun dan Rp1,66 triliun (Tabel 2-5).

Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan Negara di Provinsi Sumatera Selatan 2024-2025

Uraian	IV 2024			IV 2025		
	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi
Pendapatan	22.455,30	16.410,73	73,08%	17.519,50	16.451,73	93,91%

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 2.4. Uraian Belanja Modal K/L Sumatera Selatan

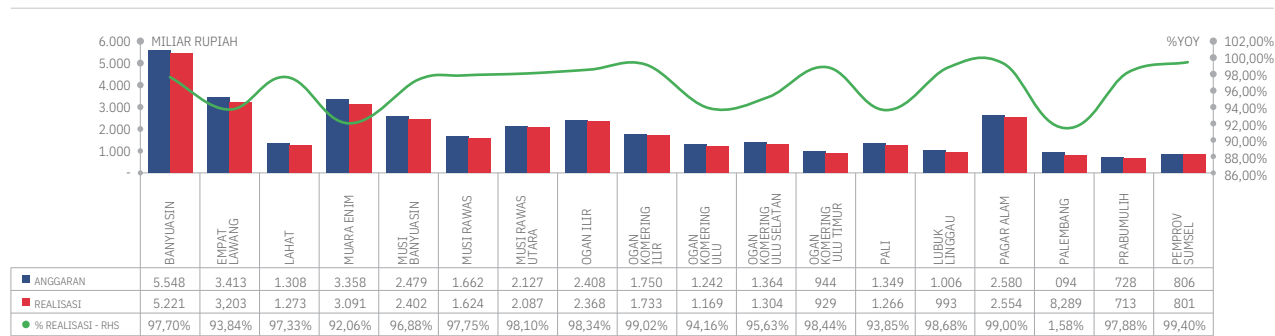
Uraian Belanja Modal	2024	2025	Perubahan (Rp Miliar)	% Perubahan	2024		2025	
	Pagu Anggaran (Rp Miliar)	Pagu Anggaran (Rp Miliar)			Realisasi s/d 31 Des (Rp Miliar)	%	Realisasi s/d 31 Des (Rp Miliar)	%
Tanah	19.640.844.000	2.462.020.000	-17.178.824.000	-87,46%	19.615.943.400	99,87%	2.046.181.275	83,11%
Peralatan dan Mesin	295.215.945.000	168.644.104.000	-126.571.841.000	-42,87%	283.240.310.006	95,94%	146.570.337.801	86,91%
Gedung dan Bangunan	527.172.694.000	606.311.933.000	79.139.239.000	15,01%	523.755.652.745	99,35%	553.536.192.813	91,30%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.203.461.045.000	752.121.002.000	-4.451.340.043.000	-85,55%	4.489.029.679.459	86,27%	651.792.118.653	86,66%
Fisik Lainnya	6.901.248.000	75.337.940.000	68.436.692.000	991,66%	6.770.733.507	98,11%	64.476.315.777	85,58%
Badan Layanan Umum (BLU)	254.054.525.000	299.408.900.000	45.354.375.000	17,85%	242.757.082.579	95,55%	236.926.413.564	79,13%
Total	6.306.446.301.000	1.904.285.899.000	-4.402.160.402.000	-69,80%	5.565.169.401.696	88,25%	1.655.347.559.883	86,93%

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2024 dan Tahun 2025

Uraian Belanja	IV 2024			IV 2025			Growth
	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	Pagu (Rp Miliar)	Realisasi (Rp Miliar)	% Realisasi	
Pegawai	5.971.406.659.000	6.001.221.949.015	100,50%	6.739.407.946.000	6.594.283.862.917	97,85%	9,88%
Barang	8.851.752.097.000	8.180.501.548.357	92,42%	6.983.794.372.000	6.217.491.455.965	89,03%	-24,00%
Modal	6.306.446.301.000	5.565.169.401.696	88,25%	1.904.285.899.000	1.655.347.559.883	86,93%	-70,26%
Bantuan Sosial	28.729.564.000	28.729.564.000	100,00%	27.992.295.000	27.992.295.000	100,00%	-2,57%
Berdasarkan Jenis Belanja	21.158.334.621.000	19.775.622.463.068	93,46%	15.655.480.512.000	14.495.115.173.765	92,59%	-26,70%

Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan, diolah

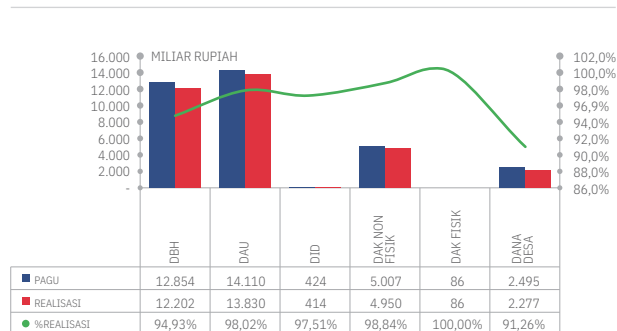
Grafik 2.9. Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 berdasarkan Wilayah

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024. Pagu TKDD dari seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp34,97 triliun, meningkat sebesar 4,43% dari pagu TKDD tahun 2024 yang sebesar Rp33,49 triliun. Pada triwulan IV 2025, realisasi TKDD Pemerintah Daerah Sumatera Selatan sebesar 96,52% dari total pagu atau senilai Rp33,76 triliun, tumbuh sebesar 2,00% (yoy) dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp33,09 triliun. Peningkatan ini ditengarai oleh peningkatan dikarenakan terjadi kenaikan pagu yang mengakibatkan kenaikan realisasi pada DBH dan DAU. Realisasi TKDD tertinggi dilakukan oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebesar 99,02% dari pagu Rp1,75 triliun, sedangkan realisasi terendah adalah Kota Palembang sebesar 91,53% dari pagu Rp904,00 miliar (Grafik 2-9).

Jika ditinjau dari jenis TKDD, sampai dengan akhir triwulan IV 2025 Dana Insentif memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 100,00% atau sebesar Rp86 miliar, kemudian disusul oleh Dana

Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan realisasi sebesar 98,84% atau setara Rp4,95 triliun, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 98,02% atau Rp13,83 triliun, DAK Fisik dengan realisasi 97,51% atau setara Rp414,00 miliar, dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar 94,93% atau senilai Rp12,02 triliun (Grafik 2-10).

Grafik 2.10. Realisasi Belanja TKDD Sumatera Selatan Triwulan IV 2025 berdasarkan Jenis

Sumber: Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, diolah



Perkembangan Inflasi Daerah



Tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan tercatat melandai pada triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh berbagai produk hortikultura.

- Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan III 2025 yang sebesar 3,44% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan IV 2025 didorong utamanya oleh tekanan harga emas perhiasan sejalan dengan meningkatnya harga emas global. Selain itu, tekanan inflasi juga didorong oleh berbagai produk hortikultura (cabai merah dan beras) akibat permintaan masyarakat yang kuat di tengah gangguan cuaca yang mengganggu pasokan di daerah sentra.
- Tekanan inflasi pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan HBKN Idul Fitri.
- Prospek inflasi IHK di tahun 2026 diperkirakan akan kembali ke dalam sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ dengan sinergi BI-TPID, digitalisasi, ketahanan pangan, dan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi konsumen di tengah dorongan konsumsi yang tetap kuat.

3.1. Inflasi Secara Umum

Inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,91% (yoy), lebih rendah dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,44%(yoy). Inflasi Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,92% Secara spasial, realisasi inflasi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 berada pada urutan keempat terendah di regional Sumatera. Terdapat 6 dari 10 provinsi di regional Sumatera mencatatkan inflasi yang di bawah sasaran inflasi nasional, yakni 2,5±1% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluarannya, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi motor utama inflasi dengan andil mencapai 1,39% (yoy), disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang memberikan kontribusi sebesar 1,07% (yoy) (Tabel 3-1).

Menurunnya tekanan inflasi pada Triwulan IV 2025 didorong oleh pelaksanaan kebijakan diskon tarif angkutan udara sebesar sekitar 14 %, yang diberlakukan untuk pembelian tiket sejak 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026 dengan periode penerbangan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026. Kebijakan ini mencakup pemberian Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat

kelas ekonomi, diskon *fuel surcharge*, pemotongan PJP2U dan PJP4U, layanan *advance* dan *extend*, perpanjangan jam operasi bandara, serta penurunan harga avtur di 37 bandara, sehingga biaya perjalanan udara menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Implementasi insentif tersebut tercatat memberikan kontribusi terhadap inflasi tarif angkutan udara pada Desember 2025 sebesar 0,02 % (mtm), serta menghasilkan deflasi 0,01 % (yoy) pada komoditas ini. **Inflasi pada triwulan laporan didorong utamanya oleh kenaikan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya**, terkonfirmasi dari tingginya permintaan masyarakat terhadap emas perhiasan. Permintaan emas perhiasan tetap kuat di Sumatera Selatan dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu budaya masyarakat yang memandang emas perhiasan sebagai instrumen investasi, simbol status sosial, dan bagian dari tradisi pada momen penting seperti pernikahan dan hajatan adat. Faktor ini menunjukkan bahwa selain dorongan musiman, preferensi budaya dan psikologis juga berperan dalam dinamika inflasi di wilayah tersebut. **Selain itu, tekanan inflasi diperkuat oleh kenaikan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau**, sejalan dengan permintaan masyarakat yang meningkat di tengah kendala produksi akibat gangguan cuaca di daerah sentra.

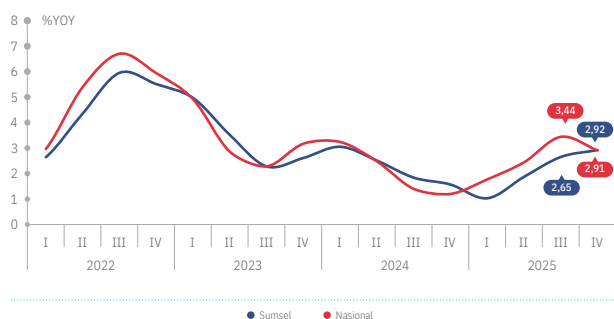
Tabel 3.1. Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	III 2025	Okt	Nov	Des	III 2025	Okt	Nov	Des
UMUM	3,44	3,49	2,91	2,91	3,44	3,49	2,91	2,91
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,11	5,72	4,18	3,50	1,85	1,71	1,26	1,07
Pakaian dan Alas Kaki	-0,07	-0,19	-0,17	-0,24	0,00	-0,01	-0,01	-0,01
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,10	0,97	0,95	1,11	0,15	0,14	0,13	0,15
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,22	0,04	0,11	0,17	0,01	0,00	0,01	0,01
Kesehatan	1,11	1,05	0,96	0,75	0,03	0,03	0,02	0,02
Transportasi	0,46	0,89	0,36	0,82	0,06	0,12	0,05	0,11
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,41	-0,43	-0,44	-0,43	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,32	1,12	1,54	1,46	0,02	0,02	0,03	0,03
Pendidikan	0,87	0,87	0,82	0,82	0,05	0,05	0,05	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,28	1,28	1,18	1,28	0,11	0,11	0,10	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,67	17,50	16,78	18,23	1,18	1,34	1,29	1,39

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Tabel 3.2. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025

Komoditas Inflasi	Andil (% , yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% , yoy)
Emas Perhiasan	1,30	Tomat	0,18
Cabai Merah	0,44	Bawang Putih	0,07
Beras	0,18	Ikan Nila	0,02
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,12	Kacang Panjang	0,02
Daging Ayam Ras	0,09	Bayam	0,02

Grafik 3.1. Perkembangan Inflasi Sumatera Selatan dan Nasional

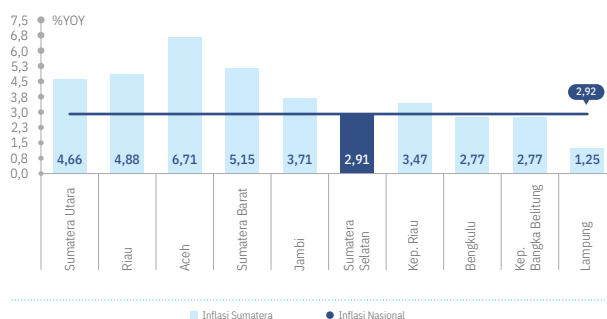
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi pada triwulan IV 2025, antara lain emas perhiasan, cabai merah, beras, bahan bakar rumah tangga, dan daging ayam ras (Tabel 3-2). Peningkatan harga emas perhiasan sesuai dengan tren kenaikan harga emas global di tengah permintaan yang terindikasi kuat. Adapun peningkatan harga cabai merah dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang mengalami penurunan produksi akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, kenaikan harga beras disebabkan oleh peningkatan permintaan beras premium di tengah stok yang menurun memasuki musim tanam. Adapun kenaikan harga daging ayam ras disebabkan oleh kenaikan biaya input produksi dan biaya pakan ternak.

Inflasi lebih lanjut ditahan oleh deflasi beberapa komoditas, diantaranya tomat, bawang putih, ikan nila, kacang panjang, dan bayam (Tabel 3-2). Deflasi pada komoditas hortikultura seperti tomat, bawang putih, kacang panjang, dan bayam terjadi seiring perbaikan pasokan dari daerah sentra dan kelancaran distribusi ke Sumatera Selatan, yang menormalkan harga di tingkat petani setelah sempat naik akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, produksi ikan nila di sentra-sentra budidaya seperti kabupaten Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, dan daerah rawa pasang surut lainnya di Sumatera Selatan relatif cukup sepanjang tahun sehingga menjelang akhir tahun stok ikan nila masih tersedia.

3.2. Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

Berdasarkan kelompok pengeluaran inflasi, tekanan pada triwulan laporan bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 18,23% (yoy), disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 3,50% (yoy), dan kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 1,46% (yoy) (Tabel 3-1). Adapun andil masing-masing kelompok tersebut terhadap inflasi sebesar 1,39% (yoy); 1,07% (yoy); dan 0,03% (yoy).

Grafik 3.2. Inflasi Provinsi di Regional Sumatera periode Triwulan IV 2025

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

3.2.1. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada triwulan IV 2025 mengalami inflasi sebesar 3,50% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,07% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,11% (yoy) dengan andil 1,71% (yoy).

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi tahunan (%yoy) tertinggi, diantaranya cabai merah sebesar 0,44%; beras sebesar 0,18%; daging ayam ras sebesar 0,09%; mie kering instant sebesar 0,08 persen; bawang merah sebesar 0,07%; ikan patin sebesar 0,07%; Sigaret Kretek Mesin(SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) masing-masing sebesar 0,05%. Sementara itu, tekanan inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh deflasi (andil %yoy) pada tomat sebesar 0,18 persen; bawang putih sebesar 0,07 persen; ikan nila, kacang panjang, bayam, dan ikan mujair masing-masing sebesar 0,02 persen; serta kangkung, sawi putih/pecay/pitsay, ayam hidup, dan ketimun masing-masing sebesar 0,01 persen.

Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah pada Triwulan IV 2025 di Sumatera Selatan terutama disebabkan oleh terbatasnya pasokan akibat cuaca yang kurang kondusif di daerah sentra produksi Sumatera. Kondisi cuaca basah pada periode laporan mengganggu proses budidaya dan panen. Selain itu, banjir yang terjadi di beberapa wilayah sentra, termasuk Ogan Ilir, merendam lahan cabai siap panen sehingga mengakibatkan gagal panen dan memperburuk penurunan pasokan. Gangguan distribusi akibat kondisi cuaca turut menambah tekanan harga. Selain itu, wilayah pemasok bawang merah seperti Sumatera Barat mengalami curah hujan tinggi dan

Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	6,11	5,72	4,18	3,50	1,85	1,71	1,26	1,07

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

banjir, sehingga pasokan ke Sumatera Selatan terganggu. Di sisi lain, permintaan kedua komoditas ini tetap tinggi karena merupakan bahan pokok rumah tangga, sehingga ketidakseimbangan antara pasokan yang turun dan permintaan yang stabil mendorong lonjakan harga. Kombinasi faktor tersebut menjadikan cabai merah dan bawang merah sebagai penyumbang inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sumatera Selatan pada Triwulan IV 2025.

Tekanan inflasi komoditas beras pada Triwulan IV 2025 dipengaruhi oleh pasokan yang menurun karena gangguan cuaca serta permintaan yang meningkat di tengah upaya stabilisasi pasokan pangan. Pasokan beras pada Desember 2025 lebih rendah sementara permintaan beras mengalami peningkatan dimana perkembangan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani tercatat sedikit meningkat dari bulan sebelumnya. Perkembangan kenaikan harga gabah yang terbatas tersebut mendukung harga beras medium dan premium di tingkat penggilingan pada Desember 2025 relatif stabil masing-masing menjadi seharga Rp13.539/kg dan Rp15.548/kg. Perkembangan pasokan dan permintaan tersebut mengakibatkan rerata harga beras pada Desember 2025 menjadi Rp15.331/kg, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.314/kg. Selanjutnya, kenaikan harga gabah di tingkat petani turut memperkuat tekanan harga. Kondisi ini mendorong masyarakat beralih ke beras premium dengan harga lebih tinggi, diperkuat oleh permintaan dari daerah sekitar Sumatera dan Jawa. Kombinasi faktor tersebut membuat beras kembali menjadi salah satu penyumbang utama inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau di Sumatera Selatan pada Triwulan IV 2025.

Tekanan inflasi daging ayam ras pada Triwulan IV 2025 di Sumatera Selatan terutama dipengaruhi oleh kenaikan biaya input produksi. Biaya input produksi untuk pakan berupa jagung pakan ternak meningkat dari bulan sebelumnya. Harga jagung pakan ternak tersebut lebih tinggi daripada batas HAP yang ditetapkan Pemerintah yaitu sebesar Rp5.800/kg. Kondisi ini meningkatkan biaya produksi ayam ras di tingkat peternak, yang kemudian mendorong kenaikan harga jual di pasar.

Tekanan inflasi pada kelompok ini ditahan oleh deflasi pada sejumlah komoditas, diantaranya pada tomat sebesar 0,18 persen; bawang putih sebesar 0,07 persen; serta kangkung, sawi putih/pecay/pitsay, ayam hidup, dan ketimun masing-masing sebesar 0,01 persen. Deflasi pada komoditas hortikultura seperti tomat, bawang putih, kacang panjang, dan bayam terjadi seiring perbaikan pasokan dari daerah sentra dan kelancaran distribusi ke Sumatera Selatan, yang menormalkan harga di tingkat petani setelah sempat naik akibat gangguan cuaca.

3.2.2. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Pada triwulan IV 2025, kelompok pakaian dan alas kaki tercatat mengalami deflasi sebesar 0,24% (yoy) dengan andil sebesar 0,01% (yoy). Tekanan deflasi pada kelompok ini tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 0,07% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,00% (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan berlanjutnya tren penurunan konsumsi masyarakat terhadap produk tekstil dan turunannya pasca HBKN Natal dan Tahun Baru.

Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok alas kaki sebesar 0,32 persen dan terendah yaitu subkelompok pakaian mengalami deflasi y-on-y sebesar 0,22 persen. Namun tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-to-y secara signifikan.

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pakaian dan Alas Kaki

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	-0,07	-0,19	-0,17	-0,24	0,00	-0,01	-0,01	-0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga mencatatkan inflasi pada triwulan IV 2025. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 1,11% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan inflasi sebesar 1,10% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,15% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada triwulan laporan, yaitu bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12% (yoy). dan kontrak rumah sebesar 0,02% (yoy). Sementara tidak ada komoditas yang memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap deflasi y-on-y.

Inflasi pada komoditas bahan bakar rumah tangga pada triwulan IV 2025 dipengaruhi kebijakan penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG ukuran 3 kg di Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut efektif per 9 Januari 2025 yang juga diiringi dengan pengetatan distribusi berdasarkan aturan baru dari Ditjen Migas, di mana penjualan LPG 3 kg hanya diperbolehkan melalui pangkalan resmi kepada pengguna akhir, yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Pembatasan tersebut menyebabkan perubahan pola distribusi di lapangan. Sebelum aturan berlaku, banyak pengecer melakukan aksi borong (*panic buying*) untuk mengamankan stok, sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat pengecer. Setelah aturan resmi berjalan, akses masyarakat terhadap LPG 3 kg menjadi lebih

terbatas karena tidak lagi bisa membeli di warung atau pengecer yang sebelumnya lebih dekat dan mudah dijangkau. Hal ini memperpanjang antrean di pangkalan resmi, menimbulkan persepsi kelangkaan, serta mendorong harga jual di atas HET pada beberapa titik distribusi.

Kondisi inilah yang membuat inflasi gas masih berlanjut hingga triwulan IV 2025. Meskipun secara formal HET sudah ditetapkan, mekanisme distribusi yang lebih ketat dan tidak meratanya akses ke pangkalan resmi menyebabkan harga riil di lapangan tetap tinggi. Di Sumatera Selatan, dampak ini terasa lebih kuat karena ketergantungan rumah tangga dan usaha mikro pada LPG 3 kg sangat besar, sehingga tekanan harga gas berkontribusi signifikan terhadap inflasi daerah hingga pertengahan tahun.

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	1,10	0,97	0,95	1,11	0,15	0,14	0,13	0,15

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.4. Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami penurunan sebesar 0,17% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok ini tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang cenderung mengalami inflasi sebesar 0,22% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,01% (yoy).

Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun sebesar 0,99% (yoy). Hal tersebut didorong oleh tren renovasi ringan dan pemutakhiran dekorasi hunian. Selain itu, terdapat eskalasi aktivitas pemeliharaan taman sebagai bagian dari persiapan menyambut periode hari raya Natal dan Tahun Baru.

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	0,22	0,04	0,11	0,17	0,01	0,00	0,01	0,01

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.5. Kelompok Kesehatan

Inflasi kelompok kesehatan pada triwulan IV 2025 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Tekanan inflasi pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,75% (yoy) dengan andil

terhadap inflasi sebesar 0,02% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 1,11% (yoy) dengan andil 0,03% (yoy). Kelompok ini pada Desember 2025 memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y sebesar 0,02%, namun tidak ada komoditas kelompok ini yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-to-y secara signifikan.

Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini antara lain normalisasi permintaan layanan kesehatan setelah periode puncak aktivitas pada triwulan sebelumnya, serta stabilisasi harga obat-obatan dan jasa medis. Selain itu, persaingan antarpenyedia layanan kesehatan dan mulai meningkatnya pemanfaatan telemedicine turut menahan kenaikan biaya layanan tatap muka. Namun demikian, inflasi tetap terjadi karena kelompok ini memiliki karakteristik harga yang relatif rigid, terutama pada jasa medis yang dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja dan bahan medis.

Tabel 3.7. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Kesehatan

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	1,11	1,05	0,96	0,75	0,03	0,03	0,02	0,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.6. Kelompok Transportasi

Pada periode triwulan IV 2025, kelompok transportasi mengalami inflasi sebesar 0,82% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,11% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,32% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,17% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi pada kelompok transportasi dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, dengan kenaikan pada sejumlah jenis BBM seperti Pertamina sebesar Rp 13.050 per liter, Pertamina Turbo sebesar Rp 14.050 per liter, Dexlite sebesar Rp 15.000 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.300 per liter, yang mulai berlaku pada 1 Desember 2025. Penyesuaian harga ini sejalan dengan kebijakan Pertamina yang mengikuti referensi harga internasional untuk BBM, yaitu Mean of Platts Singapore (MOPS),

Inflasi kelompok transportasi pada triwulan IV 2025 tetap berlanjut dengan kenaikan tarif transportasi online yang dipicu oleh penyesuaian tarif dasar *platform* untuk mengimbangi biaya operasional dan fluktuasi permintaan, sementara inflasi pelumas terjadi karena meningkatnya kebutuhan penggantian oli seiring intensitas penggunaan kendaraan dan kampanye perawatan berkala oleh bengkel resmi. Di sisi lain, terjadi deflasi tarif angkutan udara seiring dengan implementasi diskon tarif angkutan dan penurunan harga avtur.

Tabel 3.8. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transportasi

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	0,46	0,89	0,36	0,82	0,06	0,12	0,05	0,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.7. Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan di Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 mencatatkan deflasi sebesar 0,43% (yoy) dengan andil terhadap deflasi sebesar 0,02% (yoy), tidak jauh beda pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,41% (yoy) dengan andil sebesar 0,02% (yoy). Dari 4 subkelompok pada kelompok ini, 1 subkelompok mengalami deflasi y-on-y, 1 subkelompok mengalami inflasi y-on-y dan 2 subkelompok tidak mengalami perubahan. Subkelompok yang mengalami deflasi y-on-y, yaitu subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 1,71 persen.

Deflasi pada kelompok ini tercatat semakin dalam dibandingkan triwulan sebelumnya dipengaruhi tren penurunan harga peralatan komunikasi yang masih berlanjut. Kondisi ini mencerminkan berlanjutnya koreksi harga perangkat komunikasi seiring penurunan harga semikonduktor global yang menjadi komponen utama, di tengah dinamika industri teknologi yang sangat cepat (*fast moving product*). Persaingan ketat antarprodusen, khususnya melalui kanal *e-commerce* yang memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan toko fisik, semakin menekan harga jual. Selain itu, inovasi teknologi yang masif mendorong peluncuran produk baru dengan spesifikasi lebih tinggi namun harga lebih kompetitif, sehingga mempercepat depresiasi nilai produk lama.

Efisiensi rantai pasok dan skala produksi massal juga berperan dalam menurunkan biaya produksi, yang pada akhirnya menekan harga di tingkat konsumen. Di sisi lain, meskipun subkelompok jasa keuangan mencatat inflasi tipis akibat kenaikan biaya layanan tertentu, kontribusinya tidak cukup untuk mengimbangi deflasi pada peralatan komunikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan harga di kelompok ini lebih bersifat struktural, sejalan dengan transformasi digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengandalkan teknologi berbiaya rendah.

Tabel 3.9. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	-0,41	-0,43	-0,44	-0,43	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.8. Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Inflasi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 1,46% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,03%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,32% (yoy) dengan andil yang turut meningkat menjadi sebesar 0,03% (yoy). Subkelompok yang mengalami inflasi y-on-y tertinggi, yaitu subkelompok layanan kebudayaan sebesar 8,18% (yoy). Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan mobilitas dan konsumsi masyarakat terhadap produk budaya dan rekreasi seperti pementasan, museum, festival, tur budaya, dan kegiatan komunitas terutama menjelang musim HBKN Natal dan tahun baru.

Tabel 3.10. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	1,32	1,12	1,54	1,46	0,02	0,02	0,03	0,03

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.9. Kelompok Pendidikan

Pada triwulan IV 2025, kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,82% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,87% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,05% (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh efek musiman setelah periode tahun ajaran baru, di mana sebagian besar penyesuaian tarif pendidikan, termasuk biaya pendaftaran, seragam, dan buku, telah terjadi pada awal triwulan III sehingga aktivitas pengeluaran pendidikan menurun. Hal ini menyebabkan permintaan terhadap barang dan jasa pendidikan relatif stabil pada bulan Desember. Untuk pendidikan tinggi, Kemendikbudristek menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan mendorong revisi tarif UKT serta penghapusan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di sejumlah PTN.

Andil tekanan inflasi di kelompok pendidikan bersumber dari komoditas sekolah menengah atas (SMA) sebesar 0,02% dan sekolah dasar (SD) sebesar 0,01%. Inflasi pada biaya pendidikan SMA dipengaruhi oleh struktur biaya yang lebih tinggi serta beberapa tambahan program untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Sementara itu, biaya pendidikan SD merupakan fondasi pendidikan awal yang wajib diikuti oleh seluruh anak, sehingga permintaan terhadap layanan dan perlengkapan sekolah tetap tinggi.

Tabel 3.11. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Pendidikan

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	0,87	0,87	0,82	0,82	0,05	0,05	0,05	0,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.10. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Inflasi kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 1,28% (yoy), terpantau stabil dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,28% (yoy) dengan andil yang relatif stabil sebesar 0,11% (yoy).

Komoditas utama yang menyumbang andil inflasi tahunan (%) pada kelompok ini, yaitu ayam goreng sebesar 0,03%. Ayam goreng sebagai salah satu menu favorit cepat saji, tidak hanya diminati oleh konsumen individu tetapi juga menjadi pilihan utama dalam bisnis catering untuk memenuhi kebutuhan acara keluarga maupun wisata, terlebih saat periode HBKN Natal dan tahun baru. Tren gaya hidup yang semakin mengedepankan makanan praktis dan makan di luar rumah, baik untuk keperluan harian maupun rekreasi, turut memperkuat tekanan harga. Selain faktor permintaan, penyesuaian harga bahan baku seperti ayam ras dan tepung terigu juga mendorong kenaikan harga jual di restoran, kafe, dan layanan catering. Sehingga mempertegas pengaruh kombinasi konsumsi domestik dan wisata terhadap inflasi kelompok ini.

Tabel 3.12. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	1,28	1,28	1,18	1,28	0,11	0,11	0,10	0,11

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

3.2.11. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya pada triwulan IV 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 18,23% (yoy) dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,39% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan sebelumnya sebesar 15,67% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,18% (yoy). Tekanan inflasi yang masih tinggi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan yang menyumbang andil sebesar 1,30% (yoy), lalu disusul oleh pasta gigi dan sikat gigi dengan andil masing-masing sebesar 0,02% (yoy). *Hand body lotion* dan popok bayi sekali pakai masing-masing sebesar 0,01% (yoy).

Peningkatan tekanan harga pada emas perhiasan sejalan dengan prospek eksternal yang masih dibayangi dengan berbagai sentimen negatif yang mendorong permintaan akan safe haven assets. Harga emas global pada triwulan laporan tercatat naik sebesar 24% (qtoq) menjadi USD5205/oz dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD4197/oz. Selain itu, emas perhiasan memiliki peran penting dalam upacara adat, pernikahan, dan pemberian hadiah sebagai simbol status sosial dan keberuntungan. Tradisi ini membuat masyarakat cenderung membeli emas dengan kadar

Tabel 3.13. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

Komoditas	Inflasi (yoy, %)				Andil (yoy, %)			
	Sep	Okt	Nov	Des	Sep	Okt	Nov	Des
Inflasi Kelompok	15,67	17,50	16,78	18,23	1,18	1,34	1,29	1,39

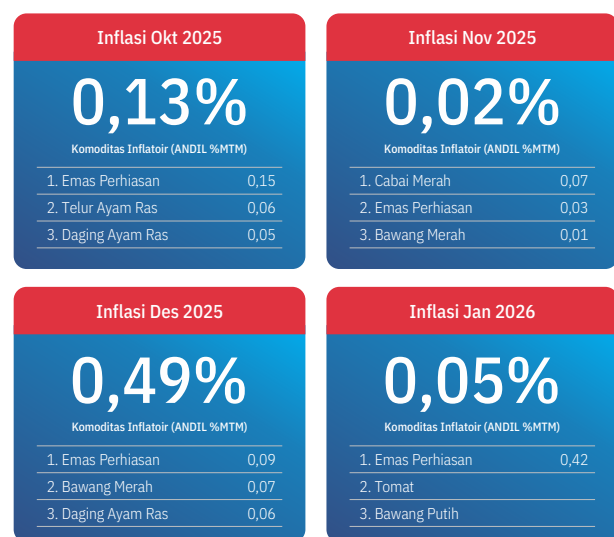
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

tinggi dan desain tradisional, yang harganya relatif lebih mahal. Emas juga merupakan alternatif diversifikasi penempatan dana, sehingga dapat menjadi pilihan investasi yang menarik di tengah ketidakpastian pasar. Selain itu, terdapat tren kenaikan literasi keuangan di masyarakat, yang semakin mendorong pemahaman akan pentingnya diversifikasi investasi termasuk emas.

Di sisi lain, tekanan harga pasta gigi dan sikat tercatat meningkat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, fluktuasi harga bahan baku seperti fluorida, sorbitol, dan bahan kimia aktif lainnya di pasar global memicu produsen untuk menyesuaikan harga jual demi menjaga margin keuntungan. Kedua, biaya distribusi dan logistik meningkat, terutama akibat penyesuaian tarif transportasi dan energi, yang berdampak langsung pada harga akhir produk di tingkat konsumen. Ketiga, produsen juga menyesuaikan harga seiring peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk perawatan pribadi, terutama di tengah meningkatnya kesadaran akan kebersihan gigi dan kesehatan mulut. Terakhir, terdapat tren peralihan ke merek lokal atau membeli dalam jumlah besar untuk menghemat biaya sehingga menunjukkan adanya perubahan perilaku belanja akibat tekanan harga ini.

3.3. Perkembangan Inflasi Bulanan dan Tracking Inflasi Triwulan I 2026

Gambar 1. Perkembangan Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan



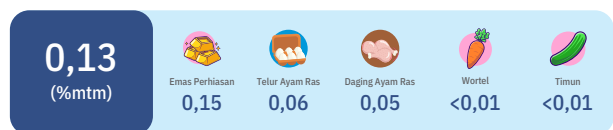
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi pada Oktober 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Oktober mencatatkan inflasi sebesar 0,13% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,27% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 2,95% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,25% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Oktober 2025 mencatatkan inflasi sebesar 3,49% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,44% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 2,38% (ytd) dan berada pada batas tengah kisaran target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat meningkat menjadi sebesar 2,86% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,65% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l emas perhiasan (0,15%), telur ayam ras (0,06%), daging ayam ras (0,05%), wortel (<0,01%), dan ketimun (<0,01%). Harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian ekonomi global di tengah permintaan yang tetap kuat dari masyarakat, untuk mahar dan *safe haven asset*. Selanjutnya, peningkatan harga daging ayam ras dan telur ayam ras disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat. Selain itu, tekanan inflasi pada komoditas wortel dan ketimun dipengaruhi oleh kendala sisi *supply* akibat tingginya curah hujan di sepanjang bulan laporan.

Gambar 3.2. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Oktober 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

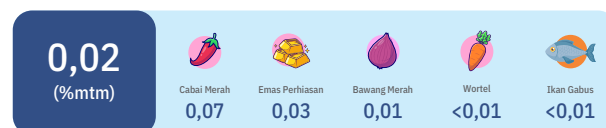
Tekanan inflasi lebih lanjut pada bulan laporan ditahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,30% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,10% (mtm). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi bulanan, antara lain tomat, cabai rawit, bawang merah, dan cabai merah. Komoditas dimaksud tercatat menjadi penyumbang inflasi di bulan sebelumnya. Telah dilakukan berbagai langkah pengendalian harga oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan untuk menjaga tekanan inflasi komoditas pangan bergejolak. Meski demikian, tingginya permintaan masyarakat untuk komoditas telur dan daging ayam ras di tengah terbatasnya bibit ayam dan peningkatan harga pakan jagung mendorong tekanan harga komoditas dimaksud pada bulan laporan dengan andil masing-masing sebesar 0,06% (mtm) dan 0,05% (mtm). Diperlukan diversifikasi sumber protein di masyarakat agar mengutamakan sumber pangan lokal yang melimpah, terutama aneka ikan.

Inflasi pada November 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November mencatatkan inflasi sebesar 0,02% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi sebesar 0,13% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya yang tercatat sebesar 0,32% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,03% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK November 2025 mencatatkan inflasi sebesar 2,91% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,49% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 2,40% (ytd) dan berada pada kisaran target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan tersebut berbanding terbalik dengan inflasi nasional yang tercatat menurun menjadi sebesar 2,72% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,86% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) antara lain; cabai merah (0,07%); emas perhiasan (0,03%); dan bawang merah (0,01%). Peningkatan harga cabai merah dan bawang merah sejalan dengan terbatasnya pasokan dari daerah sentra yang mengalami penurunan produksi akibat gangguan cuaca. Selanjutnya, harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian geopolitik.

Gambar 3.3. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada November 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi yang lebih dalam pada bulan November 2025 ditahan oleh deflasi kelompok Transportasi sebesar 0,12% (mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,0% (mtm). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi bulanan, yaitu tarif angkutan udara sebesar 0,02% (mtm). Secara tahunan, kelompok ini mencatatkan inflasi cukup tinggi sebesar 14,1% (yoy) dengan andil sebesar 0,05% (yoy) disumbang oleh tarif kendaraan roda empat *online* dengan andil sebesar 0,02% (yoy).

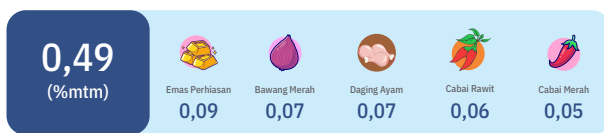
Inflasi pada bulan Desember 2025

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Desember mencatatkan inflasi sebesar 0,49% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,02% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya yang tercatat sebesar 1,11% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,10% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Desember 2025 mencatatkan inflasi sebesar 2,91% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,91%

(yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2025 tercatat sebesar 2,91% (ytd) dan berada pada kisaran target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat meningkat menjadi sebesar 2,92% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,72% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l emas perhiasan (0,09%), bawang merah (0,07%), daging ayam ras (0,06%), cabai rawit (0,06%), dan cabai merah (0,05%). Peningkatan harga emas perhiasan didorong oleh ketidakpastian geopolitik. Selanjutnya, curah hujan tinggi mengganggu produksi bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah di daerah sentra di tengah *demand pull* dari daerah terdampak bencana sehingga menyebabkan adanya kenaikan harga pada komoditas tersebut. Kemudian, tingginya permintaan masyarakat untuk komoditas daging ayam ras di tengah terbatasnya bibit ayam dan peningkatan harga pakan jagung mendorong tekanan harga komoditas daging ayam ras menjadi lebih tinggi. Diperlukan diversifikasi sumber protein di masyarakat agar mengutamakan sumber pangan lokal yang melimpah, terutama aneka ikan.

Gambar 3.4. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Desember 2025



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Inflasi yang lebih dalam pada bulan Desember 2025 ditahan oleh deflasi kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 0,08% (mtm) dengan andil deflasi sebesar (tidak disebutkan di dalam BRS). Bulan Desember sering menjadi masa transisi menuju tahun baru sehingga banyak gerai pakaian dan alas kaki menawarkan diskon ataupun cuci gudang untuk menghabiskan stok lama.

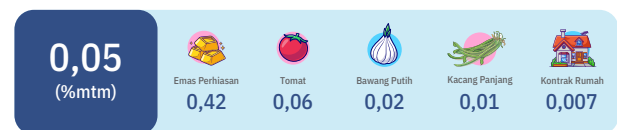
Inflasi Berlanjut pada Januari 2026

Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari mencatatkan inflasi sebesar 0,05% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,49% (mtm). Tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 4,81% (mtm) dengan andil inflasi sebesar 0,42% (mtm). Dengan perkembangan tersebut, secara tahunan, IHK Januari 2026 mencatatkan inflasi sebesar 3,33% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,91% (yoy). Sementara itu, laju inflasi Sumatera Selatan selama 2026 tercatat sebesar 0,05% (ytd) dan berada pada batas tengah kisaran target inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan tersebut

sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat meningkat menjadi sebesar 3,55% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy).

Komoditas utama penyumbang inflasi (andil mtm) a.l emas perhiasan (0,42%), tomat (tidak disebutkan pada BRS), bawang putih (0,05%), dan kacang panjang (tidak disebutkan pada BRS). Harga emas perhiasan masih melanjutkan tren kenaikan didorong oleh ketidakpastian ekonomi global di tengah permintaan yang tetap kuat dari masyarakat. Selanjutnya, peningkatan harga tomat disebabkan oleh tingginya curah hujan di sepanjang bulan laporan dan beberapa daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Gambar 3.5. Komoditas Penyumbang Andil Inflasi/Deflasi Umum Terbesar pada Januari 2026



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan (SBH 2022=100), diolah

Tekanan inflasi lebih lanjut pada bulan laporan ditahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,14% (mtm) dan tidak memberikan andil/sumbangan signifikan terhadap inflasi (mtm). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang deflasi bulanan, antara lain cabai merah, bawang merah, bensin, tarif kendaraan roda dua online, dan telur ayam ras.

Inflasi Triwulan I 2026 Diperkirakan Meningkat

Dengan perkembangan inflasi di bulan Januari 2026 dan perkembangan harga komoditas sampai dengan Februari 2026, tekanan inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I 2026 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan inflasi didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat pada periode Ramadan dan HBKN Idul Fitri yang mendorong tekanan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Tekanan inflasi juga didorong oleh berkurangnya kuota LPG 3 kg untuk Sumatera Selatan pada tahun 2026 sebesar 11.831 MT sehingga berpotensi meningkatkan tekanan harga di tingkat pengecer, terutama jika distribusi tidak optimal. Dari sisi inflasi inti, emas perhiasan kerap muncul sebagai penyumbang inflasi, terutama menjelang HBKN Idul Fitri dan beberapa bulan setelahnya untuk keperluan aksesoris dan instrumen investasi. Harga emas global tercatat meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan peningkatan dampak rambatan dari perang tarif.

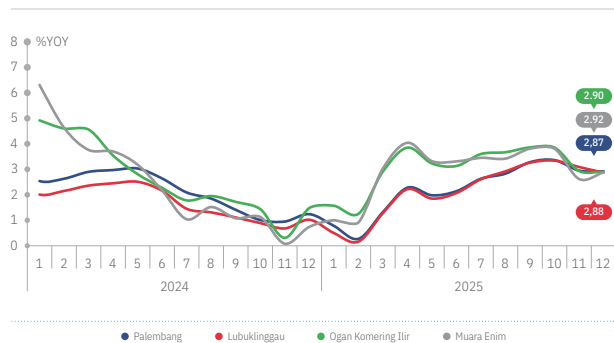
3.4. Analisis Inflasi Spasial

Perhitungan indeks harga konsumen (IHK) provinsi Sumatera Selatan per Januari 2024 telah menggunakan penambahan 2 kabupaten baru, yaitu Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kab. Muara Enim. Di samping itu, pengukuran inflasi juga telah menggunakan tahun dasar baru berdasarkan Survei Biaya Hidup yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 untuk mengakomodasi perubahan pola konsumsi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Sebagaimana dirilis dalam Berita Resmi Statistik Inflasi Bulanan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 425 komoditas yang disurvei dalam SBH 2022 untuk perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Paket komoditas terbanyak ada di Kota Palembang sebanyak 393 barang dan jasa, sementara jumlah paket komoditas paling sedikit sebanyak 177 komoditas adalah Kabupaten Muara Enim yang merupakan kabupaten baru.

Berdasarkan Grafik 3-3 di atas, tingkat inflasi tahunan seluruh kabupaten/kota menunjukkan pergerakan yang searah. Tekanan inflasi tercatat mengalami tren meningkat sejak Maret 2025 sampai dengan Oktober 2025 dan mengalami kontraksi pada triwulan akhir 2025. Dari empat kab/kota sampel perhitungan IHK, 1 diantaranya mencatatkan inflasi tahunan yang di atas level inflasi provinsi Sumatera Selatan yang sebesar 2,91% (yoy) dan mencatatkan inflasi di atas sasaran inflasi nasional ($2,5 \pm 1\%$), yaitu Kota Palembang sebesar 2,92% (yoy).

Grafik 3.3. Perkembangan Inflasi Kota Sampel Perhitungan Inflasi



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

3.4.1. Kota Palembang

Pada triwulan IV 2025, inflasi Kota Palembang tercatat sebesar 2,92% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,28% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memberikan andil tertinggi pada inflasi Kota Palembang, dengan inflasi sebesar 17,40% (yoy) dan andil 1,33% (yoy). Komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar pada kelompok ini dengan andil 1,23% (yoy) mengikuti perkembangan harga emas global. Selain faktor

global, dimensi budaya dan sosial memainkan peran penting dalam tingginya permintaan emas perhiasan di Palembang. Emas perhiasan menjadi simbol status dan tradisi bagi masyarakat. Dalam budaya lokal, emas sering menjadi bagian dari prosesi pernikahan, acara adat, dan momen perayaan, sehingga permintaan tetap kuat meskipun harga naik.

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi Kota Palembang, yang mencatatkan inflasi sebesar 4,25% (yoy) dengan andil 0,12% (yoy), turun signifikan dibandingkan triwulan III yang sebesar 1,64% (yoy) dengan andil 1,64% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain cabai merah sebesar 0,34%, beras 0,15%, ikan patin 0,09%, daging ayam ras 0,08%, dan mie kering instant sebesar 0,06%.

Di sisi lain, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga juga tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi ketiga sebesar 0,85% (yoy) dengan andil 0,14% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,79% (yoy) dengan andil 0,13% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,10% (yoy) dan kontrak rumah sebesar 0,03% (yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga umumnya disebabkan oleh penyesuaian harga LPG non-subsidi yang mengikuti tren harga internasional dan kebijakan distribusi domestik. Sementara itu, inflasi pada komoditas kontrak rumah terjadi karena penyesuaian tarif sewa oleh pemilik properti sejalan dengan meningkatnya permintaan hunian di perkotaan, terutama di Palembang sebagai pusat aktivitas ekonomi.

Kelompok Transportasi juga menyumbang inflasi tertinggi sebesar 0,98% (yoy) dengan andil inflasi yang sama dengan kelompok tertinggi ketiga sebesar 0,14% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,69% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 0,10% (yoy). Kenaikan harga pada kelompok ini disumbang oleh bensin sebesar 0,04%, tarif kendaraan roda 4 online 0,03%, sepeda motor, pelumas/oli mesin, dan tarif kendaraan roda 2 online masing-masing sebesar 0,02%.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Palembang pada triwulan laporan adalah emas perhiasan (1,23%), cabai merah (0,34%), beras (0,15%), bahan bakar rumah tangga (0,14), dan ikan patin (0,09%). Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi ditahan oleh lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan, diantaranya tomat (0,08%), bayam (0,03%), bawang putih (0,03%), ikan mujair (0,02%), dan ikan nila (0,02%).

Tabel 3.14. Inflasi Kota Palembang Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	III 2025	Okt	Nov	Des	III 2025	Okt	Nov	Des
UMUM	3,28	3,36	2,95	2,92	3,28	3,36	2,95	2,92
Makanan, Minuman dan Tembakau	6,42	6,09	5,16	4,25	1,64	1,56	1,32	1,12
Pakaian dan Alas Kaki	0,53	0,35	0,17	0,06	0,03	0,02	0,01	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,79	0,79	0,80	0,85	0,13	0,13	0,13	0,14
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,10	-0,17	-0,06	0,10	0,01	-0,01	0,00	0,01
Kesehatan	1,31	1,22	1,09	0,82	0,03	0,03	0,03	0,02
Transportasi	0,69	1,14	0,45	0,98	0,10	0,17	0,07	0,14
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,53	-0,53	-0,53	-0,51	-0,04	-0,03	-0,04	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,88	0,59	1,13	0,95	0,02	0,01	0,02	0,02
Pendidikan	0,82	0,82	0,77	0,77	0,06	0,06	0,05	0,05
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,32	1,32	1,27	1,42	0,11	0,11	0,11	0,12
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,71	17,14	16,18	17,40	1,19	1,31	1,25	1,33

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

Tabel 3.15. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kota Palembang

Komoditas Inflasi	Andil (%, yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (%, yoy)
Emas Perhiasan	1,23	Tomat	0,08
Cabai Merah	0,34	Bayam	0,03
Beras	0,15	Bawang Putih	0,03
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,14	Ikan Mujair	0,02
Ikan Patin	0,09	Ikan Nila	0,03

Sumber: BPS Kota Palembang (SBH 2022=100), diolah

3.4.2. Kota Lubuklinggau

Pada triwulan IV 2025, inflasi Kota Lubuklinggau tercatat sebesar 2,87% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,26% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama bersumber dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mencatat inflasi sebesar 15,84% (yoy) dengan andil 1,22% (yoy), naik signifikan dibandingkan triwulan III yang sebesar 12,96% (yoy) dengan andil 0,96% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain emas perhiasan (1,06%), sabun mandi (0,02), pasta gigi (0,02%), dan tarif gunting rambut anak (0,02%). Komoditas emas perhiasan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap pembentukan inflasi di kelompok ini dengan andil (1,06%) (yoy). Kenaikan harga emas perhiasan di Lubuklinggau dipengaruhi oleh tren harga emas global yang cenderung meningkat serta permintaan masyarakat yang tetap kuat meskipun terdapat fluktuasi harga di pasar internasional. Namun, intensitas kenaikan harga di Lubuklinggau relatif lebih moderat dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Palembang, karena bobot konsumsi dan aktivitas perdagangan emas di Lubuklinggau tidak sebesar di Palembang, sehingga dampaknya terhadap inflasi kelompok ini bersifat lebih terbatas.

Selanjutnya, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil tertinggi kedua terhadap inflasi Kota Lubuklinggau, dengan inflasi sebesar 3,05% (yoy) dan andil 0,92% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 5,40% (yoy) dengan andil 1,62% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada kelompok ini antara lain cabai merah (0,30%), beras (0,09%), telur ayam ras (0,08%), daging ayam ras (0,07%), dan sigaret kretek mesin (SKM) (0,07%).

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi penyumbang andil tertinggi ketiga dengan inflasi sebesar 1,41% (yoy) dan andil 0,21% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 1,47% (yoy) dengan andil 0,22% (yoy). Berlanjutnya tekanan harga pada kelompok ini terutama dipengaruhi oleh komoditas bahan bakar rumah tangga (andil: 0,13% yoy), sewa rumah (andil: 0,03% yoy), dan keramik (andil: 0,02% yoy). Kenaikan harga bahan bakar rumah tangga terjadi akibat penyesuaian harga LPG non-subsidi dan meningkatnya permintaan untuk kebutuhan rumah tangga serta usaha kecil. Sementara itu, inflasi kontrak rumah dipicu oleh penyesuaian tarif sewa tahunan yang

Tabel 3.16. Inflasi Kota Lubuklinggau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	III 2025	Okt	Nov	Des	III 2025	Okt	Nov	Des
UMUM	3,26	3,34	3,09	2,87	3,26	3,34	3,09	2,87
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,40	4,65	3,80	3,05	1,62	1,41	1,15	0,92
Pakaian dan Alas Kaki	0,82	0,88	1,03	1,06	0,05	0,05	0,06	0,06
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	1,47	1,44	1,36	1,41	0,22	0,21	0,20	0,21
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,82	2,01	2,02	1,84	0,14	0,15	0,15	0,14
Kesehatan	1,92	1,79	1,90	1,88	0,05	0,05	0,05	0,05
Transportasi	0,05	0,50	0,63	0,50	0,01	0,06	0,08	0,06
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,54	-0,47	-0,53	-0,51	-0,03	-0,02	-0,02	-0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	2,42	2,46	2,49	2,51	0,05	0,05	0,05	0,05
Pendidikan	1,51	1,51	1,51	1,51	0,08	0,08	0,08	0,08
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,41	1,58	1,33	1,41	0,11	0,12	0,10	0,11
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	12,69	14,11	15,34	15,84	0,96	1,18	1,19	1,22

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

Tabel 3.17. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kota Lubuklinggau

Komoditas Inflasi	Andil (%, yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (%, yoy)
Emas Perhiasan	1,06	Angkutan Udara	0,09
Cabai Merah	0,30	Tomat	0,09
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,13	Bawang Putih	0,09
Beras	0,09	Ikan Nila	0,07
Telur Ayam Ras	0,08	Sawi Putih/Pecay/Pitsai	0,02

Sumber: BPS Kota Lubuklinggau (SBH 2022=100), diolah

didorong oleh tingginya permintaan hunian di perkotaan dan kenaikan biaya pemeliharaan. Selain itu, komoditas keramik juga memberikan kontribusi inflasi karena adanya penyesuaian harga material bangunan yang mengikuti tren kenaikan biaya produksi dan distribusi, terutama di tengah meningkatnya aktivitas renovasi dan pembangunan rumah pada periode laporan.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan di Kota Lubuklinggau pada triwulan laporan adalah emas perhiasan (1,06%), cabai merah (0,30%), bahan bakar rumah tangga (0,21%), beras (0,09%), dan telur ayam ras (0,08%). Sementara itu, lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah angkutan udara (0,09%), tomat (0,09%), bawang putih (0,09%), ikan nila (0,07%), dan sawi putih (0,02%).

3.4.3. Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)

Inflasi Kab. OKI pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,90% (yoy), menurun dibandingkan Triwulan III yang sebesar 3,86% (yoy). Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh adalah Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, yang tercatat sebesar 19,38% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,39% (yoy), naik dibandingkan Triwulan III yang

sebesar 17,39% (yoy) dengan andil 1,24% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini tetap emas perhiasan, dengan andil sebesar 1,26% (yoy), mengikuti tren kenaikan harga emas global dan permintaan masyarakat yang tetap kuat. Masyarakat pedesaan di OKI cenderung membeli emas perhiasan sebagai bentuk tabungan yang mudah dicairkan ketika menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, atau acara adat, karena emas merupakan aset yang nilai dan likuiditasnya relatif terjaga serta bisa diperjualbelikan dengan cepat jika diperlukan. Perilaku ini mencerminkan peran emas perhiasan sebagai instrumen penyimpan nilai dan cadangan kekayaan yang praktis. Berbeda dengan masyarakat di kota besar yang sebagian menjadikan emas sebagai simbol status sosial atau gaya hidup, di OKI emas lebih dipandang sebagai aset aman untuk menjaga nilai kekayaan.

Kelompok dengan andil tertinggi kedua adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang tercatat sebesar 2,63% (yoy) dengan andil tahunan sebesar 1,11% (yoy), naik signifikan dibandingkan Triwulan III yang sebesar 4,99% (yoy) dengan

Tabel 3.18. Inflasi Kab. OKI Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	III 2025	Okt	Nov	Des	III 2025	Okt	Nov	Des
UMUM	3,86	3,85	2,93	2,90	3,86	3,85	2,93	2,90
Makanan, Minuman dan Tembakau	5,17	5,21	3,02	2,63	2,15	2,14	1,26	1,11
Pakaian dan Alas Kaki	-2,6	-2,72	-1,93	-2,02	-0,15	-0,16	-0,11	-0,12
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	4,22	2,66	2,52	2,87	0,37	0,24	0,22	0,25
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,06	0,16	0,16	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
Kesehatan	-0,09	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportasi	-0,21	0,17	0,07	0,31	-0,02	0,02	0,01	0,03
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,06	-0,05	-0,05	-0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	3,57	3,38	3,88	3,64	0,06	0,06	0,06	0,06
Pendidikan	1,42	1,42	1,42	1,42	0,03	0,03	0,03	0,03
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,88	1,88	1,49	1,58	0,18	0,18	0,15	0,15
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	17,39	10,46	17,5	19,38	1,24	1,33	1,30	1,39

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

Tabel 3.19. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kab. OKI

Komoditas Inflasi	Andil (% yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (% yoy)
Emas Perhiasan	1,26	Tomat	0,24
Cabai Merah	0,47	Cabai Rawit	0,17
Beras	0,31	Bawang Putih	0,14
Bahan Bakar Rumah Tangga	0,27	Kacang Panjang	0,08
Sigaret Kretek Tangan (SKT)	0,19	Ayam Hidup	0,07

Sumber: BPS Kab. OKI (SBH 2022=100), diolah

andil 2,15% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini adalah cabai merah (0,47%), beras (0,31%), sigaret kretek tangan (SKT) (0,19%), mie kering instant (0,18), dan sigaret kretek mesin (SKM) (0,17%).

Selanjutnya, kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi, dengan inflasi sebesar 2,87% (yoy) dan andil tahunan sebesar 0,25% (yoy), menurun drastis dibandingkan Triwulan III yang sebesar 4,22% (yoy) dengan andil 0,37% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini (andil % yoy) adalah bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27%, dan sewa rumah sebesar 0,001%.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan (% yoy) di Kab. OKI pada Triwulan IV adalah emas perhiasan (1,26%), cabai merah (0,47%), beras (0,31%), bahan bakar rumah tangga (0,27%), dan sigaret kretek tangan (SKT) (0,19%). Sedangkan lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah tomat (0,24%), cabai rawit (0,17%), bawang putih (0,14%), kacang panjang (0,08%), dan ayam hidup (0,07%).

3.4.4. Kabupaten Muara Enim

Inflasi Kab. Muara Enim pada Triwulan IV 2025 tercatat sebesar 2,88% (yoy), meningkat dibandingkan Triwulan III yang sebesar 3,81% (yoy). Tekanan inflasi pada periode ini didominasi oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang tercatat sebesar 22,06% (yoy) dengan andil inflasi sebesar 1,77% (yoy), sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 15,70% (yoy) dengan andil 1,23% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini tetap emas perhiasan dengan andil sebesar 1,77% (yoy) mengikuti tren kenaikan harga emas global dan permintaan masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen tabungan.

Kelompok dengan andil inflasi tertinggi kedua di Kab. Muara Enim adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, yang mencatat inflasi 2,25% (yoy) dengan andil tahunan 0,93% (yoy), turun signifikan dari Triwulan III yang sebesar 4,79% (yoy) dengan andil 1,93% (yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi tahunan di kelompok ini adalah cabai merah (0,94%), bawang merah (0,19%), daging ayam ras (0,19%), beras (0,19%) dan cabai rawit (0,09%), mencerminkan tekanan harga pangan akibat gangguan pasokan dan pola musiman.

Tabel 3.20. Inflasi Kab. Muara Enim Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	Inflasi Tahunan 2025 (%)				Andil Inflasi Tahunan (%)			
	III 2025	Okt	Nov	Des	III 2025	Okt	Nov	Des
UMUM	3,31	3,81	2,62	2,88	3,31	3,81	2,62	2,88
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,79	5,47	2,55	2,25	1,93	2,20	1,04	0,93
Pakaian dan Alas Kaki	0,83	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,56	0,41	0,24	1,19	0,05	0,04	0,02	0,11
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,33	-0,11	-0,21	-0,16	0,02	-0,01	-0,01	-0,01
Kesehatan	0,58	0,86	0,84	0,84	0,01	0,02	0,02	0,02
Transportasi	-0,23	0,03	0,05	0,40	-0,02	0,00	0,01	0,04
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-0,26	-0,32	-0,34	-0,33	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	1,06	0,59	0,59	1,00	0,02	0,01	0,01	0,02
Pendidikan	0,59	0,42	0,42	0,42	0,02	0,01	0,01	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,22	0,16	0,16	0,16	0,02	0,01	0,01	0,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	15,70	19,13	18,91	22,06	1,23	1,55	1,53	1,77

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Tabel 3.21. Komoditas Utama Penyumbang Inflasi dan Deflasi Triwulan IV 2025 Kab. Muara Enim

Komoditas Inflasi	Andil (%, yoy)	Komoditas Deflasi	Andil (%, yoy)
Cabai Merah	0,94	Tomat	0,63
Beras	0,19	Bawang Putih	0,18
Mie Kering Instan	0,04	Ikan Patin	0,05
Daging Ayam Ras	0,19	Ikan Nila	0,04
Ikan Sarden Segar	0,03	Kol Putih/Kubis	0,03

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Selanjutnya, kelompok Kesehatan memberikan andil tertinggi ketiga terhadap inflasi, dengan inflasi 0,84% (yoy) dan andil tahunan 0,02% (yoy), menurun tipis dibandingkan triwulan III yang sebesar 0,86% (yoy) dengan andil 0,02% (yoy). Tekanan harga di kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas vitamin dengan andil sebesar 0,01% (yoy). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi vitamin sebagai suplemen kesehatan semakin menjadi bagian dari pola belanja rumah tangga, terutama di wilayah pedesaan yang mulai mengadopsi gaya hidup lebih sehat serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan pasca-pandemi dan kebutuhan pencegahan penyakit musiman.

Secara keseluruhan, lima komoditas penyumbang inflasi tahunan (% yoy) di Kab. Muara Enim pada triwulan IV adalah cabai merah (0,94%), beras (0,19%), mie kering instant (0,04%), daging ayam ras (0,19%), dan ikan sarden segar (0,03%). Sedangkan lima komoditas utama penyumbang deflasi tahunan adalah tomat (0,63%), bawang putih (0,18%), ikan nila (0,04%), ikan patin (0,05%), dan kol putih/kubis (0,03%).

3.5. Upaya Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Daerah Kab/Kota se-Sumatera Selatan terus melaksanakan berbagai upaya pengendalian inflasi daerah dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian Inflasi 4K³. Upaya yang telah dilakukan sepanjang periode laporan, diantaranya sebagai berikut:

Pilar Pengendalian Inflasi	Upaya Yang Dilakukan
Keterjangkauan Harga	1. Pelaksanaan 542 OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP se-Sumatera Selatan sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah pelaksanaan Pasar Murah Provinsi Sumatera Selatan yang turut bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2025; 2. Penjualan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau melalui 1.003 Rumah Pangan Kita (RPK) yang bekerja sama dengan Bulog; 3. Pemasangan spanduk MinyaKita dan HET di berbagai titik dan distributor
Ketersediaan Pasokan	1. Monitoring rutin dan sidak pasar, produsen, dan distributor untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok; 2. Pelaksanaan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 yang terdiri atas GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala) untuk 1.020 rumah tangga dan 17 KWT se-Sumatera Selatan dengan komoditas bawang merah dan cabai, GSMP Panti Sosial untuk 10 panti sosial di Sumatera Selatan dengan komoditas hortikultura, perikanan, dan peternakan (ayam), serta GSMP Goes to Office untuk seluruh pemerintah daerah se-Sumatera Selatan dengan fokus komoditas rimpang. 3. Bantuan sarana prasarana pertanian antara lain mesin bed dryer padi, bangunan bed dryer, serta alat fertigasi kepada kelompok tani dan pondok pesantren di Sumatera Selatan.
Kelancaran Distribusi	1. Pemberian subsidi harga, subsidi angkutan (termasuk melalui Fasilitas Distribusi Pangan/FDP), dan subsidi operasional lainnya untuk mendukung pelaksanaan OPM di seluruh wilayah Sumatera Selatan 2. Penandatanganan 33 MoU/PKS KAD antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kab. Muara Enim, dan Pemerintah Kab. Musi Rawas dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat, Pemerintah Kab. Tanah Datar, dan Pemerintah Kab. Solok untuk berbagai komoditas, antara lain bawang merah, cabai, beras, dan perikanan.
Komunikasi Efektif	1. Rilis infografis dan siaran pers inflasi secara berkala; 2. Publikasi informasi jadwal OPM/GPM serta jaringan penyalur SPHP melalui media sosial dan kanal informasi lainnya; 3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) rutin TPID setiap awal minggu; 4. High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan dalam rangka HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan; 5. <i>Capacity building</i> dan rapat koordinasi mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026; 6. <i>Capacity building</i> dan studi banding TPID Sumatera Selatan ke TPID Kepulauan Riau; 7. Rapat Koordinasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) TPID Sumatera Selatan bersama KPPG Sumatera Selatan mengenai implementasi MBG di Sumatera Selatan.

Sumber: Rekap Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Selatan

Evaluasi program pengendalian inflasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala, tantangan, serta langkah penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan IV 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

A. Keterjangkauan harga

Hingga Triwulan IV 2025, pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)/Gerakan Pangan Murah (GPM)/Pasar Murah tercatat sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) kali, menurun apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 yang mencapai 560 kali. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh efisiensi anggaran pemerintah daerah pada awal tahun yang menyebabkan keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk melaksanakan OPM/GPM.

Selain melalui OPM/GPM/Pasar Murah/SPHP, TPID Sumatera Selatan selalu memastikan keterjangkauan harga komoditas melalui 1.003 Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di Palembang, Lubuk Linggau, Lahat, dan OKU. RPK yang merupakan mitra Bulog ini memperoleh pasokan komoditas langsung dari Bulog dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu, distribusi pangan dengan harga terjangkau juga didukung melalui Toko KePo (Kebutuhan Pokok) milik Dinas Ketahanan Pangan & Peternakan Prov. Sumatera Selatan, Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya, serta OKI-Mart dan OKI-Jek milik Pemerintah Daerah Kab. OKI dan BUMD Bande Seguguk.

Kombinasi intervensi melalui OPM/GPM/Pasar Murah, RPK Bulog, dan jaringan lainnya, terbukti mampu menekan laju kenaikan harga sejumlah komoditas penyumbang inflasi.

Komoditas	Harga Rata-Rata Tw I 2025	Harga Rata-Rata Tw II 2025	Harga Rata-Rata Tw III 2025	Harga Rata-Rata Tw IV 2025	Growth Tw IV dibanding Tw III
Bawang Merah	Rp 41,250	Rp 43,433	Rp 42,517	Rp 38,250	-10.04%
Cabai Rawit	Rp 80,617	Rp 48,700	Rp 48,458	Rp 47,250	-2.49%

Sumber: PHPS Bank Indonesia, diolah

Sepanjang Triwulan IV 2025, beberapa komoditas strategis bahkan menunjukkan penurunan harga dibandingkan Triwulan III 2025, antara lain bawang merah dan cabai rawit, seperti yang terlihat pada tabel di bawah.

B. Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan pada Triwulan IV 2025 tercatat mengalami kenaikan untuk komoditas cabai merah dan bawang merah, namun mengalami penurunan untuk komoditas beras dibandingkan dengan Triwulan III 2025.

Produksi beras pada Triwulan IV tercatat sebesar 418.740 ton, lebih rendah dibandingkan Triwulan III (993.209 ton) maupun Triwulan I (1.264.963 ton). Penurunan ini mengindikasikan fase normalisasi pasca periode panen utama. Secara bulanan, produksi beras mengalami tren menurun dari Oktober (211.690 ton) ke November (94.120 ton), sebelum sedikit meningkat pada Desember (112.930 ton). Adapun data produksi padi dan komoditas hortikultura selama periode 2025 disajikan pada tabel berikut.

Di sisi lain, TPID Provinsi Sumatera Selatan juga telah melaksanakan serangkaian kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025. Program ini terdiri atas GSMP Menyapa Lingkungan Desa, GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office. Secara khusus, GSMP Menyapa Lingkungan Desa berfokus pada budidaya komoditas cabai dan bawang merah, yang melibatkan partisipasi 68 dasawisma (1.020 rumah tangga) dan 17 Kelompok Wanita Tani (KWT) se-Sumatera Selatan. Peserta program secara aktif melakukan budidaya di bawah pendampingan penyuluh pertanian lapangan serta melaporkan perkembangan budidaya kepada tim penjurian GSMP yang terdiri atas TPID Provinsi Sumatera Selatan dan PKK Provinsi Sumatera Selatan. Program GSMP diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat dari sekadar konsumen menjadi produsen, sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal serta mendorong terciptanya ekosistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan.

C. Kelancaran Distribusi

Berdasarkan data perkembangan margin distribusi harga pada triwulan IV 2025, terlihat adanya perbedaan (disparitas) harga yang cukup bervariasi antara harga di tingkat produsen dan harga di tingkat pasar untuk 6 komoditas utama penyumbang inflasi sebagaimana tercantum pada tabel.

Pada Triwulan IV 2025, margin disparitas harga di Sumatera Selatan menunjukkan pola yang relatif terkendali pada sebagian besar komoditas pangan strategis, namun masih terdapat tekanan pada komoditas hortikultura. Komoditas beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras mencatatkan selisih harga yang stabil dan cenderung moderat, mencerminkan kelancaran distribusi serta kecukupan pasokan menjelang periode akhir tahun. Margin pada ketiga komoditas tersebut tidak menunjukkan lonjakan signifikan, sehingga mendukung stabilitas harga di tingkat konsumen.

Sebaliknya, cabai merah dan cabai rawit masih mencatatkan disparitas harga yang relatif tinggi pada Triwulan IV, dengan selisih harga tetap berada pada kisaran dua puluh ribuan rupiah per kilogram. Kondisi ini mengindikasikan bahwa komoditas hortikultura masih rentan terhadap faktor musiman, fluktuasi produksi, serta biaya distribusi yang lebih tinggi menjelang periode peningkatan permintaan.

Dalam upaya pengendalian inflasi melalui strategi kelancaran distribusi, TPID Sumatera Selatan turut berperan melalui pemberian subsidi harga, subsidi angkutan, maupun subsidi operasional lainnya. Dukungan ini ditujukan untuk menekan biaya transportasi dan distribusi pangan, memperlancar alur distribusi dari produsen ke konsumen, serta menjaga keterjangkauan harga di pasar.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang, Pemerintah Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kab. Muara Enim, dan Pemerintah Kab. Musi Rawas telah melakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Prov. Sumatera Barat, Pemerintah

Komoditas	Produksi 2025 (Ton)							
	JUL	AGS	SEP	Total Tw III	OKT	NOV	DES	Total Tw IV
Beras	256,549	353,550	383,110	993,209	211,690	94,120	112,930	418,740
Cabai Merah	1,121	1,357	752	3,229	838	997	1,600	3,436
Bawang Merah	82	77	40	199	79	65	144	288

Sumber: BPS Kab. Muara Enim (SBH 2022=100), diolah

Komoditas / Margin Distribusi Harga		2025					
		JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Beras	Produsen	Rp. 12,550	Rp. 13,550	Rp. 12,450	Rp. 12,250	Rp. 12,150	Rp. 12,100
	Pasar	Rp. 15,200	Rp. 15,500	Rp. 15,500	Rp. 15,500	Rp. 15,500	Rp. 15,500
	Selisih Harga	Rp. 2,650.00	Rp. 1,950.00	Rp. 3,050.00	Rp. 3,250.00	Rp. 3,350.00	Rp. 3,400.00
	Rata-Rata Selisih Harga	Rp. 2,550.00					Rp. 3,333.33
Daging Ayam Ras	Produsen	Rp. 27,000	Rp. 31,000	Rp. 29,000	Rp. 35,000	Rp. 35,000	Rp. 34,000
	Pasar	Rp. 31,150	Rp. 34,150	Rp. 32,150	Rp. 38,000	Rp. 35,750	Rp. 37,150
	Selisih Harga	Rp. 4,150.00	Rp. 3,150.00	Rp. 3,150.00	Rp. 3,000.00	Rp. 750.00	Rp. 3,150.00
	Rata-Rata Selisih Harga	Rp. 3,483.33					Rp. 2,300.00
Bawang Merah	Produsen	Rp. 40,000	Rp. 40,000	Rp. 50,000	Rp. 41,650	Rp. 41,650	Rp. 36,650
	Pasar	Rp. 42,250	Rp. 50,150	Rp. 42,650	Rp. 37,000	Rp. 36,500	Rp. 41,250
	Selisih Harga	Rp. 2,250.00	Rp. 10,150.00	Rp. 7,350.00	Rp. 4,650.00	Rp. 5,150.00	Rp. 4,600.00
	Rata-Rata Selisih Harga	Rp. 1,683.33					Rp. 1,733.33
Cabai Merah	Produsen	Rp. 19,500	Rp. 24,200	Rp. 27,700	Rp. 48,350	Rp. 28,200	Rp. 41,500
	Pasar	Rp. 42,250	Rp. 42,400	Rp. 41,400	Rp. 63,750	Rp. 61,100	Rp. 72,200
	Selisih Harga	Rp. 22,750.00	Rp. 18,200.00	Rp. 13,700.00	Rp. 15,400.00	Rp. 32,900.00	Rp. 30,700.00
	Rata-Rata Selisih Harga	Rp. 18,216.67					Rp. 26,333.33
Cabai Rawit	Produsen	Rp. 33,200	Rp. 43,350	Rp. 27,000	Rp. 30,700	Rp. 14,500	Rp. 27,500
	Pasar	Rp. 50,650	Rp. 50,000	Rp. 43,000	Rp. 45,750	Rp. 39,600	Rp. 56,400
	Selisih Harga	Rp. 17,450.00	Rp. 6,650.00	Rp. 16,000.00	Rp. 15,050.00	Rp. 25,100.00	Rp. 28,900.00
	Rata-Rata Selisih Harga	Rp. 13,366.67					Rp. 23,016.67
Telur Ayam Ras	Produsen	Rp. 24,150	Rp. 24,650	Rp. 24,150	Rp. 24,500	Rp. 26,650	Rp. 25,200
	Pasar	Rp. 27,400	Rp. 27,950	Rp. 27,450	Rp. 27,950	Rp. 29,200	Rp. 28,950
	Selisih Harga	Rp. 3,250.00	Rp. 3,300.00	Rp. 3,300.00	Rp. 3,450.00	Rp. 2,550.00	Rp. 3,750.00
	Rata-Rata Selisih Harga	Rp. 3,283.33					Rp. 3,250.00

Sumber: PIHPS Bank Indonesia, diolah

Kab. Tanah Datar, dan Pemerintah Kab. Solok untuk berbagai komoditas, antara lain bawang merah, cabai, beras, dan perikanan. Melalui langkah-langkah kolaboratif tersebut, diharapkan disparitas harga dapat semakin diminimalkan, sehingga stabilitas harga pangan strategis di Sumatera Selatan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan.

D. Komunikasi Efektif

Upaya pengendalian inflasi melalui komunikasi efektif dilakukan melalui koordinasi kelembagaan, baik dalam bentuk rapat koordinasi, *high level meeting* (HLM), maupun *capacity building* TPID, serta pengendalian ekspektasi masyarakat. Pada Triwulan IV 2025, TPID Sumatera Selatan secara konsisten melaksanakan rapat koordinasi mingguan untuk membahas perkembangan inflasi terkini serta langkah-langkah pengendaliannya.

Sepanjang periode laporan, TPID se-Sumatera Selatan telah melaksanakan HLM, *capacity building*, dan rapat koordinasi TPID antara lain melalui:

- *High Level Meeting* (HLM) TPID se-Sumatera Selatan dalam rangka HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang dipimpin oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- *Capacity building* dan rapat koordinasi mengenai upaya pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
- *Capacity building* dan studi banding TPID Sumatera Selatan ke TPID Kepulauan Riau dalam rangka TPID Awards, serta
- Rapat Koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) TPID Sumatera Selatan bersama KPPG Sumatera Selatan mengenai implementasi MBG di Sumatera Selatan. FGD ini membahas mengenai kesiapan rantai pasok pangan dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan. Diskusi difokuskan pada aspek ketersediaan pasokan, stabilitas harga, serta mitigasi potensi tekanan inflasi agar pelaksanaan program berjalan serta ketersediaan pasokan tetap terjamin bagi masyarakat.

Lebih lanjut, TPID Sumatera Selatan secara aktif melaksanakan publikasi dan diseminasi informasi terkait inflasi maupun upaya pengendalian inflasi, termasuk di dalamnya mengenai bijak belanja, melalui berbagai kanal komunikasi, antara lain siaran pers di media cetak dan online, konten media sosial, pelaksanaan *podcast*, hingga sosialisasi langsung kepada masyarakat. Selain itu, TPID Sumatera Selatan juga secara rutin menginformasikan rencana pelaksanaan operasi pasar murah dan jaringan penyalur SPHP setiap bulan melalui media cetak maupun media sosial sebagai bentuk transparansi dan upaya menjaga ekspektasi masyarakat.

BOKS 2 :

HLM TPID & TP2DD se-Sumatera Selatan: Sinergi Pengendalian Inflasi HBKN Idul Fitri 1447 H, Akselerasi ETPD, dan Himbauan THR pakai QRIS

Dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 1447 sekaligus mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di wilayah Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sumatera Selatan pada 24 Februari 2026 di Palembang. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, Kepala Daerah Kkabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta anggota TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan.

Secara umum, inflasi Sumatera Selatan pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,33% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional. Namun demikian, secara historis periode Ramadan dan Idulfitri berpotensi meningkatkan tekanan inflasi bulanan, terutama dari kelompok *volatile food* serta kemungkinan penyesuaian *administered prices*. Komoditas yang menjadi perhatian meliputi cabai, bawang, daging sapi, daging ayam ras, ikan, tomat, emas perhiasan, dan tarif listrik. Risiko cuaca serta potensi gangguan distribusi turut menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

Dalam HLM tersebut ditegaskan penguatan strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, memastikan

ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif. Kepala daerah diharapkan melakukan pemantauan harga secara rutin, mendukung Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) *Goes to Pesantren*, meningkatkan kualitas sidak pasar secara *targeted* berbasis data melalui pemanfaatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan untuk Kab/Kota non IHK dan rekomendasi dari BI dan Dinas terkait untuk Kab/Kota IHK, serta memperkuat operasi pasar murah melalui strategi 4T: Tepat Komoditas, Tepat Lokasi, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran.

Pada aspek digitalisasi, transaksi non-tunai di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif, namun proporsi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan. Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) juga masih memiliki ruang akselerasi di sejumlah kabupaten/kota. Oleh karena itu, percepatan dan perluasan ETPD pada seluruh jenis pendapatan dan belanja daerah, penguatan roadmap yang terukur, optimalisasi QRIS untuk THR dan KKPD, serta monitoring dan evaluasi berkala menjadi fokus penguatan kedepan.

Secara keseluruhan, HLM menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas inflasi menjelang HBKN sekaligus memperkuat transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Sinergi kebijakan pengendalian inflasi dan digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mendukung stabilitas makroekonomi serta meningkatkan kualitas tata kelola fiskal daerah secara berkelanjutan.



Gambar 1. Pemaparan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi oleh Kepala Perwakilan BI Sumatera Selatan



Gambar 2. Doorstop Gubernur Sumatera Selatan pasca HLM TPID & TP2DD Se-Sumatera Selatan



Pembiayaan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Secara umum, kinerja stabilitas sistem keuangan Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian. Hal ini tercermin melalui terjaganya pertumbuhan penyaluran kredit serta aset perbankan. Di lain sisi, pertumbuhan kinerja intermediasi turut disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.

- Kinerja pertumbuhan aset perbankan pada triwulan IV 2025 tumbuh positif sebesar 5,60% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,49% (yoy). Kinerja aset perbankan disumbang oleh pertumbuhan penyaluran kredit perbankan yang meningkat sebesar 6,20% (yoy). Berdasarkan golongan debitur, penyaluran kredit rumah tangga tumbuh 10,08% (yoy) dan penyaluran kredit korporasi tumbuh 9,70% (yoy).
- Di lain sisi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar 7,22% (yoy), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya di tahun yang sama sebesar 5,15% (yoy). Pada periode laporan, kinerja DPK disumbang oleh pertumbuhan pada instrumen Giro (18,56% (yoy)) dan Tabungan (7,47%(yoy)) serta ditahan oleh instrumen deposito yang mengalami kontraksi (-0,96% (yoy)).
- Kredit UMKM triwulan IV 2025 mencatatkan kinerja positif dicatatkan melalui penyaluran kredit yang tumbuh 2,09% (yoy) yang lebih rendah dibanding periode sebelumnya. Penyaluran kredit UMKM skala kecil pada periode ini merupakan penyumbang pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Selatan dengan pertumbuhan sebesar 15,38% (yoy). Di lain sisi, kredit UMKM mikro sebagai pangsa penyaluran terbesar berkontraksi sebesar -6,06% (yoy) menunjukkan tekanan daya beli masyarakat berdampak pada UMKM perintis. Namun demikian, secara umum kinerja kredit UMKM yang positif mencerminkan kondisi keuangan dan optimisme UMKM tetap terjaga.

4.1. Kondisi Umum Sumatera Selatan

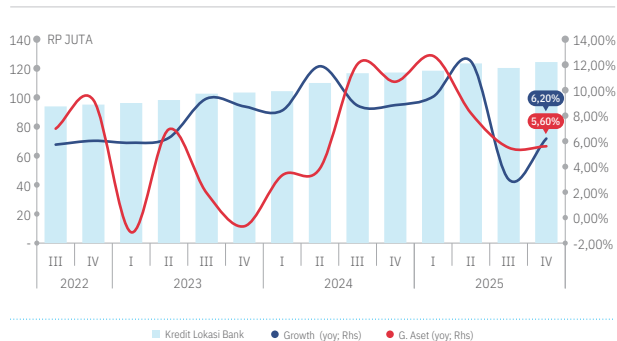
Pada triwulan IV 2025, kinerja perbankan Provinsi Sumatera Selatan secara umum meningkat. Kondisi ini tercermin melalui indikator kinerja utama perbankan yaitu nilai aset, dana pihak ketiga (DPK), dan penyaluran kredit.

Aset perbankan pada periode laporan tercatat tumbuh sebesar 5,60% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,49% (yoy). Kinerja aset perbankan ini utamanya disumbang oleh kinerja penyaluran kredit perbankan yang turut mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 6,20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,00% (yoy).

Di lain sisi, perkembangan DPK tumbuh sebesar 7,22% (yoy) yang meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya (Grafik 4-1). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan instrumen giro secara positif sebesar 18,56% (yoy) dan penurunan instrumen tabungan sebesar 7,47% (yoy). Instrumen giro masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya setelah Kementerian Keuangan mulai menempatkan dana ke bank-bank Himbara pada September 2025. Sementara itu, instrumen tabungan mengalami penurunan, karena sebagian masyarakat memilih menarik dana untuk membeli emas menyusul lonjakan harga emas yang terus meningkat hingga triwulan IV 2025. Kebijakan penempatan dana pemerintah ini memberikan dampak likuiditas terhadap giro, sedangkan pergeseran preferensi masyarakat ke emas melemahkan pertumbuhan tabungan.

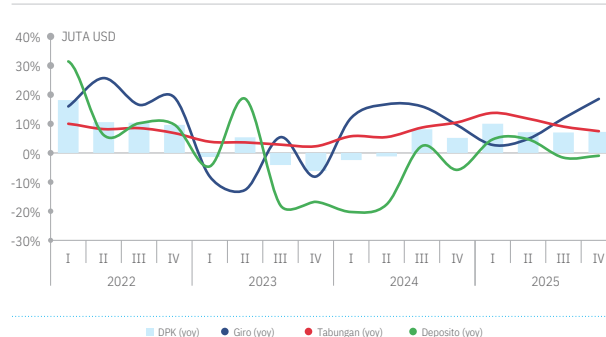
Nominal pada DPK perbankan di triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp116,49 triliun, angka ini tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp117,35 triliun (Tabel 4-1). Secara *quarter-on-quarter*, penurunan DPK utamanya disumbang oleh instrumen tabungan yang mengalami penurunan sebesar 7,47% (yoy) pada triwulan IV 2025, kinerja ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 9,05% (yoy) (Tabel 4-2). Penurunan

Grafik 4.1. Perkembangan Pertumbuhan DPK dan Aset Perbankan di Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.2. Perkembangan DPK Perbankan Berdasarkan Jenis Simpanan



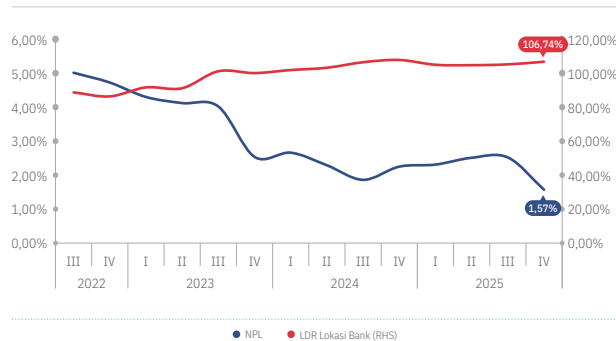
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

pada tabungan di triwulan ini dipicu oleh lonjakan harga emas yang dipicu kekhawatiran ekonomi global seperti tarif dagang AS, ketegangan geopolitik, dan pelemahan Rupiah. Sebagian masyarakat beralih ke emas sebagai aset lindung nilai (*safe haven*).

Lebih lanjut, kinerja pembiayaan perbankan pada periode laporan sejalan dengan tingkat *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) perbankan Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat sebesar 106,74% atau mengalami sedikit peningkatan dari periode triwulan III 2025 sebesar 105,18%. Kinerja ini mengindikasikan bahwa perbankan di Sumatera Selatan mempunyai rasio likuiditas dimana posisi LDR lebih tinggi dibandingkan *threshold* (80%-92%).

Sejalan dengan indikasi risiko likuiditas yang meningkat melalui kinerja LDR, tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) berada di tingkat 1,57% pada periode laporan. Kinerja NPL pada periode ini lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2024 yang berada pada tingkat 2,25%. Kinerja NPL berada di bawah *threshold* (5%), hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penguatan pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kewajiban ditengah himbauan perbankan untuk meningkatkan *lending* seiring dengan relaksasi kebijakan Makroprudensial.

Grafik 4.3. Perkembangan Risiko perbankan Sumatera Selatan Berdasarkan Lokasi Bank



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Meskipun demikian, perbankan tetap berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan likuiditas. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan giro yang sehat, perbankan secara berkesinambungan mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain dengan menambah ekosistem pembayaran digital, menjaga stabilitas sistem dan keamanannya, serta menyalurkan kredit secara prudent dengan menjaga NPL dan CAR, dan memperhatikan LDR. Selain itu, perbankan juga terus mendorong pengelolaan dana secara lebih produktif dengan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembiayaan yang selektif, terutama pada sektor-sektor prioritas dan unggulan di wilayah Sumatera Selatan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dengan demikian, peningkatan giro tidak hanya memperkuat basis likuiditas perbankan, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan fungsi intermediasi dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2. Pembiayaan Daerah

Kondisi pembiayaan di Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tetap menunjukkan pertumbuhan positif, dengan laju yang sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit modal kerja pada triwulan berjalan tercatat sebesar 1,24% (yoy), tetap tumbuh positif walaupun melambat dibandingkan capaian pada periode sebelumnya yang tumbuh 2,31% (yoy). Sementara itu, kredit investasi menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 21,33% (yoy) (grafik 4-10), mencerminkan adanya peningkatan aktivitas pembiayaan yang diarahkan untuk mendukung ekspansi usaha jangka panjang.

Pertumbuhan penyaluran kredit di Sumatera Selatan pada triwulan laporan mencerminkan tetap kuatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek perekonomian ke depan. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya permintaan domestik, stabilitas harga komoditas utama, serta kepercayaan terhadap kondisi makroekonomi yang kondusif. Hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 juga menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai kembali mengandalkan pembiayaan perbankan, khususnya untuk ekspansi usaha dan penambahan modal kerja.

Selain itu, kebijakan moneter yang tetap akomodatif serta stabilitas sistem keuangan mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit secara selektif namun progresif. Kondisi ini menjadi indikasi positif bahwa dunia usaha telah mampu beradaptasi dengan tantangan pasca pandemi dan mulai mengaktifkan kembali berbagai rencana investasi yang sempat tertunda. Beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan antara lain transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, dan percepatan belanja pemerintah/investasi swasta.

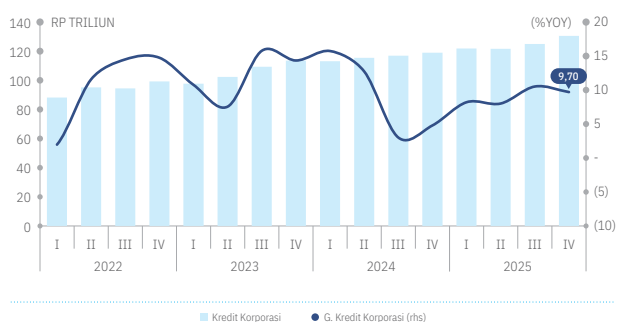
Di sisi lain, perbankan tetap memiliki ruang untuk mendukung pembiayaan produktif, seiring dengan pertumbuhan *undisbursed loan* yang diperkirakan akan mengalami moderasi. Fasilitas pinjaman yang belum dicairkan (*undisbursed loan*) pada November 2025 mencapai Rp2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia. Hal ini menunjukkan masih adanya kelonggaran tarik kredit di masa depan yang dapat dimanfaatkan oleh debitur dalam melakukan ekspansi usaha. Dengan adanya potensi kredit/pembiayaan yang besar tersebut, terdapat potensi peningkatan realisasi kredit di masa mendatang. Apabila kondisi ekonomi telah membaik dan kepercayaan pelaku usaha meningkat, maka pencairan kredit dapat meningkat dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

Berdasarkan hasil *liaison* sepanjang tahun 2025, perbankan di Sumatera Selatan menyampaikan bahwa berbagai upaya strategis terus dilakukan untuk memperkuat kinerja penyaluran kredit, baik melalui perbaikan internal maupun kolaborasi eksternal. Langkah-langkah tersebut mencakup optimalisasi proses penilaian kredit, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan layanan berbasis teknologi digital yang kini menjadi salah satu andalan utama dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan. Meski demikian, perbankan tetap mempertahankan pendekatan konvensional melalui pelayanan tatap muka, sehingga dapat menjangkau beragam segmen nasabah. Dalam menghadapi tantangan infrastruktur, khususnya keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, perbankan secara proaktif meningkatkan kuantitas dan kualitas agen *Laku Pandai* sebagai solusi alternatif untuk memperluas jangkauan layanan, terutama di daerah yang belum memiliki akses memadai terhadap jaringan internet, ATM, maupun kantor cabang. Lebih lanjut, perbankan di Sumatera Selatan juga menekankan pentingnya inovasi dalam strategi pembiayaan, termasuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, perbankan optimistis dapat terus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang.

4.2.1. Perkembangan Pembiayaan Korporasi

Pertumbuhan pembiayaan korporasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 9,70% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan berjalan tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 10,52% (yoy) (Grafik 4-5). Kinerja kredit korporasi yang masih tumbuh positif, seiring dengan kredit modal kerja yang turut mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,24% (yoy). Secara nominal, penyaluran kredit modal kerja korporasi di Sumatera Selatan pada triwulan laporan tercatat senilai Rp69,70 triliun.

Grafik 4.4. Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan

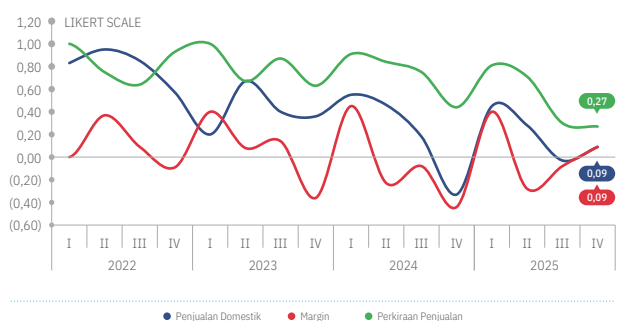


Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Peningkatan pembiayaan korporasi pada triwulan IV 2025 utamanya bersumber dari kinerja kredit investasi yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 21,33% (yoy) (Grafik 4-6). Kondisi ini menunjukkan kepercayaan diri dalam mengambil langkah investasi, meskipun masih ada kecenderungan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Dari hasil *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, para pelaku usaha disinyalir mulai menunjukkan performa ke arah positif meskipun nilainya relatif stabil dibandingkan periode sebelumnya. Selain itu, para pelaku usaha mulai mengarah pada fase ekspansi meskipun perkembangannya masih berjalan secara bertahap. Di sisi lain, perbankan terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial secara prudent dengan tetap memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perekonomian domestik, global serta potensi bisnis calon debitur. Hal ini juga didukung oleh prospek ekonomi yang lebih baik pada akhir tahun 2025 sehingga perbankan dapat lebih agresif dalam menyalurkan kredit.

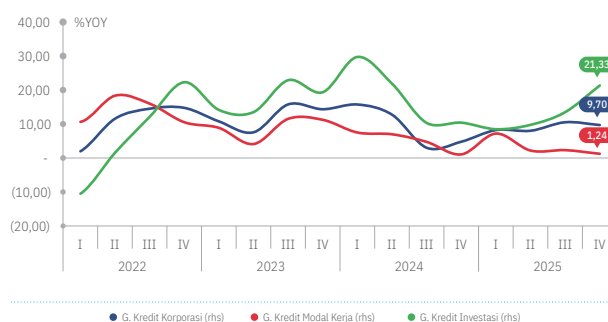
Komitmen perbankan tak lepas dari optimisme yang terekam dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada triwulan III 2025, dimana hasil survei tercatat berada pada level 66 (zona optimis). Optimisme perbankan tersebut didorong oleh ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi, berlanjutnya peningkatan fungsi intermediasi

Grafik 4.6. Likert Scale Penjualan Domestik, Margin, dan Perkiraan Penjualan



Sumber: Liaison Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan diolah

Grafik 4.5. Perkembangan Kredit Korporasi di Sumatera Selatan



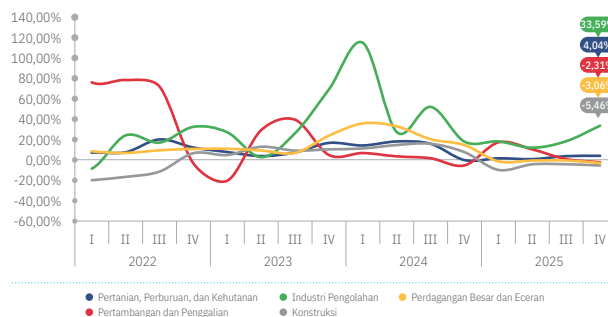
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

perbankan dibarengi dengan kemampuan perbankan dalam mengelola risiko yang dihadapi.

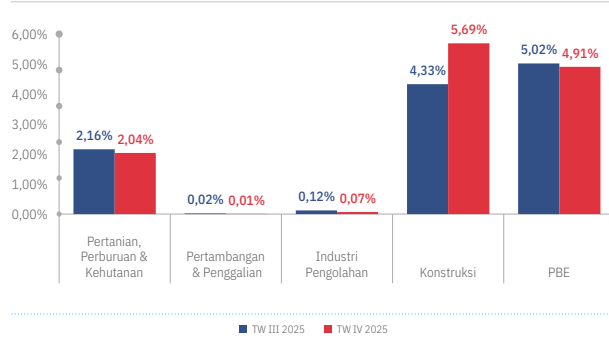
Optimisme perbankan tersebut juga sejalan dengan hasil *liaison* yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan kepada berbagai pelaku usaha, di mana pelaku usaha mencatatkan sentimen positif atas efisiensi dan produktivitas usaha, yang selanjutnya mendorong peningkatan margin perusahaan. Sentimen ini tercermin dari hasil *Likert Scale margin* pada Triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 0,09 lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar -0,08 (Grafik 4-7). Peningkatan ini mengindikasikan performa perusahaan yang semakin membaik di masa mendatang.

Berdasarkan lapangan usaha, kredit korporasi di Sumatera Selatan triwulan IV 2025 utamanya didominasi oleh pertumbuhan positif penyaluran kredit pada lapangan usaha (LU) Industri Pengolahan, dan LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan. Secara spasial, pertumbuhan penyaluran kredit pada 5 (lima) sektor utama di Sumatera Selatan di triwulan berjalan ditopang oleh LU Industri Pengolahan yang tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 33,59% (yoy). Lebih lanjut, penyaluran kredit korporasi pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan tercatat sebesar 4,04% (yoy).

Grafik 4.7. Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.8. NPL Kredit Korporasi Sumatera Selatan

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Kinerja kualitas kredit korporasi Sumatera Selatan mengalami peningkatan pada triwulan IV 2025. NPL kredit korporasi pada triwulan berjalan tercatat sebesar 1,87% mengalami penurunan dibandingkan dengan NPL periode sebelumnya yang tercatat sebesar 1,97% (Grafik 4-9). Ditinjau dari jenis penggunaan kreditnya, peningkatan kinerja kredit utamanya bersumber dari meningkatnya kualitas kredit investasi yang tercatat sebesar 1,15% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,34%. Di sisi lain, kualitas kredit modal kerja mengalami penurunan menjadi 2,30% dari sebelumnya sebesar 2,23%.

Sementara jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, peningkatan kualitas kredit disebabkan oleh kualitas kredit pada sebagian besar sektor utama yaitu LU Pertanian, Perburuan & Kehutanan, Pertambangan & Penggalian, Industri Pengolahan dan PBE yang masing-masing sebesar 2,04%, 0,01%, 0,07% dan 4,91%. Meski demikian, terdapat penurunan kualitas kredit pada pada Lapangan Usaha (LU) Konstruksi yang berada di tingkat 5,69%.

4.2.2. Perkembangan Pembiayaan Sektor Rumah Tangga

Komponen konsumsi rumah tangga (RT) memegang peranan strategis sebagai motor penggerak utama permintaan dalam perekonomian, termasuk di wilayah Sumatera Selatan. Konsumsi oleh rumah tangga tidak hanya menjadi pendorong langsung bagi aktivitas ekonomi melalui peningkatan permintaan barang dan jasa, tetapi juga menciptakan siklus ekonomi yang saling terhubung.

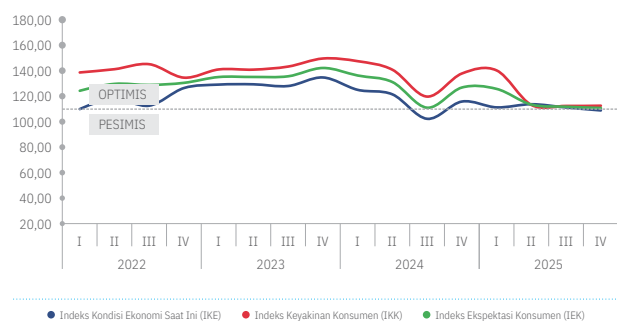
Kinerja rumah tangga Provinsi Sumatera Selatan tetap tumbuh, sejalan dengan keyakinan rumah tangga terhadap kondisi perekonomian pada triwulan IV 2025. Pada periode laporan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada PDRB Sumatera Selatan triwulan IV 2025 tercatat sebesar 4,91% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pada triwulan III 2025 yang tercatat 4,89% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) KPwBI Provinsi

Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 yang menunjukkan bahwa tingkat ekspektasi masyarakat terhadap kondisi masih berada pada titik optimis. Secara khusus, Indeks Keyakinan Konsumen pada periode laporan tercatat sebesar 110,70.

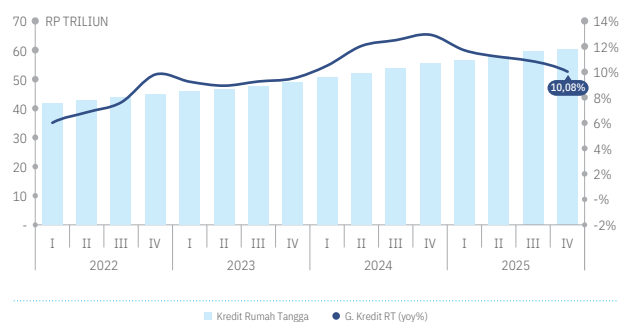
Penyaluran kredit pada rumah tangga Provinsi Sumatera Selatan tetap mengalami pertumbuhan meskipun melambat. Sejalan dengan PDRB konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh 4,91% (yoy) pada triwulan IV 2025, kredit sektor rumah tangga turut mengalami pertumbuhan sebesar 10,08% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,94% (yoy) dan triwulan IV 2024 yang sebesar 12,92% (yoy).

Pertumbuhan penyaluran kredit utamanya disumbang oleh oleh penyaluran kredit multiguna dengan pangsa sebesar 37,04% diikuti oleh kredit kepemilikan rumah (KPR) sebesar 33,70% dan kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan pangsa sebesar 7,59% dari total kredit rumah tangga.

Berdasarkan komposisi penyaluran kredit rumah tangga, kredit multiguna mengalami pertumbuhan sebesar 8,18% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 6,85% (yoy). Kinerja ini didorong oleh karakteristik multiguna yang mempunyai keleluasaan penggunaan untuk berbagai kebutuhan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Kredit multiguna semakin diminati masyarakat

Grafik 4.9. Indeks Keyakinan Konsumen dan Komponennya Sumatera Selatan

Sumber: Survei Konsumen BI Sumatera Selatan, diolah

Grafik 4.10. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan

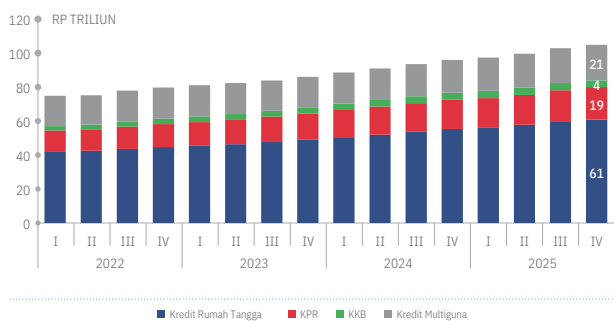
Sumber: LBU BI Sumatera Selatan, diolah

sebagai solusi praktis untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari biaya pendidikan hingga modal usaha. Perbankan juga memprakirakan bahwa kinerja kredit multiguna optimis akan terus meningkat pada periode mendatang.

Di lain sisi, penyaluran kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit perumahan (KPR) masing-masing tumbuh lebih lambat secara *year-on-year*, Pertumbuhan penyaluran KKB dan KPR pada periode laporan secara berurutan tumbuh sebesar 4,01% (yoy) dan 10,07% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 15,31%(yoy) dan 13,31% (yoy). Perlambatan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat yang relatif masih terbatas sehingga lebih memprioritaskan kebutuhan dasar. Namun demikian, pertumbuhan KPR diproyeksikan akan *rebound* yang didorong oleh meningkatnya realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Provinsi Sumsel melalui Himbara dan BPD. Hal ini diwujudkan melalui berbagai upaya seperti dukungan regulasi dari pemerintah pusat, transparansi dalam penyaluran bantuan, hingga kerja sama dengan pengembang lokal.

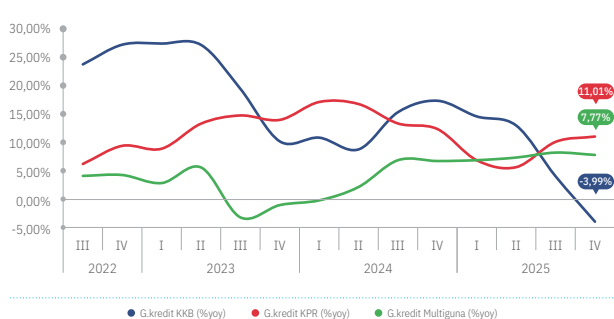
Sejalan dengan kinerja dan kondisi penyaluran kredit rumah tangga, indikator risiko penyaluran kredit tetap terjaga. Kinerja NPL pada kredit rumah tangga tercatat meningkat sebesar 2,21% dibandingkan dengan periode sebelumnya yang

Grafik 4.11. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan menurut kelompok penggunaan



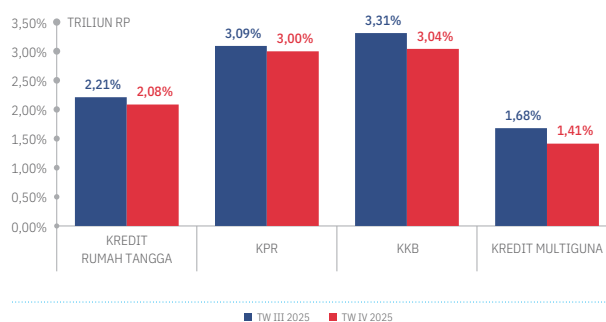
Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12. Pertumbuhan Komposisi Kredit Rumah Tangga di Sumatera Selatan



Sumber: LBU BI Sumatera Selatan, diolah

Grafik 4.13. NPL Kredit Rumah Tangga Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

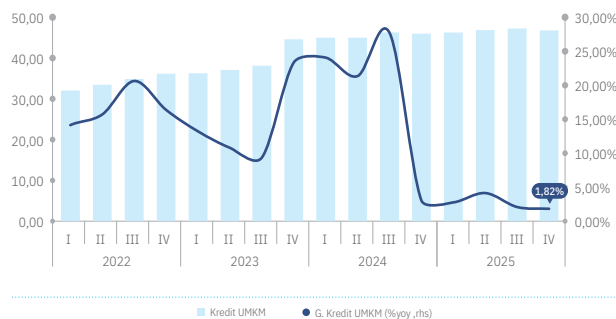
sebesar 2,08%. Penurunan kualitas kredit rumah tangga ini disumbang dari kinerja NPL pada komponen KPR, KKB, dan Kredit Multiguna yang masing-masing tercatat sebesar 3,09%, 3,31%, dan 1,68%. Angka kualitas kredit tersebut cenderung meningkat jika dibandingkan periode sebelumnya yang masing-masing sebesar 2,90%, 2,82%, dan 1,65%. (Grafik 4-13).

4.3. Pengembangan Akses Keuangan dan Pembiayaan UMKM

Pada triwulan IV 2025, total penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan tetap mengalami pertumbuhan meskipun melambat. Secara umum, kredit yang disalurkan ke sektor UMKM pada triwulan IV 2025 mengalami pertumbuhan positif yang tercatat sebesar 2,09% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp41,35 triliun. Namun demikian, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,95% (yoy).

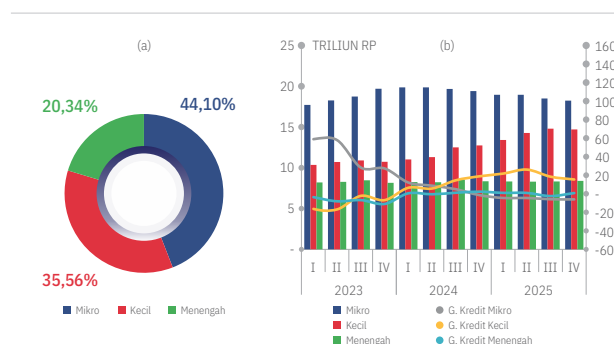
Berdasarkan skala usahanya, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM Sumatera Selatan disumbang oleh penyaluran kredit UMKM skala kecil. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil mencatatkan kinerja yang tetap tumbuh 15,38% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18,41%. Di lain sisi, penyaluran kredit UMKM skala mikro mengalami kontraksi sebesar 6,06% (yoy), melanjutkan

Grafik 4.14. Perkembangan Kredit UMKM di Sumatera Selatan (Rp Triliun)



Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.15. Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Skala Usaha: (a) Pangsa Kredit UMKM; dan (b) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy)



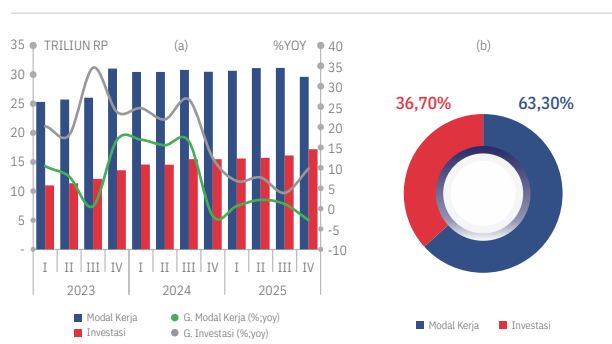
Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

tren kontraksi di triwulan sebelumnya sebesar 5,93%. Sementara itu, UMKM skala menengah mengalami pemulihan tumbuh positif sebesar 0,76% (yoy) setelah berkontraksi sebesar 2,51% pada triwulan sebelumnya. Dari sisi pangsa, penyaluran kredit UMKM pada skala mikro, kecil dan menengah masing-masing sebesar 44,10%, 35,56% dan 20,34%.

Realisasi penyaluran kredit UMKM Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025 juga masih didominasi dengan penyaluran dalam bentuk kredit modal kerja. Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM utamanya disalurkan dalam bentuk modal kerja dengan pangsa sebesar 63,30% diikuti oleh kredit investasi dengan pangsa sebesar 36,70%. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum kebutuhan UMKM di wilayah Sumatera Selatan masih berpusat pada operasional harian daripada akuisisi maupun penambahan aset jangka menengah hingga panjang guna ekspansi usaha. Secara nominal, kredit modal kerja UMKM pada periode laporan mencapai sebesar Rp29,62 triliun atau melambat sebesar 2,87% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,10%. Sementara itu, kredit investasi mencapai sebesar Rp17,17 triliun dengan pertumbuhan sebesar 9,83% (yoy) lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai sebesar Rp16,11 triliun dengan pertumbuhan 3,85%.

Berdasarkan lapangan usahanya, penyaluran kredit UMKM di Sumatera Selatan masih terfokus pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan. Pangsa penyaluran kredit pada LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar 39,74%, diikuti oleh LU perdagangan sebesar 34,48%, LU konstruksi sebesar 5,12%, LU industri pengolahan sebesar 3,18%, dan LU pertambangan sebesar 0,57%. Dominasi LU Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan serta LU Perdagangan menunjukkan fundamental UMKM sebagai perekonomian daerah cukup robust dalam mendukung pertumbuhan daerah secara berkelanjutan melalui penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan konsumsi masyarakat.

Grafik 4.16. Penyaluran Kredit UMKM Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Penggunaan : (a) Nominal Penyaluran dan Pertumbuhan Kredit (%yoy); dan (b) Pangsa Kredit UMKM

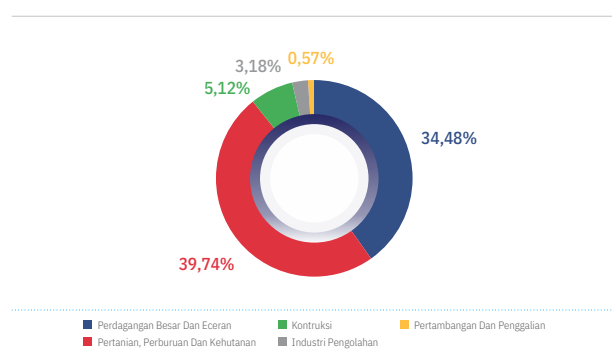


Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

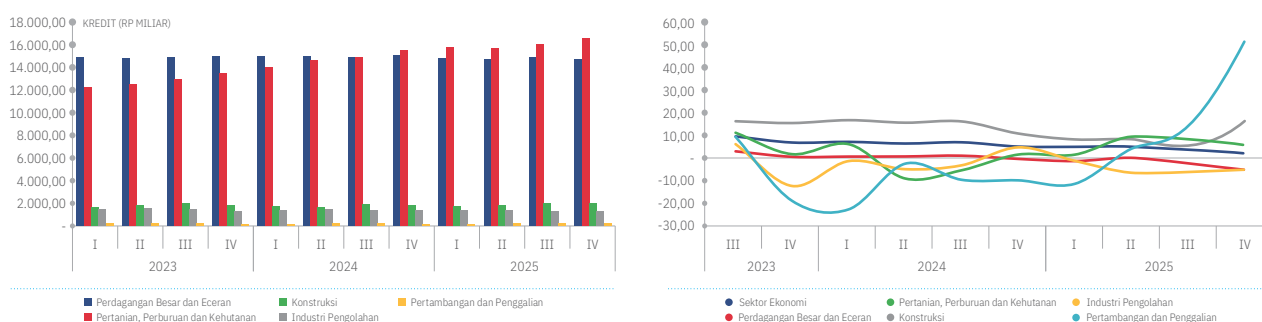
Kinerja penyaluran kredit pada LU strategis yang positif turut mendorong pertumbuhan penyaluran kredit UMKM. Pada periode laporan, kinerja penyaluran kredit pada LU pertanian tumbuh melambat sebesar 5,81% (yoy) dengan *outstanding* Rp 16,43 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,00% (yoy) dengan *outstanding* sebesar Rp16,55 triliun. Sementara, LU konstruksi dan LU Pertambangan dan Penggalian tumbuh kuat masing-masing sebesar 16,48% dan 50,63% dengan *outstanding* sebesar Rp2,1 triliun dan Rp236 miliar, jika dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 5,26% dan 12,65%. Hal ini didorong oleh lebih banyaknya proyek pembangunan infrastruktur strategis dan peningkatan anggaran tahun 2025 pada LU konstruksi serta peningkatan volume produksi LU Pertambangan dan penggalian. Sementara itu, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta Industri Pengolahan melanjutkan tren berkontraksi masing-masing sebesar 4,33% dan 4,72% dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga berkontraksi sebesar 2,18% dan 5,44%.

Secara agregat, pertumbuhan penyaluran kredit UMKM turut disertai dengan kualitas kredit yang tetap terjaga pada periode laporan. Rasio NPL kredit UMKM pada triwulan berjalan tercatat sebesar 3,98% atau berada di bawah *threshold* rasio kredit bermasalah. Kinerja NPL tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang sebesar 3,89%.

Grafik 4.17. Pangsa Kredit Sektoral UMKM Sumatera Selatan



Sumber: Laporan Bank Umum – Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.18. Pertumbuhan Sektorial Kredit UMKM dan Proporsi Penyaluran Kredit UMKM Triwulan IV 2025

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

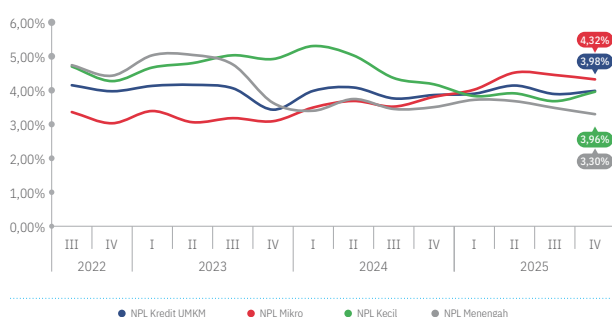
Berdasarkan kategori penerima, kualitas kredit UMKM ini ditekan oleh kinerja kualitas segmen UMKM Kecil yang mengalami peningkatan kredit bermasalah menjadi 3,96% setelah sebelumnya tercatat 3,68%.

Berdasarkan lapangan usaha, NPL penyaluran kredit UMKM masih disumbang utamanya oleh LU konstruksi dengan rasio 12,21%. Tingginya NPL pada Lapangan Usaha Konstruksi dipengaruhi oleh karakteristik proses bisnisnya yang memiliki siklus pengembalian modal relatif panjang. Kondisi tersebut meningkatkan eksposur terhadap berbagai risiko inheren yang berpotensi meningkatkan rasio NPL. Selanjutnya, NPL pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 4,32%, LU pertanian sebesar 2,94%, LU Pengolahan sebesar 2,43%, dan LU Pertambangan dan Penggalian sebesar 0,30% mempunyai NPL di tingkat yang aman. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM yang tersebar di LU sektor strategis secara umum mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang cukup baik.

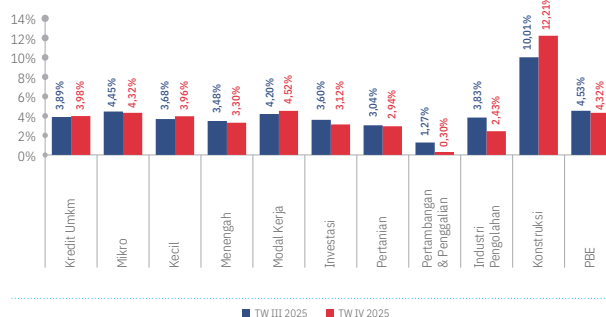
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, diperlukan dukungan stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan yang kokoh. Untuk mendukung upaya tersebut salah satunya diperlukan pemberdayaan sektor riil khususnya pengembangan UMKM yang berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka

optimalisasi kontribusi UMKM, salah satunya dilakukan melalui pemasaran produk UMKM, seperti promosi UMKM melalui kegiatan Seru Sriwijaya yang diselenggarakan pada 24 – 25 Oktober 2025. Kegiatan tersebut mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi: Kunci Penguatan Peran UMKM sebagai Motor Penggerak Ekonomi Berkelanjutan”. **Inovasi atau pembaruan dari SERU Sriwijaya tahun 2025 adalah mengangkat isu penguatan hilirisasi UMKM sebagai pondasi pertumbuhan ekonomi berbasis model hijau dan berkelanjutan.** Kegiatan menampilkan exhibition produk unggulan dari 44 (empat puluh empat) UMKM binaan/mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.

Dari sisi *demand*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya peningkatan UMKM berlandaskan 3 (tiga) pilar, yaitu korporatisasi, perluasan pasar dan pembiayaan. Tercatat hingga TW IV 2025, telah dilakukan *onboarding* digital secara intensif kepada 88 UMKM dan 11 UMKM berhasil menembus pasar ekspor ke Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Turki. Bank Indonesia mendorong percepatan akses pembiayaan UMKM melalui penyediaan data & informasi UMKM yang potensial mendapat pembiayaan (BISAID), penyediaan dan pendampingan penggunaan aplikasi pencatatan keuangan secara digital (SIAPIK) guna meningkatkan akses terhadap pembiayaan.

Grafik 4.19. Perkembangan NPL Kredit UMKM Sumatera Selatan

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20. Perkembangan NPL Kredit Sektorial UMKM Sumatera Selatan

Sumber: Laporan Bank Umum - Bank Indonesia, diolah

Sementara itu, dari sisi *supply*, melalui sinergi dengan pemerintah dan lembaga vertikal, pengembangan UMKM dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan dengan mendorong kerja sama dengan lembaga mitra penyalur kredit. Fasilitasi dilakukan melalui *business matching* pembiayaan dengan perbankan, serta dukungan pemerintah pada Program Akad Massal KUR yang diikuti oleh 300 debitur.



Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal baik melalui metode tunai maupun nontunai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025.

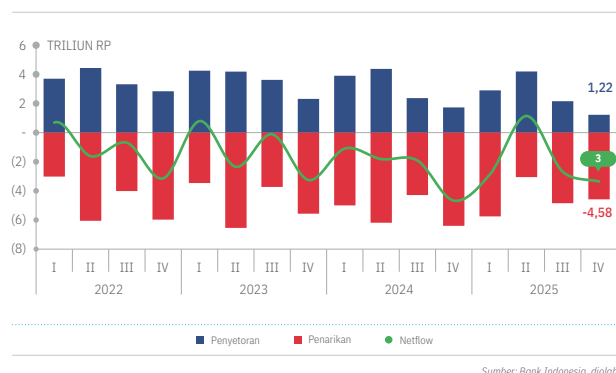
- Sesuai dengan pola historis tahunan, aliran transaksi uang kartal mengalami *net outflow* pada triwulan IV 2025.
- Tingginya aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan berbasis tunai di sektor-sektor tertentu seperti perdagangan, perkebunan (karet, sawit, kopi), dan UMKM.
- Penyaluran kredit pemerintah memicu peningkatan kebutuhan uang tunai, sehingga mendorong terjadinya *net outflow* pada triwulan IV 2025.
- Di sisi lain, kinerja sistem pembayaran nontunai pada triwulan IV 2025 terus menunjukkan akselerasi, sejalan dengan meningkatnya adopsi instrumen digital di berbagai lapisan masyarakat dan pelaku usaha.

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Pengelolaan Uang Rupiah

Selama triwulan IV 2025, peredaran uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan *net outflow* yang mengindikasikan peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat dikarenakan data historis dan panen raya kopi. Triwulan IV laporan mencatatkan peredaran uang kartal di Sumatera Selatan mengalami *net outflow* sebesar Rp3,35 triliun. Realisasi *net outflow* tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami *net outflow* sebesar Rp2,68 triliun (Grafik 5-1), hal ini dikarenakan pada triwulan sebelumnya terdapat momen HKBN yaitu Hari Raya Idul Fitri. Transaksi penarikan uang kartal tercatat sebesar Rp4,58 triliun dengan penurunan sebesar 28,37 % (yoy), sementara transaksi penyetoran uang kartal pada periode yang sama tercatat sebesar Rp1,22 triliun dengan penurunan sebesar 29,18% (yoy).

Pelaksanaan kegiatan program edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) secara masif pada triwulan IV 2025 turut membangun kesadaran masyarakat dan perbankan terhadap pelaporan uang yang diragukan keasliannya ke Bank Indonesia. Adapun jumlah uang palsu yang dilaporkan pada periode berjalan sejumlah 1.583 lembar, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang berjumlah 1.388 lembar. Adapun kegiatan edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBPR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan secara konsisten yang ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk di dalamnya instansi perbankan, pendidikan, aparaturnegara, pers, dan sosial media di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan

Grafik 5.1. Aliran Uang kartal di Provinsi Sumatera Selatan



Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS Provinsi Sumatera Selatan

Keterangan	2024				2025			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
RTGS dari Provinsi Sumsel								
Nilai (Rp Triliun)	34,20	46,85	49,35	64,23	50,86	46,82	65,23	63,42
Volume	15.419	15.567	17.133	19.367	16.523	13.982	16.726	19.005

Sumber: Bank Indonesia, diolah

program ini, diharapkan pemahaman masyarakat dan *stakeholders* di Sumatera Selatan dalam mengenali dan merawat uang Rupiah terus meningkat, sehingga uang Rupiah yang beredar dimasyarakat dalam kondisi layak edar dan terhindar dari peredaran uang palsu.

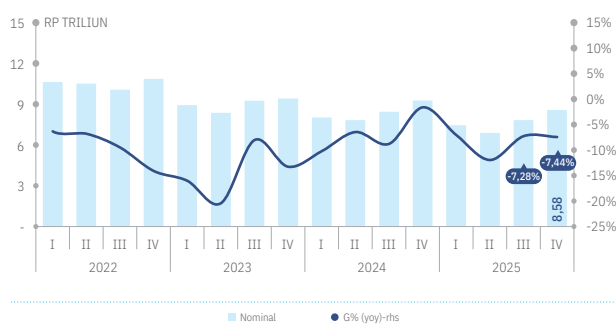
5.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai

5.2.1. Transaksi SKNBI dan BI-RTGS

Perkembangan transaksi pembayaran ritel pada Triwulan IV 2025 menunjukkan akselerasi transformasi menuju ekosistem digital yang semakin terintegrasi, sejalan dengan arah Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 (BSPI 2030) yang menitikberatkan pada interoperabilitas, efisiensi, dan inklusivitas. Dinamika ini tidak hanya mencerminkan peningkatan adopsi kanal digital, tetapi juga memunculkan pergeseran struktural antar-instrumen pembayaran ritel yang perlu dicermati secara strategis. Pada triwulan IV 2025, kinerja transaksi ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) masih mengalami perlambatan secara tahunan, utamanya dari sisi nominal. Secara nominal, nilai transaksi perputaran kliring tercatat sebesar Rp8,56 triliun atau terkontraksi 7,44% (yoy). Angka ini menunjukkan kontraksi yang sedikit lebih dalam dibandingkan Triwulan III 2025 yang tercatat terkontraksi 7,28% (yoy) (Grafik 5-2). Dari sisi volume, meskipun jumlah warkat tercatat sebanyak 170,88 ribu warkat atau tumbuh 3,82% (yoy) (Grafik 5-3), namun peningkatan tersebut belum mampu mendorong perbaikan nominal transaksi secara keseluruhan. Penurunan nominal transaksi kliring tersebut antara lain dipengaruhi oleh pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke instrumen pembayaran non-kliring, khususnya BI-FAST dan QRIS. BI-FAST semakin menjadi pilihan utama karena menawarkan layanan transfer dana secara real time selama 24 jam dengan biaya yang relatif rendah serta proses yang cepat dan andal.

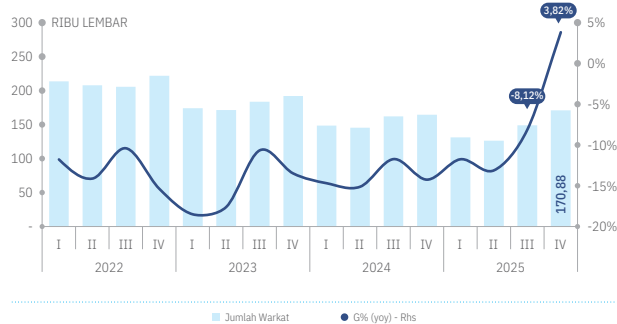
Aktivitas transaksi melalui BI-RTGS pada triwulan IV 2025 turut tercatat mengalami perlambatan, baik pada sisi nilai tercatat menguat baik dari sisi nilai maupun volume (Tabel 5-1). Dari sisi nominal, total transaksi RTGS tercatat sebesar Rp63,42 triliun (Grafik 5-4), atau menurun 1,28% (yoy). Kinerja ini berbalik arah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih mencatat peningkatan hingga 32,18% (yoy). Dari sisi volume,

Grafik 5.2. Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Sumatera Selatan



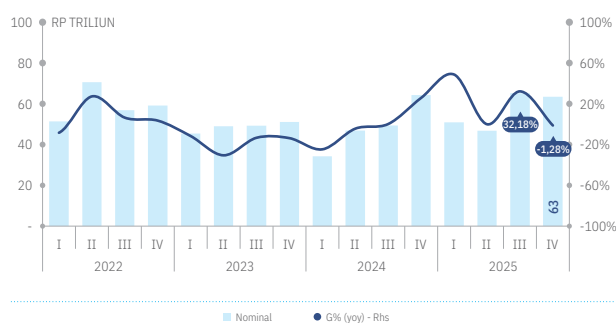
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3. Perkembangan Jumlah Warkat Transaksi Kliring Sumatera Selatan



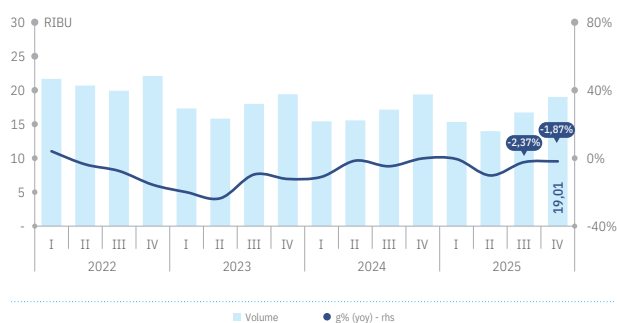
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4. Perkembangan Nominal Transaksi RTGS Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5. Perkembangan Volume Transaksi RTGS Sumatera Selatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

jumlah setelmen mencapai 19.005 transaksi, terkontraksi sebesar 1,87% (yoy), menguat dibandingkan kontraksi sebesar 2,37% pada periode sebelumnya. Penurunan nilai dan volume RTGS secara tahunan ini mengindikasikan adanya normalisasi aktivitas transaksi bernilai besar setelah peningkatan yang cukup signifikan pada triwulan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh dinamika transaksi korporasi, penyelesaian kewajiban antarbank, aktivitas pasar keuangan, serta realisasi belanja pemerintah dan korporasi skala besar.

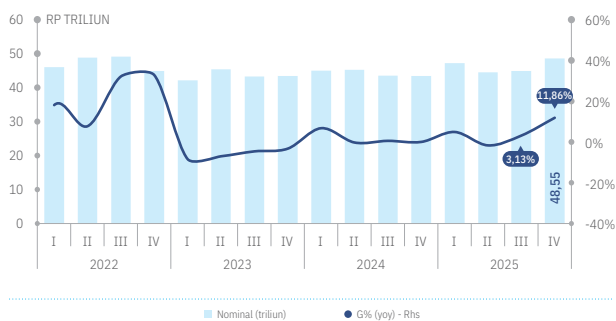
5.2.2. Perkembangan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu

Transformasi sistem pembayaran nasional yang diarahkan dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030* menempatkan inovasi sebagai pendorong utama pergeseran menuju instrumen pembayaran yang semakin *seamless* dan digital. Tren *cashless*, *cardless*, dan *contactless* diproyeksikan terus menguat, khususnya pada lapisan *front-end* yang bersentuhan langsung dengan pengguna, seiring siklus inovasi teknologi yang semakin singkat dan adaptif. Namun demikian, dinamika di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa instrumen berbasis kartu fisik masih memegang peranan signifikan, terutama pada transaksi yang beririsan dengan kebutuhan likuiditas tunai dan aktivitas perbankan konvensional.

Pada Triwulan IV 2025, transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) di Sumatera Selatan mencatatkan penguatan baik dari sisi nominal maupun volume. Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit mencapai Rp48,54 triliun atau tumbuh 11,86% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan III 2025 yang meningkat 3,13% (yoy) dengan nominal Rp44,86 triliun (Grafik 5-6). Dari sisi volume, transaksi tercatat sebanyak 35,78 juta atau tumbuh 1,09% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi 6,97% (yoy) pada triwulan sebelumnya dengan volume 33,56 juta transaksi (Grafik 5-7). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan kartu tetap terjaga di tengah ekspansi kanal pembayaran digital lainnya.

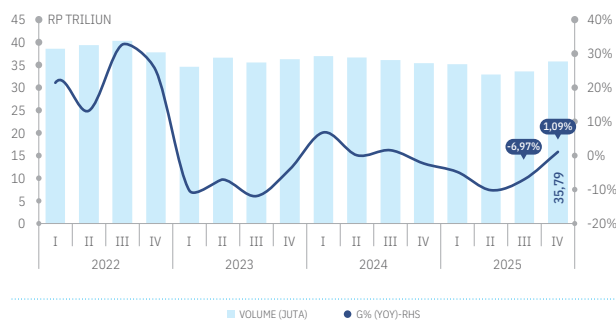
Struktur transaksi kartu ATM/Debit masih didominasi oleh aktivitas tarik tunai sebesar Rp20,01 triliun atau sekitar 41% dari total nominal transaksi. Selanjutnya, transfer intrabank tercatat sebesar Rp12,42 triliun (26%), setor tunai Rp7,63 triliun (16%), transfer antarbank Rp6,36 triliun (13%), transaksi belanja Rp1,85 triliun (4%), serta transaksi *online* Rp262,95 miliar (1%). Komposisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi kartu di wilayah Sumatera Selatan masih berorientasi pada akses dan pemindahan dana, sementara pemanfaatannya sebagai instrumen pembayaran ritel maupun digital *commerce* relatif terbatas.

Grafik 5.6. Jumlah Nominal Kartu ATM/D



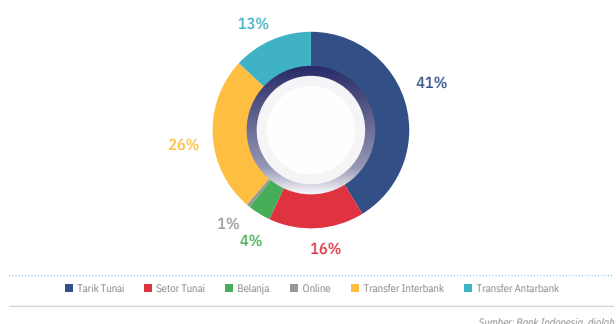
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.7. Volume Transaksi Kartu ATM/D



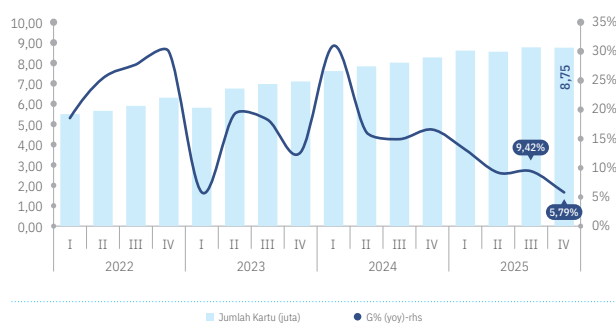
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.8. Pangsa Transaksi ATM/D



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.9. Jumlah Kartu ATM/D



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Jumlah kartu ATM/Debit yang beredar juga terus mengalami pertumbuhan dan saat ini telah mencapai 8,75 juta kartu atau tumbuh sebesar 5,79 (yoy) (Grafik 5-9).

Secara keseluruhan, peningkatan transaksi kartu ATM/Debit, baik dari sisi nilai, volume, maupun jumlah kartu yang beredar, menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran di Sumatera Selatan telah menguat namun masih berada pada fase transisi. Pergeseran perilaku menuju transaksi nontunai berlangsung progresif, tetapi ketergantungan pada layanan berbasis tunai masih substansial sehingga diperlukan penguatan literasi, perluasan akseptansi, dan peningkatan integrasi layanan untuk mendorong migrasi yang lebih cepat menuju ekosistem pembayaran digital.

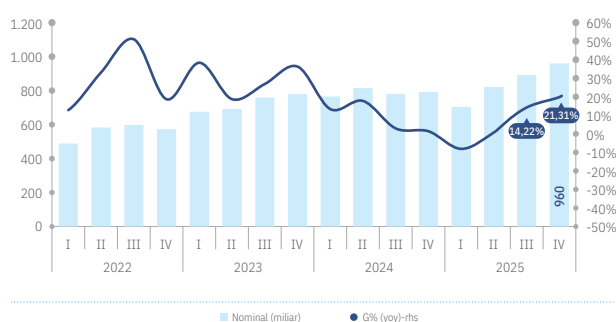
Pada triwulan IV 2025, transaksi kartu kredit di Sumatera Selatan tercatat terus tumbuh positif. Dari sisi nominal, total transaksi tercatat sebesar Rp959,50 miliar atau tumbuh 21,31% (yoy), terakselerasi dibandingkan pertumbuhan 14,22% (yoy) pada triwulan III 2025. Volume transaksi juga menunjukkan penguatan sebesar 22,33% (yoy) menjadi 1.047.244, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 13,53% (yoy) (Grafik 5-10). Dari sisi volume, transaksi kartu kredit mencapai 964.732 atau tumbuh sebesar 22,33% (yoy) (Grafik 5-11). Kinerja ini menunjukkan

peningkatan konsumsi masyarakat melalui instrumen kredit secara konsisten baik dari sisi nilai maupun frekuensi.

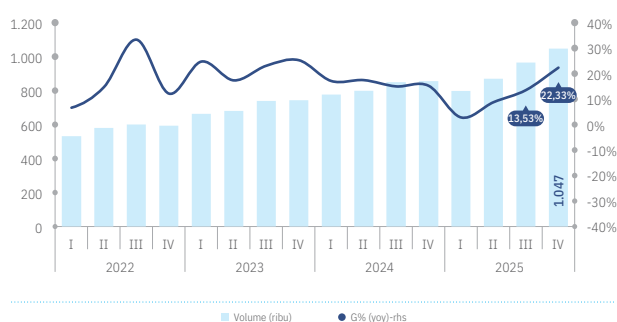
Berdasarkan struktur penggunaannya, kartu kredit masih didominasi oleh transaksi belanja dengan nilai Rp940,58 miliar atau 98,03% dari total, diikuti transaksi tarik tunai sebesar Rp15,37 miliar (1,60%) dan pembayaran tagihan (bill pay) Rp3,55 miliar (0,37%). Pola ini mengindikasikan bahwa fungsi utama kartu kredit tetap sebagai instrumen konsumsi ritel, dengan pemanfaatan untuk layanan lain relatif terbatas. Dinamika tersebut sejalan dengan arah transformasi sistem pembayaran sebagaimana diamanatkan dalam BSPI 2030, yang mendorong diversifikasi instrumen dan peningkatan pengalaman pengguna (*consumer experience*).

Meskipun ekosistem pembayaran digital berbasis akun terus berkembang, kartu kredit masih mempertahankan relevansinya sebagai instrumen yang menawarkan fleksibilitas pembayaran, manfaat tambahan seperti *reward* dan cicilan, serta persepsi nilai tambah bagi pengguna. Dengan demikian, penguatan transaksi kartu kredit tidak hanya mencerminkan optimisme konsumsi rumah tangga, tetapi juga menunjukkan bahwa instrumen kartu tetap menjadi bagian integral dari ekosistem pembayaran dalam fase transisi menuju digitalisasi yang lebih maju.

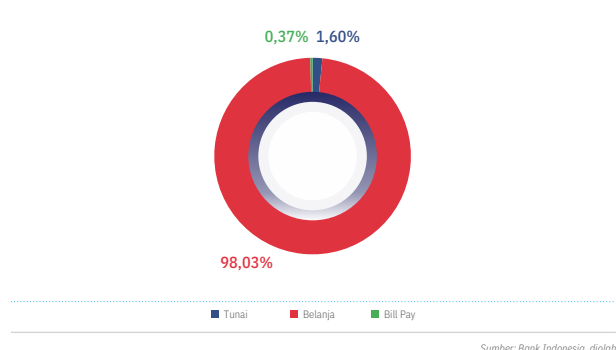
Grafik 5.10. Nominal Transaksi Kartu Kredit



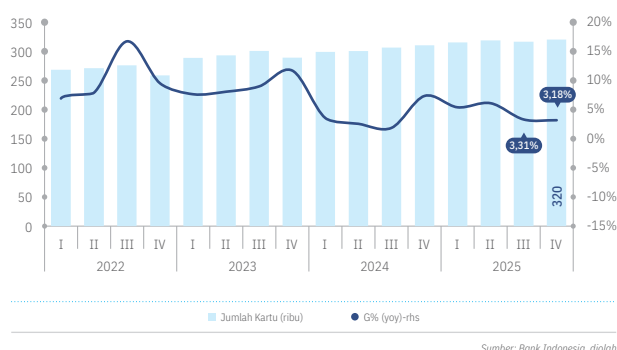
Grafik 5.11. Volume Transaksi Kartu Kredit



Grafik 5.12. Pangsa Transaksi Kartu Kredit



Grafik 5.13. Jumlah Kartu Kredit



5.3. Perkembangan Transaksi Elektronifikasi dan E-Commerce

Sejalan dengan percepatan transformasi digital, Bank Indonesia konsisten memperluas ekosistem transaksi nontunai di sektor ritel untuk mendorong efisiensi sistem pembayaran sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di Sumatera Selatan. Dalam konteks tersebut, uang elektronik (UE) terus menunjukkan kinerja yang menguat dan menjadi salah satu instrumen utama yang menopang aktivitas pembayaran sehari-hari.

Pada triwulan IV 2025, nilai transaksi UE di Sumatera Selatan tercatat Rp3,95 triliun, tumbuh 32,77% (yoy). Dari sisi volume, transaksi UE terakselerasi, meningkat 26,03% (yoy) menjadi 36,53 juta transaksi, lebih tinggi dibandingkan 30,79 juta volume transaksi pada periode sebelumnya.

Selain peningkatan transaksi, jumlah uang elektronik yang beredar di Sumatera Selatan juga menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Jumlah uang elektronik yang beredar di Sumatera Selatan tumbuh menjadi 8,43 juta pada triwulan laporan, atau 171,45% (yoy) (Grafik 5-14). Peningkatan mencerminkan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen digital, diperkuat oleh strategi promosi dan insentif dari penyedia layanan pembayaran.

Dari sisi infrastruktur, dukungan terhadap ekosistem pembayaran digital juga terus menguat. Jumlah *reader* uang elektronik tercatat sebanyak 3.487 unit atau tumbuh 7,89% (yoy). Pertumbuhan ini mencerminkan perluasan titik akseptasi di berbagai sektor, termasuk perdagangan ritel, SPBU, layanan

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi Penggunaan Uang Elektronik di Provinsi Sumatera Selatan

Transaksi	I 2025		II 2025		III 2025		IV 2025	
	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal	Volume	Nominal
Belanja	26.162	2.018	27.312	2.036	29.019	2.222	32.323	2.612
Transfer	3.389	770	3.200	768	3.437	864,7	3.836	1.215
Tarik Tunai	255	89	274	82	339	104	367	126
TOTAL	29.806	3.646	30.786	2.887	30.786	3.191	36.526	3.952

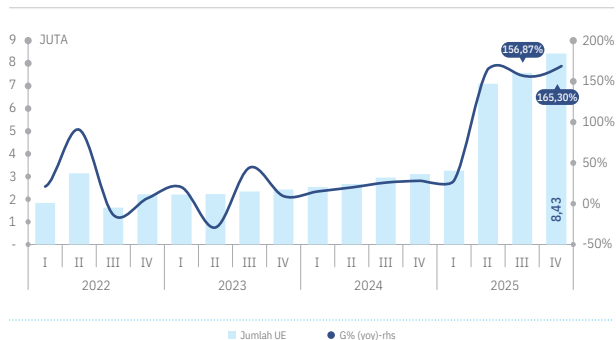
Sumber: Bank Indonesia, diolah

parkir, serta sektor jasa lainnya. Pertumbuhan perangkat *reader* tersebut menunjukkan respons pelaku usaha terhadap peningkatan permintaan transaksi non-tunai serta komitmen untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan kepada konsumen.

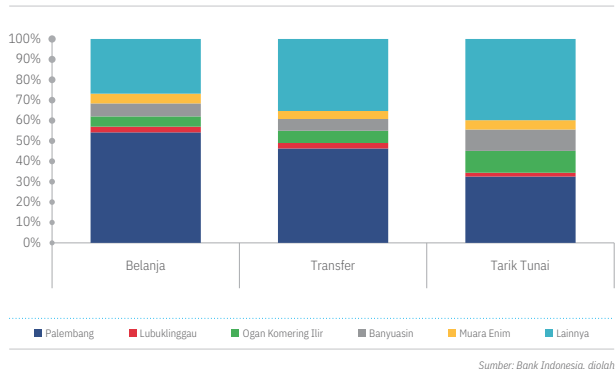
Dari sisi struktur penggunaan, transaksi belanja mendominasi dengan pangsa 66,08% atau Rp2,61 triliun. Transaksi transfer menempati 30,74% atau Rp1,21 triliun, sementara tarik tunai berkontribusi relatif kecil sebesar 3,18% atau Rp125 miliar. Komposisi ini menunjukkan bahwa UE telah berfungsi terutama sebagai instrumen pembayaran ritel dan pemindahan dana, sejalan dengan karakteristik instrumen yang dirancang untuk transaksi bernilai kecil hingga menengah yang cepat dan efisien. Secara keseluruhan, dinamika ini menegaskan bahwa uang elektronik telah menjadi pilar penting dalam akselerasi digitalisasi pembayaran di Sumatera Selatan.

Pada triwulan pelaporan, Kota Palembang menempati posisi tertinggi dalam penggunaan uang elektronik (UE) di Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Secara keseluruhan, Palembang mencatat pangsa 71,56% dari total nilai transaksi UE, serta berkontribusi 61% terhadap total volume transaksi provinsi (Grafik 5-16 dan Grafik 5-17). Tingginya capaian ini mencerminkan peran strategis Palembang sebagai pusat perekonomian dan aktivitas perdagangan di Sumatera Selatan.

Grafik 5.14. Jumlah UE



Grafik 5.16. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Nominal

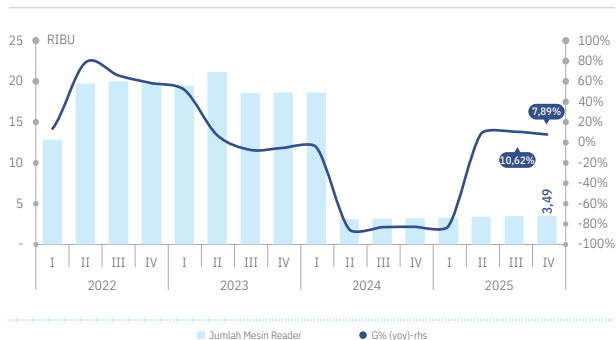


Tingginya capaian kota Palembang didukung oleh keunggulan dalam ketersediaan infrastruktur pembayaran digital yang lebih luas, mulai dari jaringan merchant, mesin pembaca, hingga integrasi dengan berbagai aplikasi layanan keuangan. Selain itu, tingkat adopsi masyarakat perkotaan yang lebih siap terhadap transaksi non-tunai, ditambah peran Palembang sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Selatan, menjadikan kota ini lebih dinamis dalam mengadopsi instrumen pembayaran digital. Dukungan regulasi pemerintah daerah serta kolaborasi aktif dengan Bank Indonesia turut memperkuat posisinya sebagai episentrum pertumbuhan transaksi uang elektronik di provinsi ini.

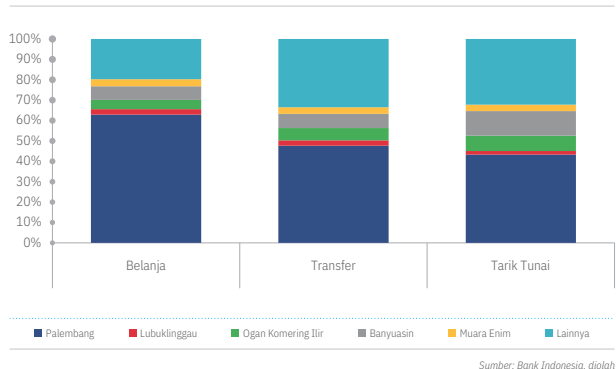
Selaras dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia menetapkan langkah-langkah strategis untuk memperluas ekosistem keuangan digital secara lebih inklusif di seluruh wilayah provinsi, sehingga manfaat penggunaan uang elektronik tidak hanya terpusat di Palembang, tetapi juga dapat mendorong pemerataan transformasi digital hingga ke daerah lainnya.

Perkembangan digilitisasi di seluruh sektor dibarengi dengan peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. Kehadiran QRIS dalam ekosistem pembayaran digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransaksi secara non-tunai dan mendukung peningkatan efisiensi operasional bagi pelaku usaha. Dengan dorongan integrasi yang kian meluas,

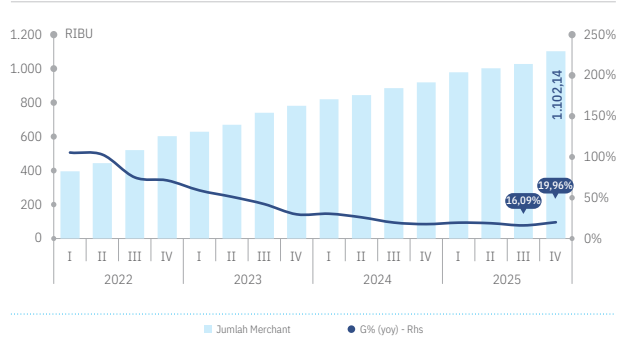
Grafik 5.15. Jumlah UE reader



Grafik 5.17. Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Volume



Grafik 5.18. Jumlah Merchant QRIS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

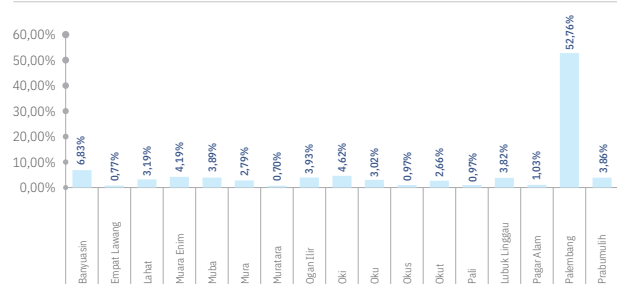
QRIS memberikan pengalaman transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal.

Pada triwulan IV 2025, transaksi melalui QRIS tercatat sebesar 6,39 triliun atau tumbuh 106,86% (yoy), dengan jumlah merchant QRIS di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1.026.948 merchant atau tumbuh sebesar 16,86% (yoy) (Grafik 5-18). Secara lebih rinci, mayoritas merchant QRIS di Provinsi Sumatera Selatan berlokasi di Kota Palembang dengan pangsa mencapai 52,76%. Kabupaten Banyuasin menempati posisi kedua dengan proporsi jumlah merchant sebesar 6,83% dari total merchant di Sumatera Selatan. Di sisi lain, tingginya penetrasi QRIS di Kota Palembang tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, seperti tersedianya infrastruktur dan jaringan konektivitas yang memadai, tingkat literasi serta pemahaman masyarakat yang cukup tinggi terhadap transaksi digital, serta adanya kebijakan dan regulasi pemerintah daerah yang secara aktif mendorong penggunaan QRIS (Grafik 5-19).

Penguatan ekosistem ekonomi digital turut tercermin dari implementasi penyaluran bantuan sosial secara nontunai di Provinsi Sumatera Selatan, terutama melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Pada triwulan IV 2025, bantuan PKH telah disalurkan kepada 351 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nominal sebesar Rp254,16 miliar. Proporsi penyerapan KPM tercatat sebesar 98,98%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 99,17%. Penurunan tingkat penyerapan tersebut antara lain dipengaruhi oleh masih adanya bantuan yang telah salurkan ke rekening KPM namun belum seluruhnya ditarik atau dimanfaatkan, sehingga secara administratif tercatat sebagai tersalurkan tetapi belum sepenuhnya terealisasi sebagai penyerapan (Grafik 5-20).

Efektivitas pelaksanaan PKH turut ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga penyalur, dan pendamping sosial di lapangan. Penguatan validitas data KPM, pengkinian informasi secara berkala, serta peningkatan kapasitas pendamping menjadi faktor penting untuk memastikan bantuan diterima oleh pihak

Grafik 5.19. Persebaran Merchant QRIS

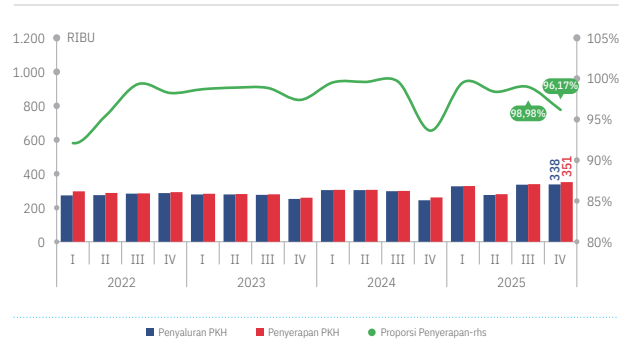


Sumber: Bank Indonesia, diolah

yang berhak. Selain itu, edukasi kepada KPM mengenai pemanfaatan dana secara produktif dan bijak juga perlu terus ditingkatkan agar bantuan yang diterima tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan dukungan koordinasi yang solid dan tata kelola yang baik, PKH diharapkan semakin efektif dalam mendorong pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

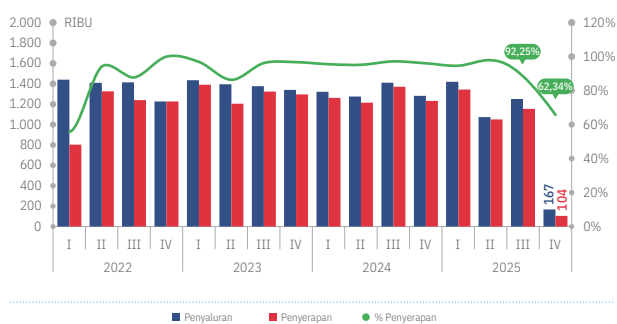
Pelaksanaan Program Sembako sebagai salah satu instrumen bantuan sosial nontunai di Provinsi Sumatera Selatan tetap menunjukkan realisasi yang terjaga. Pada triwulan IV 2025, bantuan Program Sembako secara nontunai telah disalurkan kepada sejumlah 167 ribu KPM dengan total nominal Rp33,40 miliar, dengan persentase penyerapan sebesar 62,34% (Grafik 5-21 & Grafik 5-22). Pada triwulan IV 2025, penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako dilakukan melalui dua skema. Skema pertama berupa penyaluran uang tunai yang dilaksanakan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Skema kedua berupa penyaluran non-tunai melalui bank-bank Himbara, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di Provinsi Sumatera Selatan, implementasi bantuan sosial non-tunai didukung oleh pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan jaringan agen bank yang menjangkau hingga wilayah kecamatan, sehingga

Grafik 5.20. Proporsi Penyaluran Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



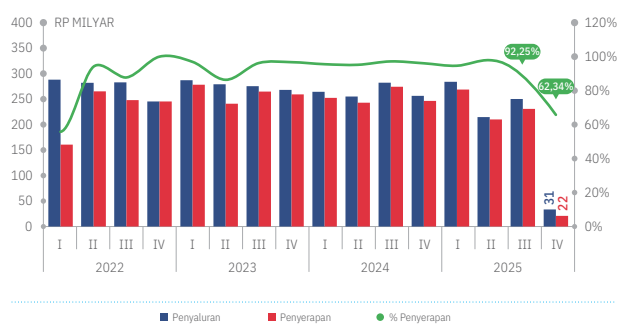
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.21. Proporsi Penyaluran Jumlah KPM Bantuan Sembako



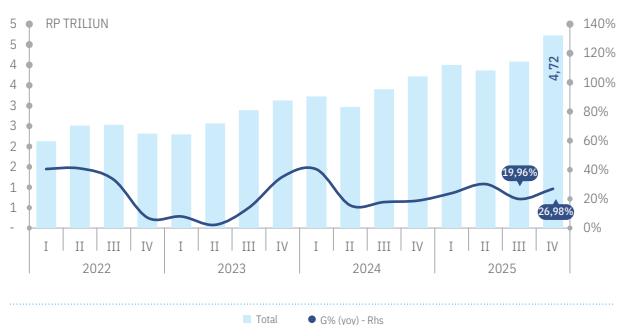
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.22. Proporsi Penyaluran Nominal Bantuan Sembako



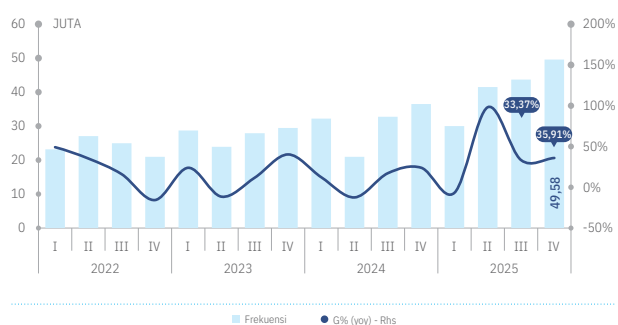
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.23. Nominal transaksi E-commerce



Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

Grafik 5.24. Frekuensi transaksi E-commerce



Sumber: Beberapa marketplace terbesar di Indonesia, diolah

KPM dapat melakukan penarikan maupun pembelanjaan bantuan secara lebih mudah dan aman.

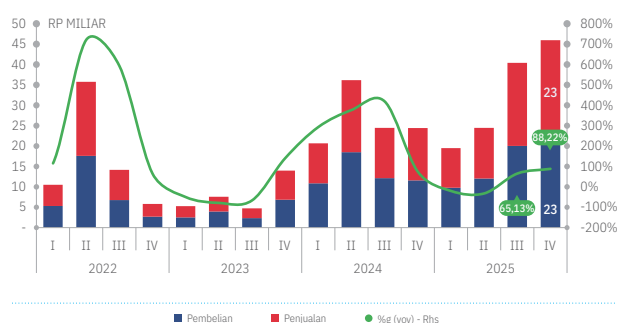
Pada triwulan IV 2025, kinerja transaksi *e-commerce* di Provinsi Sumatera Selatan tetap menunjukkan akselerasi, baik dari sisi nominal maupun volume. Nilai transaksi tercatat sebesar Rp4,72 triliun atau tumbuh 26,98% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,96% (yoy) (Grafik 5-23). Peningkatan tersebut antara lain didorong oleh menguatnya daya beli masyarakat, perluasan basis pengguna *platform digital*, serta semakin beragamnya metode pembayaran elektronik yang memudahkan proses transaksi.

Dari sisi frekuensi, jumlah transaksi pada triwulan laporan mencapai 49,58 juta transaksi atau tumbuh 35,91% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 33,37% (yoy) dengan total 43,68 juta transaksi (Grafik 5-24). Kenaikan volume transaksi ini sejalan dengan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap belanja daring, didukung oleh perbaikan layanan logistik dan promosi yang semakin tersegmentasi.

5.4. Perkembangan Transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan IV 2025, aktivitas jual beli Uang Kertas Asing (UKA) pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin di Sumatera Selatan mencatatkan peningkatan secara tahunan. Total nominal transaksi tercatat sebesar Rp45,94 miliar atau tumbuh 88,22% (yoy). Secara rinci, transaksi pembelian mencapai Rp22,58 miliar dengan pertumbuhan 94,88% (yoy), sedangkan transaksi penjualan sebesar Rp23,36 miliar atau tumbuh 82,19% (yoy). Peningkatan tersebut antara lain sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk

Grafik 5.25. Perkembangan Transaksi KUPVA BB Sumatera Selatan

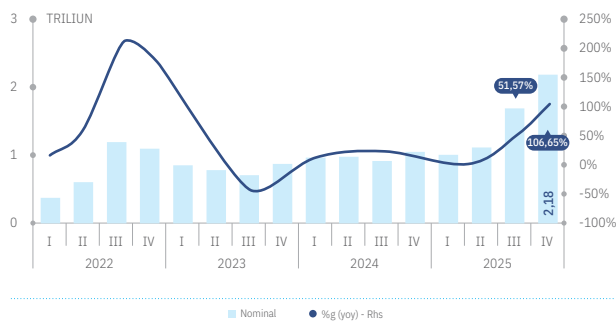


Sumber: Bank Indonesia, diolah

keperluan perjalanan luar negeri, pendidikan, dan aktivitas usaha. Ke depan, perkembangan transaksi KUPVA BB diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika permintaan valuta asing masyarakat dan pelaku usaha, serta perkembangan kanal transaksi yang semakin beragam. Di sisi lain, penguatan tata kelola dan pengawasan oleh Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga kegiatan usaha penukaran valuta asing tetap berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan di daerah.

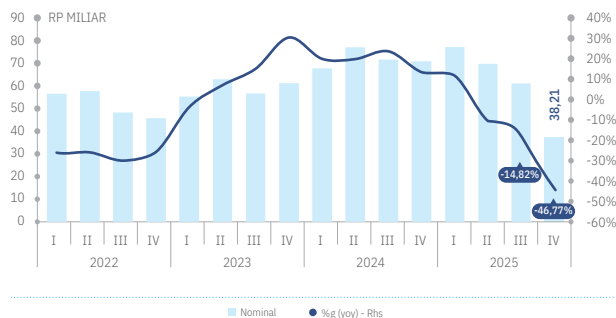
Pada triwulan IV 2025, nominal transfer dana masuk (*incoming*) dari domestik ke Sumatera Selatan mencatatkan pertumbuhan, sementara transfer dana masuk yang bersumber dari luar negeri masih mengalami kontraksi. Pada periode laporan, nominal *incoming* domestik tercatat sebesar Rp2,18 triliun atau tumbuh 101,65% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 51,57% (yoy) dengan nominal Rp1,43 triliun (Grafik 5-26). Sebaliknya, nominal *incoming* yang berasal dari luar negeri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp38,21 miliar atau terkontraksi 46,77% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 14,82% (yoy) (Grafik 5-27).

Grafik 5.26. Transfer Dana Domestik-Incoming



Sumber: Bank Indonesia, diolah

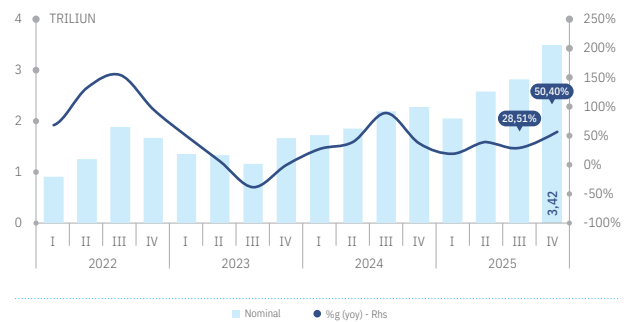
Grafik 5.27. Transfer Dana Luar Negeri-Incoming



Sumber: Bank Indonesia, diolah

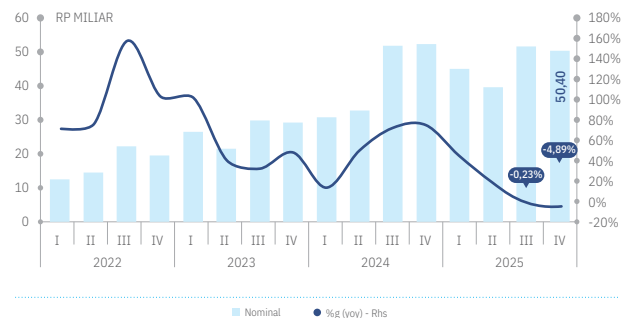
Sejalan dengan perkembangan transfer dana incoming, kinerja transfer dana keluar (*outgoing*) pada triwulan IV 2025 juga menunjukkan pertumbuhan pada transaksi domestik, sementara transaksi ke luar negeri masih mengalami penurunan. Pada periode laporan, nominal *outgoing* domestik tercatat sebesar Rp3,42 triliun atau tumbuh 50,40% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 28,51% (yoy) dengan nominal Rp2,82 triliun (Grafik 5-28). Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas transaksi antarwilayah, termasuk pembayaran kegiatan usaha dan belanja pada akhir tahun. Sementara itu, nominal *outgoing* dari Sumatera Selatan ke luar negeri pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar Rp50,40 miliar atau terkontraksi 4,89% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,23% (yoy) (Grafik 5-29). Namun demikian, dari sisi frekuensi, transaksi *outgoing* ke luar negeri tercatat sebanyak 2,77 ribu transaksi atau tumbuh 7,39% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,81% (yoy). Perbedaan arah antara nominal dan frekuensi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah transaksi ke luar negeri didominasi oleh transaksi dengan nilai relatif lebih kecil.

Grafik 5.28. Transfer Dana Domestik-Outgoing



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.29. Transfer Dana Luar Negeri-Outgoing



Sumber: Bank Indonesia, diolah

BOKS 3 :

Kick Off Semarak Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) Tahun 2026 Kantor Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 13 Februari 2025 – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan (KPw BI Sumsel) menyelenggarakan *Kick Off SERAMBI 2026* dengan tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh Berkah” sebagai bentuk komitmen institusional dalam menjaga ketersediaan uang Rupiah layak edar serta memperkuat kualitas layanan sistem pembayaran di daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan strategis, termasuk unsur pemerintah provinsi, forkompinda Sumatera Selatan, serta pimpinan perbankan di Palembang, yang menunjukkan adanya sinergi kebijakan dan operasional dalam mendukung stabilitas ekonomi regional.

Melalui program SERAMBI 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan Uang Layak Edar sebesar Rp.6,5 triliun, dengan salah satunya menghadirkan 110 titik layanan penukaran uang bekerja sama dengan berbagai perbankan yang tersebar diberbagai lokasi wilayah Sumatera Selatan guna memastikan akses masyarakat terhadap uang layak edar tetap terjaga. Skema ini tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan kebutuhan uang tunai, khususnya pada periode dengan intensitas transaksi yang meningkat.

Sebagai bagian dari strategi perluasan akses, layanan kas keliling retail akan ditempatkan di sejumlah titik strategis, seperti Pasar Sako, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, Stasiun Kertapati, area parkir Palembang Trade Center (PTC Mall), serta rest area tol Palembang. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan mobilitas masyarakat dan tingginya aktivitas ekonomi, sehingga distribusi uang dapat berlangsung secara lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Selain itu rangkaian SERAMBI 2026 juga akan menyelenggarakan kegiatan layanan kas keliling Susur Sungai Musi dan puncak dari SERAMBI 2026 ini akan dilakukan layanan kas keliling terpadu pada tanggal 09 – 12 Maret 2026 yang akan dipusatkan di area parkir Masjid Agung Palembang dengan bersinergi dengan 6 perbankan kota Palembang dalam melayani 1.000 penukar/ hari yang telah melakukan pendaftaran pada web pintar.bi.go.id dengan total sebanyak 4.000 masyarakat penukar.

Kick Off SERAMBI 2026 tidak hanya menjadi seremoni pembukaan, tetapi juga wujud komitmen Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan kestabilan ekonomi daerah. Dengan sinergi yang solid antara otoritas, perbankan, dan pemerintah provinsi, diharapkan pelaksanaan SERAMBI 2026 dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan.



Gambar 1. Sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono dalam kegiatan *kick off* SERAMBI 2026.



Gambar 2. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, beserta pemerintah provinsi, forkompinda Sumatera Selatan dan perbankan melakukan simbolis pelepasan mobil kas keliling dalam kegiatan layanan kas keliling.





Perkembangan Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Daerah



Pada triwulan IV 2025, indikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi membaik.

- Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) pada November 2025 tercatat sebesar 6,70 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2025 sebesar 6,67 juta orang.
- Indikator pengangguran juga membaik, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,59%.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) sebelumnya sebesar 127,77 menjadi 130,00.
- Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan pendapatan masyarakat saat ini lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu dan tetap optimis akan meningkat ke depan.
- Pada September 2025, tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan menurun menjadi 8,91%, lebih rendah dibandingkan 10,15% pada Maret 2025.

6.1. Kondisi Ketenagakerjaan

Pada triwulan IV 2025, kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terkonfirmasi dari beberapa indikator, seperti peningkatan jumlah penduduk usia kerja, penduduk bekerja, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Sumatera Selatan pada periode pelaporan terakhir.

6.1.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Sejalan dengan penambahan penduduk, jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) di Sumatera Selatan pada November 2025 tercatat sebesar 6,70 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2025 sebesar 6,67 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yang mencapai 4,78 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 1,92 juta orang. Dibanding Agustus 2025, jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk bekerja masing-masing bertambah sebanyak 114,23 ribu orang dan 115,09 ribu orang. Sementara, jumlah pengangguran berkurang 870 orang.

6.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK di Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. TPAC Sumatera

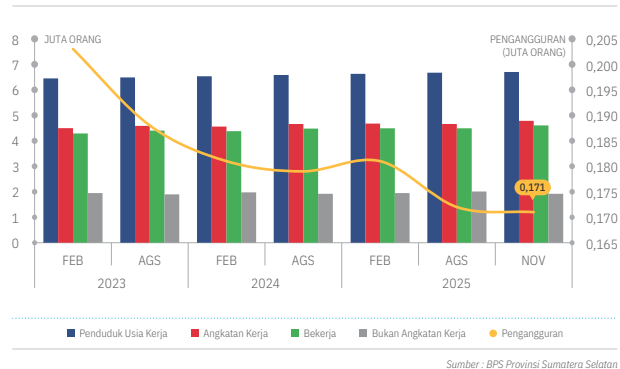
Selatan pada November 2025 mencapai 71,36%, naik sebesar 1,48% poin dibanding Agustus 2025.

Berdasarkan jenis kelamin, pada November 2025, TPAK laki-laki sebesar 85,56% lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 56,71%. Angka TPAK laki-laki dan perempuan pada triwulan laporan menunjukkan peningkatan dibanding Agustus 2025 yang masing-masing sebesar 84,82% dan 54,46%. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan partisipasi tenaga kerja pada kedua kelompok gender, dengan peningkatan yang relatif lebih besar terjadi pada perempuan.

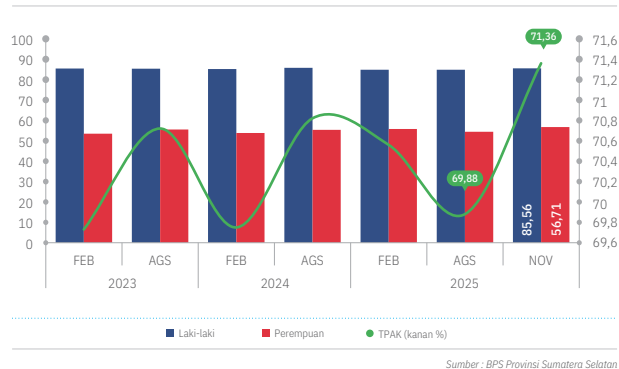
6.1.3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, yaitu LU Pertanian; Perdagangan besar dan eceran; dan Kontruksi. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja dalam pasar. Berdasarkan Sakernas November 2025, tiga LU yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sumatera Selatan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 44,15%; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,42%; serta Konstruksi sebesar 5,74%. Faktor

Grafik 6.1. Perkembangan Beberapa Indikator Ketenagakerjaan Sumatera Selatan (Juta orang), 2021-2025



Grafik 6.2. Perkembangan TPAK di Sumatera Selatan, 2023-2025 (dalam %), 2023-2025



Grafik 6.3. Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Sektoral di Sumatera Selatan (%)



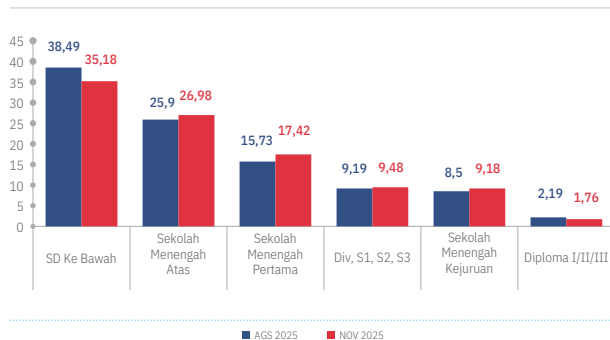
pendorong penyerapan tenaga kerja terbesar di LU pertanian ini adalah tingginya permintaan produk pertanian serta kehutanan di pasar lokal dan ekspor, yang didukung oleh cuaca yang lebih kondusif mendorong produktivitas pertanian didukung oleh bendungan dan jalur irigasi.

Dibandingkan Agustus 2025, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Jasa Pendidikan (49,51 ribu orang); Kontruksi (16,95 ribu orang), Treatment Air, Sampah, dan Daun Ulang (13,63 ribu orang). Komposisi tenaga kerja LU Jasa Pendidikan menunjukkan peningkatan sejalan dengan upaya pemerintah daerah Provinsi Sumsel meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara, peningkatan signifikan dalam sektor konstruksi dipengaruhi oleh aktivitas investasi yang terus terakselerasi serta didorong oleh implementasi Program Prioritas Nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memberikan efek berganda terhadap permintaan kontruksi untuk pembangunan fasilitas pendukung. Sementara, lapangan usaha yang mengalami penurunan terbesar adalah Industri Pengolahan yaitu sebesar 15,81 ribu orang, yang menjadi perhatian tersendiri di tengah perannya sebagai sektor prioritas hilirisasi.

6.1.4. Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar penduduk bekerja di Sumatera Selatan pada November 2025 masih didominasi oleh pekerja berpendidikan rendah. Sebanyak 35,18% penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, namun proporsinya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebaliknya, proporsi pekerja dengan pendidikan menengah atas, kejuruan, dan tinggi (SMA dan Universitas) mengalami peningkatan, menunjukkan arah perbaikan kualitas SDM dalam jangka panjang. Kelompok lulusan diploma dan sarjana menyumbang 11,24% dari total pekerja, menjadi potensi basis tenaga terampil yang mendukung sektor formal dan industri strategis.

Grafik 6.4. Penduduk Bekerja di Sumatera Selatan Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)



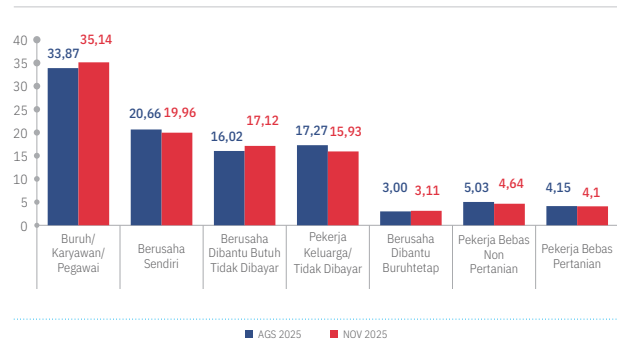
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

6.1.5. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Berdasarkan status pekerjaan utama, pada November 2025, penduduk bekerja paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,14%, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,11%. Dibandingkan Agustus 2025, status pekerjaan yang meningkat dengan persentase terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,28%. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar pada status pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,34%.

Pada November 2025, penduduk bekerja pada kegiatan informal sebanyak 2,85 juta orang (61,75%), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,76 juta orang (38,25%). Dibandingkan Agustus 2025, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan sebesar 1,38%.

Grafik 6.5. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

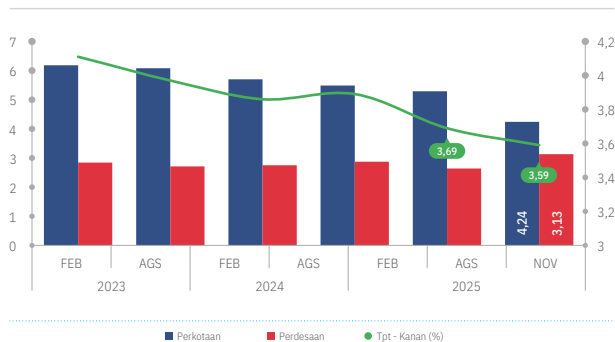


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

6.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan pada November 2025, yang tercermin dari penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 3,59%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar 3,69%. Pada November 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,10% dibandingkan dengan Agustus 2025. Dengan angka TPT yang tercatat sebesar 3,59%, Provinsi Sumsel lebih rendah dibandingkan TPT nasional yang sebesar 4,85%. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja dan kebijakan pengurangan pengangguran yang diterapkan selama ini cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 3,43%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,83%. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,13 poin, sementara TPT perempuan menurun sebesar 0,08 poin dibandingkan dengan Agustus 2025. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan (4,24%) lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (3,13%). Dibandingkan dengan Agustus

Grafik 6.6. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Selatan, 2023-2025 (dalam %)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

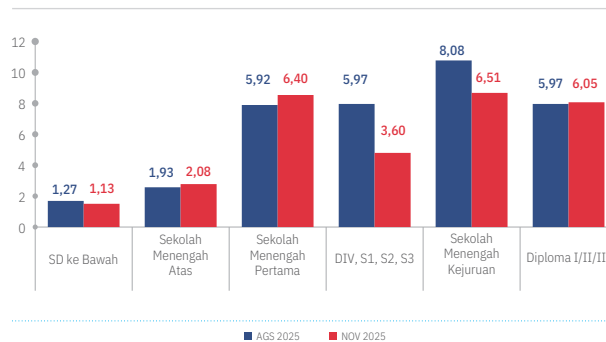
2025, TPT di perkotaan menunjukkan penurunan signifikan sebesar 1,05% poin, sedangkan TPT di perdesaan naik sebesar 0,50% poin. TPT perkotaan yang lebih tinggi mencerminkan adanya *mismatch* keterampilan atau kebutuhan kerja formal yang belum optimal di wilayah urban.

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh angkatan kerja, pola TPT pada Agustus 2025 hampir sama dengan yang terjadi pada Agustus 2025. Pada November 2025, TPT tertinggi ditemukan pada tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 6,51%. Sementara itu, TPT terendah terdapat pada pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,13%. Lulusan SMK yang mencatatkan TPT tertinggi mengindikasikan tantangan *link* dan *match* antara dunia pendidikan vokasi dan kebutuhan pasar kerja.

Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan Sumatera Selatan pada Triwulan IV 2025 menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk bekerja, naiknya TPAK, serta menurunnya TPT yang berada di bawah rata-rata nasional. Struktur ketenagakerjaan juga mengindikasikan pergeseran positif, antara lain meningkatnya proporsi pekerja formal dan bertambahnya tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural masih perlu menjadi perhatian, seperti dominannya pekerja berpendidikan rendah, tingginya pangsa sektor informal, serta relatif tingginya TPT lulusan SMK yang mengindikasikan perlunya penguatan *link* dan *match* antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia usaha.

6.1.7. Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

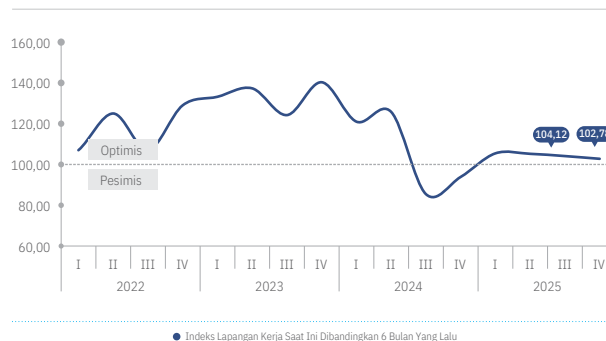
Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan IV 2025, Nilai Saldo Bersih tertimbang (SBT) Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja sebesar 20,75%, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III yang sebesar 8,22%. Peningkatan utamanya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Industri Pengolahan.

Grafik 6.7. Komposisi TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (dalam %)

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Sedangkan berdasarkan hasil Survei Konsumen triwulan IV 2025, Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini dibandingkan 6 bulan yang lalu tercatat sebesar 102,78, menurun terbatas dibandingkan Triwulan III 2025 yang sebesar 104,12. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya moderasi persepsi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja dalam jangka pendek, sejalan dengan pola musiman pasca periode puncak aktivitas ekonomi pada triwulan sebelumnya.

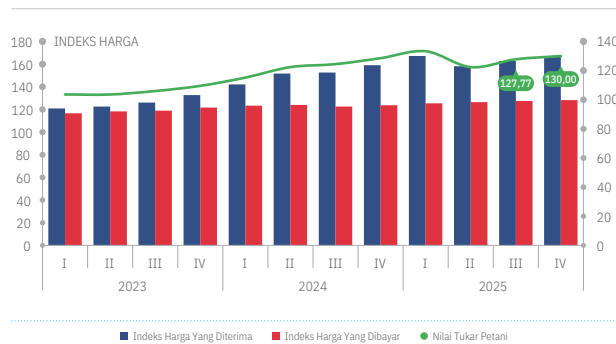
Meski demikian, indeks yang masih berada di atas level optimis (100) menunjukkan bahwa secara umum rumah tangga masih menilai kondisi lapangan kerja lebih baik dibandingkan enam bulan sebelumnya. Hal ini konsisten dengan indikator ketenagakerjaan aktual yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk bekerja serta penurunan TPT pada periode laporan.

Grafik 6.8. Indeks Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu

Sumber : Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia

6.2. Kondisi Kesejahteraan

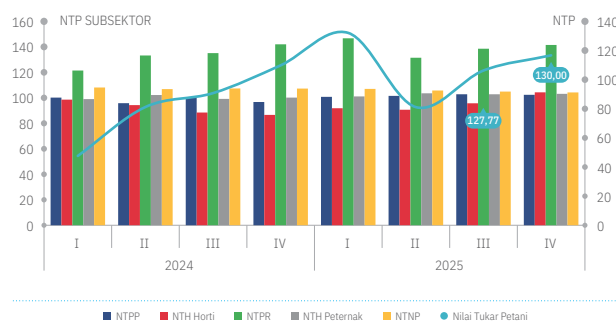
Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya petani mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks Nilai Tukar Petani (NTP). Perkembangan NTP Sumatera Selatan pada triwulan IV meningkat dibandingkan NTP triwulan sebelumnya, yaitu dari 127,77 menjadi 130,00 (Grafik 6-9). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan atau daya beli petani meningkat dimana

Grafik 6.9. Indeks Harga yang Diterima, Indeks Harga yang Dibayar dan Nilai Tukar Petani

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

nilai tukar produk yang dihasilkan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani meningkat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya produksi pertanian.

Peningkatan NTP pada triwulan IV 2025 terutama bersumber pada peningkatan NTP Hortikultura (NTPH), NTP Perkebunan Rakyat (NTPR), dan NTP Peternakan (NTPPT) (Grafik 6-10). NTPH pada triwulan IV 2025 tercatat 104,33 mengalami kenaikan tertinggi sebesar 8,59% poin dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 95,74. NTPR menunjukkan nilai sebesar 141,49, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 138,52. Selanjutnya, NTPPT menunjukkan nilai sebesar 103,12, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

Grafik 6.10. Nilai Tukar Petani Per Subsektor

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6.1. Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan Yang Lalu Triwulan IV 2025

Bulan	Penghasilan Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
OKT	21	273	6	300
NOV	16	280	4	300
DES	22	272	6	300
Jumlah	59	825	16	900
Persentase	6,56%	91,67%	1,78%	100,00%

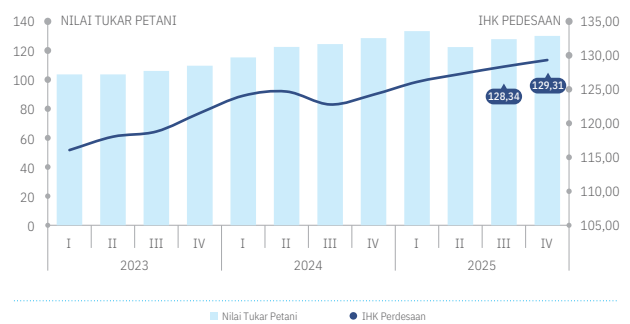
Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

sebesar 102,80. Beberapa komoditas penyumbang kenaikan NTPH triwulan IV 2025 a.l cabai merah, cabai rawit, dan terung. Sedangkan NTP subsektor yang mengalami penurunan yaitu subsektor tanaman pangan dan perikanan.

NTP pada triwulan laporan masih berada di atas angka 100 yang mencerminkan bahwa petani dalam kondisi surplus yaitu harga yang diterima oleh petani lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang dibayarkan oleh petani. Indeks Harga yang diterima Petani (It) tercatat sebesar 166,76 pada triwulan IV 2025 mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya sebesar 162,82, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang meningkat sebesar 0,85% poin, dari sebelumnya sebesar 127,43 menjadi 128,28.

Pada triwulan IV 2025, Indeks Harga Konsumen (IHK) Pedesaan Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar 129,31 mengalami kenaikan sebesar 4.10% (yoy) (Grafik 6-11). Peningkatan ini dipengaruhi oleh kenaikan kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau; Pakaian dan Alas Kaki; Perlengkapan, serta Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga.

Sejalan dengan itu, Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan saat ini lebih baik dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu (Tabel 6-1). Sebanyak 6,56% responden menyatakan bahwa penghasilan mereka pada triwulan laporan lebih baik dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya. Sementara

Grafik 6.11. Perkembangan NTP dan Inflasi Pedesaan Sumatera Selatan

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 6.2. Penghasilan Konsumen Terhadap Penghasilan 6 Bulan Yang Akan Datang Triwulan IV 2025

Bulan	Perkiraan Penghasilan 6 Bulan Mendatang Dibandingkan Saat Ini (Jml Responden)			
	Lebih Baik	Sama	Lebih Buruk	Jumlah
OKT	51	248	1	300
NOV	55	245	0	300
DES	81	218	1	300
Jumlah	187	711	2	900
Persentase	20,78%	79,00%	0,22%	100,00%

Sumber: Survei Konsumen Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumatera Selatan

itu, 1,78% responden menyatakan penghasilan saat ini justru menurun/lebih buruk dibandingkan dengan kondisi 6 bulan sebelumnya.

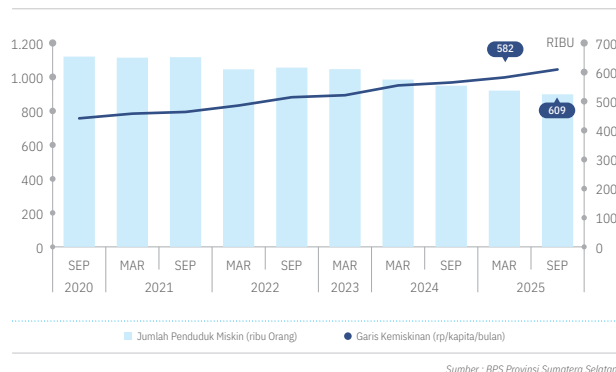
Berdasarkan hasil Survei Konsumen, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan masih optimis bahwa penghasilan mereka ke depan akan relatif lebih baik. Masih solidnya pertumbuhan ekonomi seiring dengan berlanjutnya program bantuan sosial dan adanya peningkatan UMP turut memberikan andil dalam optimisme penghasilan ke depan. Hal ini terkonfirmasi dari sejumlah 20,78% responden berpendapat bahwa penghasilan yang akan diterima pada 6 bulan mendatang akan lebih baik dibandingkan saat ini dan 79,00% responden menyatakan penghasilan yang akan diterima ke depan akan sama atau stabil dibandingkan dengan kondisi saat ini. Sementara itu, sebagian responden lainnya sebanyak 0,22% memperkirakan penghasilan 6 bulan yang akan datang menurun/lebih buruk dibandingkan saat ini (Tabel 6-2). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat masih terus terjaga.

6.3. Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 sebanyak 898,24 ribu orang atau 8,91% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 yang tercatat sebanyak 919,60 ribu orang atau 10,15% dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan (Grafik 6-12).

Adapun penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada periode laporan diiringi oleh peningkatan garis kemiskinan menjadi Rp609.044,00/kapita/bulan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh penyesuaian harga

Grafik 6.12. Perkembangan Penduduk Miskin



kelompok makanan seiring dengan besarnya pangsa kelompok tersebut bila dibandingkan kelompok non makanan.

Berdasarkan lokasi tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan pada periode September 2025. Jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan yang sebanyak 310,56 ribu orang, menurun dibandingkan posisi Maret 2025 sebanyak 314,49 ribu orang. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan pada September 2025 menjadi 587,68 ribu orang dibandingkan posisi Maret 2025 sebanyak 605,12 ribu orang (Tabel 6-3).

Beberapa program pengentasan kemiskinan telah dicanangkan dalam Visi Misi Gubernur Sumsel tahun 2025-2029 yang terdapat pada Program Misi ke-V yaitu mendorong kesempatan kerja yang merata di Sumsel; meningkatkan kualitas tenaga pendamping pertanian yang merata; meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam melahirkan socioecopreneur dari generasi z dan generasi milenial; mendorong kebijakan untuk peningkatan upah minimum regional yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah; dan mendorong pengembangan lembaga mikro, dukungan permodalan usaha, kemudahan perizinan usaha, fasilitasi

Tabel 6.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Tahun	Bulan	Perkotaan		Perkotaan		Perkotaan & Pedesaan	
		Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	%Penduduk Miskin
2020	September	404,43	12,52	715,22	13,25	1.119,65	12,98
2021	Maret	402,25	12,36	711,51	13,12	1.113,76	12,84
	September	393,38	11,99	723,23	13,28	1.116,61	12,79
2022	Maret	371,50	11,23	673,18	12,31	1.044,69	11,90
	September	379,09	11,37	675,9	12,30	1.054,99	11,95
2023	Maret	371,75	11,07	673,93	12,21	1.045,68	11,78
2024	Maret	342,34	10,04	641,9	11,53	984,24	10,97
	September	310,04	9,02	638,81	11,43	948,85	10,51
2025	Maret	314,49	9,1	605,12	10,79	919,60	10,15
	September	310,56	8,91	587,68	9,85	898,24	9,85

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

produk, teknologi usaha, dan kemasan produk dan akses bagi pasar UMKM. Selain itu, adanya program strategis seperti kesejahteraan dan kesehatan perempuan dan anak. Program-program dirancang dan digulirkan dengan harapan kemiskinan dan ketimpangan dapat berkurang signifikan.

6.3.1. Perubahan Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan⁴ Provinsi Sumatera Selatan pada periode September 2025 tercatat sebesar Rp609.044,00/kapita/bulan, meningkat sebesar 4,70% jika dibandingkan dengan Maret 2025 (Tabel 6-4). Pada periode September 2025, peranan kelompok makanan masih jauh lebih besar dibandingkan kelompok bukan makanan. Besar sumbangan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan pada September 2025 adalah sebesar 75,26% sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 24,74%.

Komoditas kelompok makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK pada umumnya hampir sama antara perkotaan dan perdesaan. Beras dan rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni 19,57% dan 8,03%. Di perdesaan, beras memberi sumbangan sebesar 23,31% dan rokok kretek filter 11,52%. Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (5,99% di perkotaan dan 4,26% di perdesaan), daging ayam ras (5,20% di perkotaan dan 4,48% di perdesaan), mie instan (3,19% di perkotaan dan 2,38% di perdesaan), dan seterusnya. Selanjutnya, komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan lainnya.

6.3.2. Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan

Di sisi lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Selatan pada September 2025 tercatat sebesar **1,541, lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,642.** Kondisi ini menunjukkan kesejahteraan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (Rp609.044,00 per kapita per bulan) semakin membaik, dengan jarak semakin sempit antara pendapatan mereka dengan garis kemiskinan tersebut. Sementara, pada September 2025 Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya yaitu dari 0,371 menjadi 0,384, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin lebar (Tabel 6-5).

Secara spasial, pada September 2025, P1 di wilayah perdesaan masih sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Nilai P1 di perdesaan tercatat sebesar 1,549, sementara di perkotaan sebesar 1,529. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perdesaan masih relatif lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan, meskipun kesenjangan semakin menyempit dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, untuk P2, pada September 2025 justru tercatat lebih tinggi di wilayah perkotaan sebesar 0,429 dibandingkan perdesaan sebesar 0,355. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di perkotaan relatif lebih besar dibandingkan dengan di perdesaan pada periode laporan.

Tabel 6.4. Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)								
	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan & Perdesaan		
	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total	Makanan	Bukan Makanan	Total
Mar-20	337.697	131.854	469.551	321.453	100.198	421.650	327.021	112.021	439.041
Sep-20	338.390	132.409	470.800	323.914	100.455	424.369	328.710	112.549	441.259
Mar-21	350.163	135.276	485.439	335.549	105.866	441.415	340.567	116.888	457.455
Sep-21	354.236	137.422	491.658	337.702	108.975	446.678	343.549	119.702	463.251
Mar-22	374.346	141.579	515.925	353.000	114.139	467.139	360.600	124.469	485.069
Sep-22	400.354	148.101	548.455	368.981	124.901	493.882	379.882	133.642	513.524
Mar-23	405.674	150.428	556.102	373.072	127.616	500.688	384.507	136.247	520.754
Mar-24	433.537	156.059	589.596	402.078	131.714	533.792	413.237	140.960	554.197
Sep-24	447.563	155.742	603.305	409.879	131.942	541.821	423.507	140.955	564.462
Mar-25	465.384	159.166	624.550	420.834	136.419	557.253	436.639	145.063	581.702
Sep-25	487.536	166.633	654.169	441.593	140.814	582.407	458.362	150.682	609.044

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

4. Garis Kemiskinan merupakan suatu batas dalam mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

5. Komponen Garis Kemiskinan terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 6.5. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Selatan

Periode	Kota	Desa	Kota & Desa
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2022	1,997	1,938	1,961
September 2022	1,855	1,749	1,789
Maret 2023	1,784	1,688	1,724
Maret 2024	1,688	2,011	1,888
September 2024	1,032	1,705	1,449
Maret 2025	1,484	1,739	1,642
September 2025	1,529	1,549	1,541
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2022	0,472	0,438	0,451
September 2022	0,423	0,364	0,386
Maret 2023	0,433	0,369	0,393
Maret 2024	0,390	0,499	0,457
September 2024	0,178	0,400	0,316
Maret 2025	0,330	0,397	0,371
September 2025	0,429	0,355	0,384

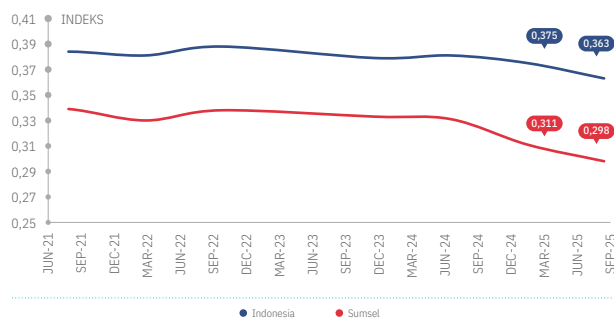
Sumber: BPS Sumatera Selatan

6.3.3. Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

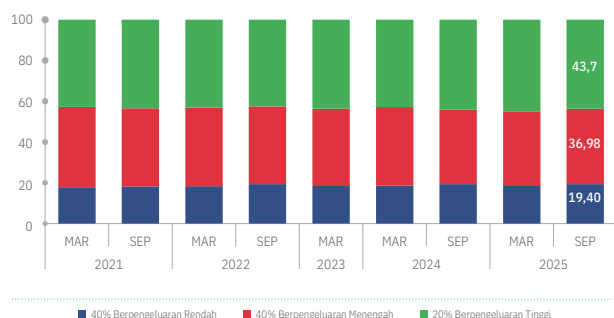
Kondisi ketimpangan pendapatan di Sumatera Selatan menunjukkan penurunan. Hal ini tercermin dari rasio gini yang tercatat sebesar 0,298 tercatat pada September 2025, lebih rendah dibanding periode Maret 2025 yang sebesar 0,311. Kondisi ini menggambarkan terjadinya penurunan kesenjangan ekonomi antar penduduk di Sumatera Selatan.

Rasio gini Sumatera Selatan lebih rendah dari rasio gini nasional yang tercatat sebesar 0,363 (Grafik 6-13). Apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya, posisi Sumatera Selatan menduduki peringkat 13 dengan rasio gini terendah di Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini perkotaan pada September 2025 tercatat sebesar 0,352, menurun dibanding Maret 2025 sebesar 0,370. Sementara itu, di daerah perdesaan, rasio gini tercatat sebesar 0,215, menurun dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,224.

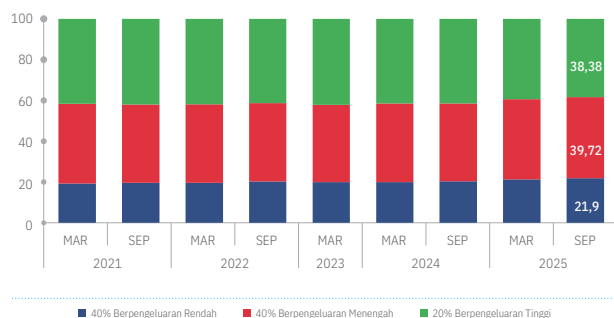
Penurunan rasio gini ini disebabkan oleh menurunnya distribusi pendapatan pada kelompok penduduk 20% berpengeluaran tinggi di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 38,38% pada periode September 2025, menurun dari periode Maret 2025 yang sebesar 39,41% (Grafik 6-14). Adapun distribusi pendapatan kelompok 40% berpengeluaran terbawah pada September 2025 di perkotaan tercatat sebesar 19,32%, menurun dibanding periode Maret 2025 yang tercatat sebesar 18,40% (Grafik 6-15). Selanjutnya, distribusi kelompok 20% berpengeluaran teratas di perdesaan turut mengalami penurunan dari 31,22% pada Maret 2025 menjadi 30,68% pada September 2025 (Grafik 6-16).

Grafik 6.13. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Selatan dan Nasional

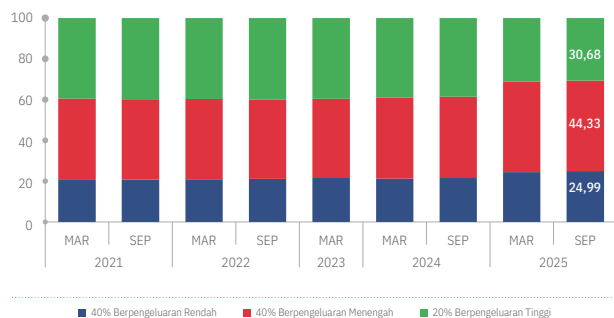
Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 6.14. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 6.15. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perkotaan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah

Grafik 6.16. Distribusi Pendapatan Per Kapita Penduduk Perdesaan

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan, diolah





Prospek Perekonomian Daerah



Di tengah dinamika kondisi geopolitik dan perekonomian global, ekonomi Sumatera Selatan diperkirakan akan tetap tumbuh kuat pada tahun 2026, didukung oleh inflasi yang terjaga pada rentang sasaran.

- Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diproyeksikan berada pada kisaran 5-5,8% (yoy), mencerminkan resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dengan sinergi, inovasi, dan optimisme yang terjaga, potensi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap besar untuk terus dimanfaatkan.
- Ke depan, inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan kembali berada dalam kisaran rentang target inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$, mempertahankan capaian di tahun 2025.
- Untuk memperkuat ketahanan dan mengoptimalkan potensi ekonomi Sumatera Selatan ke depan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, mengakselerasi investasi, mendorong digitalisasi, serta hilirisasi komoditas unggulan Sumatera Selatan.

7.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Keseluruhan Tahun 2026

Perekonomian global pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh resilien, namun dengan laju yang masih moderat dan disertai ketidakpastian yang masih tinggi. Berdasarkan *World Economic Outlook (WEO) update Januari 2026*, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diproyeksikan sebesar 3,30%, relatif stabil dibandingkan 2025, serta sedikit lebih tinggi dibandingkan proyeksi sebelumnya. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa perekonomian global masih mampu bertahan di tengah ketidakpastian yang tinggi, meskipun masih berada di bawah rerata historis jangka panjang. Relatif stabilnya pertumbuhan global tersebut ditopang oleh kombinasi faktor pendukung, antara lain investasi teknologi yang tetap kuat (termasuk terkait AI), dukungan kebijakan makroekonomi di beberapa negara, kondisi keuangan global yang relatif lebih akomodatif, serta kemampuan adaptasi sektor swasta terhadap perubahan lingkungan kebijakan.

Namun demikian, ketahanan pertumbuhan global tersebut masih dibayangi oleh sejumlah faktor yang bersifat sementara dan risiko penurunan yang tetap tinggi. Meredanya dampak *front-loading* perdagangan untuk menghindari tarif dan penumpukan persediaan sejalan dengan penyesuaian pelaku usaha terhadap dinamika tarif berpotensi menahan momentum aktivitas ekonomi ke depan. Di sisi lain, ketidakpastian kebijakan perdagangan dan fragmentasi ekonomi global masih berlanjut, sehingga menahan prospek perdagangan dan investasi. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dunia diperkirakan melambat pada 2026 sebelum kembali meningkat secara bertahap pada 2027. Selain itu, perubahan sentimen pasar keuangan global yang berlangsung cepat tetap menjadi sumber risiko, termasuk melalui potensi pengetatan kondisi keuangan yang lebih besar dari perkiraan.

Inflasi global diperkirakan melanjutkan tren penurunan pada 2026–2027, dengan inflasi headline turun menjadi 3,80% pada 2026 dan 3,40% pada 2027, serta secara umum relatif sejalan dengan proyeksi sebelumnya. Perkembangan tersebut ditopang oleh pelemahan permintaan global dan penurunan harga energi, meskipun proses disinflasi masih berlangsung tidak merata antarnegara. Divergensi inflasi terutama terlihat di Amerika Serikat yang diperkirakan mengalami penurunan inflasi lebih gradual seiring *pass-through* tarif, sementara sebagian besar negara lain menunjukkan pergerakan inflasi yang lebih dekat ke target. Dalam konteks tersebut, arah kebijakan moneter global diperkirakan tetap berbeda antarnegara, bergantung pada dinamika inflasi domestik dan kondisi pasar tenaga kerja masing-masing.

Selain itu, eskalasi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global yang masih tinggi berpotensi

Tabel 7.1. Global Economic Outlook

Wilayah	2024	2025	2026*
World	3,3	3,3	3,3
US	2,8	2,1	2,4
Euro Area	0,9	1,4	1,3
Japan	-0,2	1,1	0,7
China	5	5	4,5
India	6,5	7,3	6,4

Sumber: WEO IMF, *) estimasi

mengganggu rantai pasok dunia serta menahan kinerja perdagangan dan investasi global. Kondisi tersebut dapat mendorong kenaikan harga komoditas, termasuk pangan dan energi, sehingga menahan proses disinflasi global. Sejalan dengan itu, risiko gejolak di pasar keuangan global tetap perlu dicermati, terutama melalui perubahan sentimen yang berlangsung cepat, potensi pengetatan kondisi keuangan global, serta tetap tingginya *yield* surat utang jangka panjang di negara maju. Dalam konteks ini, meskipun dolar AS cenderung melemah, aliran modal ke negara berkembang masih bersifat selektif, sehingga tekanan terhadap nilai tukar dan pasar keuangan domestik dapat tetap muncul sewaktu-waktu.

Di tengah prospek pertumbuhan global yang masih resilien namun dibayangi ketidakpastian, tantangan utama ke depan adalah memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi melalui bauran kebijakan yang kredibel, konsisten, dan dapat diprediksi. Kejelasan arah kebijakan perdagangan antarnegara, transparansi implementasi, serta penguatan pendekatan berbasis aturan (*rules-based*) menjadi penting untuk menurunkan ketidakpastian dan mendukung pemulihan investasi. Sejalan dengan itu, penguatan kerja sama multilateral serta modernisasi arsitektur perdagangan internasional, termasuk yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital, perlu terus didorong guna menopang produktivitas dan pertumbuhan global yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, penguatan diplomasi perdagangan perlu diiringi dengan penyesuaian makroekonomi yang tepat untuk mengurangi ketidakseimbangan eksternal yang persisten dengan tetap menyasar faktor fundamentalnya. Di sisi fiskal, pembangunan kembali *buffer* fiskal dan menjaga keberlanjutan utang tetap menjadi prioritas, khususnya di tengah kapasitas fiskal yang berbeda antarnegara. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal jangka menengah perlu ditempuh secara bertahap dan realistis melalui pengelolaan belanja yang lebih efisien serta penguatan penerimaan. Adapun dukungan kebijakan tambahan perlu dilakukan secara hati-hati, terarah, dan bersifat sementara agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan tidak memperbesar kerentanan keuangan.

Tabel 7.2. Volume Perdagangan Internasional

	2024	2025*	2026*
Volume Perdagangan Internasional	3,8	3,6	2,3
Negara Maju			
Impor	2,1	3,1	1,3
Ekspor	1,8	2,1	1,7
Negara Berkembang			
Impor	5,6	4,3	4
Ekspor	6,5	5,9	3,3

Sumber: WEO IMF, *) estimasi

Prospek perdagangan internasional 2026 diperkirakan masih terbatas, dengan tren pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata historis. Berdasarkan WEO Oktober 2025, volume perdagangan dunia diproyeksikan tumbuh melambat pada 2026 seiring memudarnya efek *front-loading*. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan perdagangan 2025–2026 diperkirakan hanya 2,9%, lebih rendah dibandingkan proyeksi WEO Oktober 2024 sebesar 3,3%, mencerminkan masih kuatnya tekanan proteksionisme dan moderasi permintaan global. Seiring meredanya perilaku *pull-forward*, transaksi berjalan negara-negara utama diperkirakan kembali mengarah pada pola jangka menengah yang lebih berimbang. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa tekanan proteksionisme dan fragmentasi perdagangan masih menjadi risiko utama bagi prospek perdagangan global.

Ke depan, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia tetap dapat terjadi apabila tingginya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi terutama perang dagang terus berlanjut, termasuk dampaknya terhadap kembali naiknya harga energi dan pangan, serta lebih lamanya pengetatan kebijakan moneter khususnya di negara maju untuk mampu menurunkan inflasi kembali ke sasarannya di masing-masing negara.

Untuk mengatasi tingginya dan dampak buruk fragmentasi dan ketidakpastian ekonomi global tersebut, Indonesia melakukan penguatan diplomasi ekonomi internasional dengan meningkatkan kolaborasi lembaga antara bank sentral dan kementerian luar negeri dalam pengelolaan persepsi positif Indonesia untuk mendorong investasi dan perdagangan, perumusan kebijakan luar negeri untuk meningkatkan peran dan kepentingan ekonomi Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi, perluasan konektivitas sistem pembayaran, dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di level internasional. Selain itu, Indonesia juga terus menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan bauran kebijakan dalam berbagai fora internasional.

7.2. Prospek Makroekonomi Keseluruhan Tahun 2026

Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, kinerja perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dan diperkirakan meningkat pada 2026. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada dalam kisaran 4,9–5,7%, didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong aktivitas ekonomi. Dari sisi permintaan, penguatan konsumsi rumah tangga tetap penting untuk menopang permintaan domestik, di samping dorongan investasi yang perlu terus ditingkatkan. Dari sisi eksternal, berbagai upaya peningkatan ekspor dan penguatan daya saing tetap diperlukan untuk meredam dampak perlambatan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan perdagangan. Sejalan dengan itu, sejumlah indikator dan hasil survei terkini menunjukkan prospek yang tetap positif, antara lain keyakinan konsumen, penjualan eceran, PMI manufaktur, serta ekspektasi kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja. Ketahanan sektor eksternal Indonesia juga tetap terjaga di tengah dinamika global, tercermin pada kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang tetap sehat.

Sebagai bagian dari strategi kebijakan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stimulus kebijakan makroprudensial serta akselerasi digitalisasi dalam transaksi pembayaran diperkuat untuk bersinergi dengan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program Asta Cita Pemerintah, yang mencakup pembiayaan ekonomi, digitalisasi, hilirisasi industri, serta ketahanan pangan.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan tetap stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam konteks aliran modal global ke negara berkembang yang masih bersifat selektif serta ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, Bank Indonesia terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter dan memperkuat strategi operasi moneter *pro-market*, termasuk melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, guna menjaga daya tarik aset keuangan domestik, mendorong aliran masuk modal asing, dan memperkuat stabilitas Rupiah. Selain itu, implementasi kebijakan Pemerintah terkait DHE SDA turut mendukung penguatan pasokan valas domestik dan menopang stabilitas nilai tukar.

Dalam aspek inflasi, Bank Indonesia meyakini inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional akan tetap terkendali dalam kisaran 2,5±1%. Inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring

ekspektasi inflasi yang tetap terjangkau, kapasitas perekonomian yang memadai untuk merespons permintaan domestik, serta *imported inflation* yang terkendali melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Perkembangan digitalisasi ekonomi dan sistem pembayaran juga terus mendukung efisiensi distribusi dan transaksi, sehingga turut menopang stabilitas harga. Ke depan, sinergi erat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk melalui penguatan TPIP/TPID, akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas inflasi nasional.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2026 diperkirakan tetap resilien dan menguat pada kisaran 5,0–5,8%. Prospek tersebut sejalan dengan perbaikan ekonomi nasional yang diperkirakan meningkat pada kisaran 4,9–5,7% serta tetap resiliennya perekonomian global, meskipun perdagangan dunia melambat seiring normalisasi pola *front-loading*. Pertumbuhan ekonomi Sumsel di 2026 diperkirakan ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan stimulus fiskal pemerintah pusat, akselerasi program prioritas (Asta Cita) termasuk penguatan ketahanan pangan di Sumatera Selatan, peningkatan produksi migas, serta perluasan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan kelembagaan ekonomi (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih/KDKMP). Dukungan terhadap konsumsi rumah tangga juga diperkirakan tetap terjaga, antara lain seiring penyesuaian UMP dan stimulus pada momen HBKN (diskon tarif transportasi). Namun demikian, laju pertumbuhan Sumsel berpotensi tertahan oleh pelemahan permintaan batu bara di tengah ketidakpastian global, melambatnya perdagangan dunia, normalisasi harga komoditas unggulan, serta terbatasnya penambahan proyek strategis baru, sehingga ruang akselerasi pertumbuhan perlu terus diperkuat melalui sinergi kebijakan dan percepatan investasi.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh pada tahun 2026. Peningkatan UMP Sumatera Selatan yang signifikan sebesar 7,1% mendorong kinerja konsumsi rumah tangga pada tahun 2026. Selanjutnya, kinerja konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi adanya kebijakan diskon listrik PLN yang mendorong peningkatan pendapatan riil masyarakat. Di samping itu, TPIP dan TPID juga terus melakukan upaya pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat. Berlanjutnya penyaluran program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga ikut menopang peningkatan konsumsi RT di tahun 2025. Namun demikian, permintaan masyarakat sedikit tertahan akibat adanya penurunan permintaan global berpotensi menekan harga komoditas ekspor Sumatera Selatan seperti batu bara, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pendapatan pekerja industri dan sektor bisnis terkait.

Konsumsi pemerintah di Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh akseleratif dibanding tahun sebelumnya. Akselerasi tersebut didorong oleh normalisasi realisasi belanja pemerintah pusat pascapenyesuaian/pengetatan pada 2025, serta meningkatnya kebutuhan belanja untuk mendukung program prioritas Pemerintah, khususnya penguatan swasembada/ketahanan pangan, implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG), dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Koperasi Merah Putih. Namun demikian, ruang fiskal daerah pada 2026 tetap menghadapi tantangan seiring informasi penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk 18 Pemda di Sumatera Selatan menjadi Rp24,31 triliun (turun Rp9,31 triliun dibanding 2025 sebesar Rp33,63 triliun), sehingga berpotensi meningkatkan tekanan pembiayaan belanja layanan dasar dan infrastruktur, khususnya apabila PAD belum cukup kuat.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan turut ditopang oleh kinerja investasi (PMTB) yang menguat. Akselerasi investasi terutama didorong oleh berlanjutnya pembangunan infrastruktur strategis, khususnya proyek konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Sumsel, serta progres proyek sumber daya air berupa bendungan dan daerah irigasi yang mendukung ketahanan pangan dan pengendalian banjir. Selain proyek pemerintah, investasi swasta diperkirakan tetap berperan melalui penguatan kapasitas sektor energi dan industri pengolahan. Dari sisi energi, peningkatan kapasitas operasional pembangkit listrik di wilayah Sumsel memperkuat keandalan pasokan listrik regional dan menopang aktivitas ekonomi turunannya. Dari sisi industri pengolahan, keberlanjutan ekspansi/penyelesaian proyek pada industri *pulp* dan kertas serta investasi baru pada hilirisasi komoditas termasuk pengolahan kelapa terpadu diperkirakan turut memperkuat kinerja PMTB Sumatera Selatan pada 2026.

Ekspor Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan tertahan, terutama dipengaruhi oleh faktor sisi penawaran dan logistik komoditas unggulan. Dari sisi produksi, kebijakan pengurangan produksi di 2026 yang termaktub pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara berpotensi menahan fleksibilitas volume produksi dan pengapalan, karena realisasi produksi/penjualan perlu menyesuaikan kuota serta proses persetujuan dan evaluasi RKAB. Kondisi ini menyebabkan ekspor khususnya komoditas batu bara tidak sepenuhnya dapat merespons peluang permintaan dan harga secara cepat, sehingga kinerja ekspor cenderung lebih moderat. Dari sisi distribusi, pemberlakuan pelarangan angkutan batu bara melintasi jalan umum di Sumatera Selatan (mulai 1 Januari 2026) dapat menyebabkan peralihan pengangkutan ke jalan khusus/*hauling* dan skema logistik alternatif, yang pada fase awal berpotensi menurunkan kelancaran pengiriman walaupun

bersifat sementara. Selain itu, berkurangnya ketersediaan bahan baku karet dapat menyebabkan kinerja ekspor produk turunan karet turut tertahan di tahun ini.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan ditopang oleh kinerja beberapa lapangan usaha (LU) utama yang tetap tumbuh solid, terutama LU Pertanian, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi. Kinerja LU Pertanian diperkirakan meningkat sejalan dengan kondisi cuaca yang lebih kondusif dan penguatan dukungan sisi hulu melalui percepatan program ketahanan pangan, antara lain perluasan areal tanam melalui cetak sawah dan pengembangan padi gogo, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta penguatan pendampingan/bantuan sarana produksi untuk mendorong produktivitas. Efisiensi biaya produksi pertanian juga diperkirakan membaik seiring penguatan ketersediaan input dan perbaikan tata kelola distribusi, sehingga mendukung peningkatan output dan pendapatan petani. Selain tanaman pangan, subsektor perkebunan—khususnya kelapa sawit—diprakirakan tetap berkontribusi positif, didukung oleh kebutuhan domestik yang relatif kuat, termasuk dari implementasi program mandatori pemanfaatan biodiesel. Di sisi lain, LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh seiring kuatnya konsumsi rumah tangga, dukungan aktivitas musiman (HBKN), dan UMP yang lebih tinggi. Adapun LU Konstruksi diperkirakan tetap terjaga didorong oleh keberlanjutan proyek infrastruktur pemerintah pusat, meskipun tetap perlu mencermati risiko penyesuaian realisasi belanja modal daerah. Sedangkan dari sisi investasi swasta, berlanjutnya pembangunan pabrik tisu di Kab. OKI dan pabrik *crude coconut oil* di Kab. Banyuasin menjadi sentimen pendorong kinerja LU Konstruksi di tahun ini.

Sementara itu, kinerja LU pertambangan Sumatera Selatan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB diperkirakan mengalami perlambatan pada tahun 2025. Moderasi kinerja tersebut terutama dipengaruhi oleh terbatasnya ruang peningkatan produksi batu bara seiring penyesuaian RKAB 2026, serta friksi distribusi akibat implementasi pelarangan angkutan batu bara melalui jalan umum yang mendorong penyesuaian rantai logistik (peralihan ke jalan khusus/kereta) dan berpotensi menahan kelancaran pengiriman pada fase awal. Selain itu, faktor cuaca (curah hujan ekstrem pada periode awal tahun) juga berpotensi mengganggu aktivitas produksi dan *hauling*, sehingga menahan kinerja sektor pertambangan secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, LU Industri Pengolahan pada 2026 diperkirakan turut tumbuh melambat. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh keterbatasan produksi pada subsektor berbasis komoditas khususnya CPO serta *pulp &*

paper seiring keterbatasan bahan baku akibat kondisi cuaca yang kurang kondusif, sehingga menahan utilisasi/volume produksi. Dengan demikian, meskipun permintaan domestik dan perbaikan harga pada sebagian komoditas tetap menjadi bantalan, kinerja LU Industri Pengolahan pada 2026 diperkirakan tidak sekuat tahun sebelumnya.

7.3. Prospek Inflasi Keseluruhan Tahun 2026

Mencermati dinamika inflasi global yang diperkirakan melanjutkan tren penurunan serta stabilitas inflasi nasional, inflasi Sumatera Selatan pada 2026 diperkirakan tetap berada dalam sasaran inflasi nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi yang relatif stabil tersebut terutama mencerminkan laju perekonomian yang tinggi, namun tetap terkendali seiring dukungan ketahanan pasokan pangan daerah, stabilitas nilai tukar, serta ekspektasi inflasi yang relatif terjaga di tengah ketidakpastian global.

Stabilitas inflasi Sumsel pada 2026 ditopang oleh penguatan sisi pasokan melalui program ketahanan pangan terutama peningkatan produktivitas pertanian, antara lain optimalisasi lahan, perluasan cetak sawah, serta penguatan infrastruktur irigasi dan bendungan yang mendukung kontinuitas produksi sepanjang tahun. Upaya tersebut diperkuat oleh dukungan sarana produksi dan alsintan, perbaikan tata kelola budidaya dan pascapanen, serta penguatan kelembagaan dan pendampingan, sehingga pasokan komoditas pangan strategis lebih terjaga dan tekanan harga dapat diredam.

Meski demikian, sejumlah risiko inflasi tetap perlu dicermati. Dari sisi eksternal, ketidakpastian global dan penyesuaian kebijakan perdagangan berpotensi memicu volatilitas harga komoditas dunia. Kondisi ini dapat mendorong tekanan inflasi impor, termasuk melalui volatilitas harga emas global yang berimplikasi pada harga emas perhiasan, serta potensi kenaikan biaya impor sejumlah komoditas. Dari sisi domestik, kenaikan UMP Sumatera Selatan 2026 sebesar 7,1% berpotensi mendorong penyesuaian harga barang dan jasa serta menguatkan konsumsi rumah tangga, terutama pada fase awal tahun.

Tekanan dari kelompok harga yang diatur pemerintah juga perlu diwaspadai, terutama apabila terjadi kenaikan harga energi global yang mendorong penyesuaian harga energi domestik atau gangguan produksi/distribusi energi yang meningkatkan biaya logistik. Di sisi lain, penetapan/penyesuaian tarif layanan tertentu di wilayah tertentu dapat menambah tekanan harga pada kelompok rumah tangga terdampak. Selain itu, transmisi penyesuaian kebijakan cukai rokok yang telah berjalan sejak 2025 berpotensi masih berlanjut memengaruhi harga rokok di pasar pada 2026.

Dari perspektif keseimbangan risiko, tekanan inflasi dari sisi komoditas pangan pada 2026 cenderung lebih terkendali apabila program peningkatan produktivitas padi dan penguatan langkah pengendalian inflasi pangan berjalan efektif, termasuk penguatan GNPIP, perluasan GSMP (termasuk goes to pesantren), serta penguatan link-matching kelembagaan/aggregator pangan dengan offtaker. Sementara itu, risiko inflasi yang bersumber dari penguatan permintaan dan kenaikan biaya produksi cenderung lebih mengarah ke atas, sejalan dengan sensitivitas terhadap harga energi, dinamika harga komoditas impor tertentu, dan peningkatan aktivitas ekonomi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperkuat melalui pelaksanaan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027, yang mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga melalui operasi pasar dan stabilisasi harga pangan; peningkatan ketersediaan pasokan melalui pengembangan lumbung pangan, perluasan lahan hortikultura, dan optimalisasi irigasi; kelancaran distribusi melalui kerja sama antar daerah dan perbaikan infrastruktur logistik; serta komunikasi efektif melalui penguatan kualitas data dan sosialisasi pengendalian ekspektasi inflasi. Pelaksanaan program GNPIP, kerja sama antardaerah (KAD), subsidi ongkos angkut, dan intervensi pasar terkoordinasi menjadi instrumen kunci menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, dengan koordinasi kebijakan yang kuat dan konsisten, inflasi Sumatera Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam lintasan yang mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi daerah. Penguatan pasokan pangan lokal, efisiensi distribusi, serta pengelolaan risiko harga energi dan komoditas global menjadi kunci keberlanjutan stabilitas inflasi di Sumatera Selatan.

7.4. Rekomendasi

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian di level global, nasional, dan Sumatera Selatan di 2025 dan proyeksi di 2026, seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Selatan perlu memperkuat sinergi dalam memanfaatkan peluang dan mengantisipasi peluang dan tantangan perekonomian. Untuk itu, diperlukan strategi penguatan antara lain:

1) Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi Pangan

Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat lumbung pangan nasional, yang terlihat dari produksi padi 2,83 juta ton di 2023 (tertinggi kelima se-nasional). Pada saat yang sama, beras menjadi penyumbang andil inflasi tahunan tertinggi di Sumatera Selatan. Adapun peluang dan

tantangan dari sisi produksi antara lain masih kurangnya infrastruktur untuk pengembangan lahan rawa untuk pertanian; tingginya biaya produksi terutama dari harga dan ketersediaan pupuk; dan hambatan pada akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan produksi petani. Dari sisi distribusi, inefisiensi logistik dan maraknya sistem ijon dengan tengkulak ditengarai menyebabkan panjangnya rantai distribusi beras di Sumsel. Hal ini tercermin dari tingginya Marginal Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) beberapa komoditas strategis dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, MPP beras mencapai 34,16% dan cabai merah 41,41%, menandakan tingginya disparitas harga dan biaya distribusi antarwilayah.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan pangan maupun pengendalian inflasi. Kolaborasi ini perlu diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan ke depan sesuai Program Asta Cita, yang pada gilirannya mendukung daya beli dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan meliputi:

a) Keterjangkauan Harga

- Perluasan program kios/toko/warung pengendalian inflasi
- Optimalisasi pelaksanaan operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat

b) Ketersediaan Pasokan

- Mendorong produksi pangan lokal
- Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pertanian yang memadai
- Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan nelayan, a.l. melalui KUR

c) Kelancaran Distribusi

- Penguatan sistem distribusi dan rantai pasokan melalui perbaikan tata niaga
- Optimalisasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD)
- Peningkatan kualitas infrastruktur logistik
- Digitalisasi UMKM pangan

d) Komunikasi Efektif

- Diversifikasi komoditas pangan masyarakat
- Mendorong kemitraan antara petani dan industri (*contract farming*)
- Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi

2) Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan masih menjadi tantangan signifikan meskipun telah terjadi tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat

kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 8,91%, yang merupakan pencapaian terendah dalam beberapa tahun terakhir, namun masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di tingkat kabupaten/kota, tujuh daerah sudah mencapai tingkat kemiskinan satu digit, tetapi masih ada beberapa wilayah yang menghadapi kemiskinan ekstrem, terutama di kabupaten seperti Lahat, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, dan Empat Lawang. Masalah utama yang dihadapi adalah ketimpangan dalam akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak, serta ketidakmampuan penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kontribusi besar dari komoditas seperti beras dan rokok terhadap garis kemiskinan.

Untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan, pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan perlu diterapkan antara lain melalui:

a) Menurunkan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin

- Memperkuat jaring pengaman sosial melalui program bantuan sembako dan bantuan tunai dengan penyaluran yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok miskin ekstrem.
- Mengadakan operasi pasar murah secara rutin di kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tinggi guna menekan harga kebutuhan pokok, terutama beras.
- Mengurangi ketergantungan masyarakat miskin pada bantuan dengan mendorong daya beli melalui program-program kemandirian ekonomi.

b) Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin

- Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal, dan pendampingan usaha bagi UMKM.
- Mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
- Meningkatkan inklusi keuangan untuk memastikan masyarakat miskin memiliki akses terhadap layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan asuransi guna mengelola risiko ekonomi dan memanfaatkan peluang usaha.

c) Sinergi Lintas Sektor dan Koordinasi Antarperangkat Daerah

- Memastikan implementasi strategi pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkelanjutan melalui kerja sama lintas sektor.
- Mengoptimalkan peran instansi vertikal dan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi inklusif bagi masyarakat miskin.

3) Mengakselerasi Investasi untuk Mendorong Hilirisasi Komoditas Unggulan

Investasi memegang peran yang sangat krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan. Pada triwulan IV 2025, kontribusi investasi terhadap PDRB mencapai 30,02%, menjadikannya salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Porsi yang signifikan ini menunjukkan bahwa percepatan investasi berpotensi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat dibandingkan komponen PDRB lainnya. Lebih jauh, investasi tidak hanya berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam transformasi ekonomi jangka panjang.

Namun demikian, potensi investasi di Sumatera Selatan belum dapat dioptimalkan sepenuhnya. Beberapa kendala masih perlu ditangani, antara lain belum optimalnya proses realisasi proyek strategis nasional (PSN) maupun proyek swasta, serta keterbatasan insentif fiskal yang dapat ditawarkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dapat mengurangi daya tarik investor, terutama ketika dibandingkan dengan daerah lain yang menawarkan skema insentif dan fasilitas yang lebih kompetitif.

Selain itu, struktur ekonomi Sumatera Selatan hingga kini masih ditopang oleh komoditas unggulan berbasis sumber daya alam mentah, terutama batu bara, kelapa sawit, dan karet. Ketergantungan ini menjadikan perekonomian daerah sangat rentan terhadap gejolak global, baik berupa fluktuasi harga internasional maupun perubahan kebijakan perdagangan di negara tujuan ekspor. Setiap kali terjadi penurunan harga komoditas, tekanan langsung dirasakan pada kinerja ekspor, penerimaan daerah, hingga daya beli masyarakat.

Kondisi ini menegaskan urgensi untuk melakukan hilirisasi komoditas agar perekonomian Sumatera Selatan lebih tahan terhadap guncangan global. Dengan mendorong proses pengolahan lebih lanjut di dalam negeri, nilai tambah komoditas dapat ditingkatkan, penciptaan lapangan kerja lebih luas, serta struktur industri daerah menjadi lebih kokoh. Namun, proses hilirisasi masih menghadapi tantangan, antara lain keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya akses terhadap teknologi modern, hingga infrastruktur logistik yang belum memadai.

Untuk mendorong hilirisasi, optimalisasi investasi menjadi prasyarat utama. Investasi yang masuk perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada penggalian dan ekspor bahan mentah, tetapi juga mendukung transformasi struktural melalui pengolahan lanjutan di daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat *soft infrastructures* dan *hard infrastructures* sebagai penopang iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

a) Penguatan *Soft Infrastructures*

- **Koordinasi tata ruang dan perizinan:** memperkuat sinergi dalam penyusunan RTRW dan RDTR, sekaligus memastikan perizinan investasi berjalan selaras dengan rencana pembangunan daerah.
- **Regulasi insentif fiskal daerah:** mendorong penyusunan kebijakan turunan berupa pengurangan pajak dan retribusi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna meningkatkan daya tarik investor.
- **Optimalisasi sistem OSS berbasis risiko (RBA):** meningkatkan kualitas layanan dan kapabilitas aplikasi OSS agar proses perizinan investasi lebih cepat, transparan, dan efisien.
- **Sinergi pusat-daerah:** memperkuat koordinasi kebijakan antar instansi pemerintah untuk mengurangi tumpang tindih regulasi dan mengatasi hambatan birokrasi.

b) Penguatan *Hard Infrastructures*

- **Infrastruktur konektivitas:** membangun dan memperkuat jalan antarkota, *hauling road*, serta jalur kereta logistik guna memperlancar distribusi bahan baku dan produk olahan. Selain itu, realisasi pembangunan *New Palembang Port* sebagai pelabuhan baru mampu menampung kapal berkapasitas besar, sekaligus mendukung pelabuhan eksisting (Boom Baru).
- **Kawasan industri siap pakai:** memastikan ketersediaan lahan *clean and clear* serta mempercepat pengembangan kawasan industri strategis (KEK Tanjung Api-API, Tanjung Enim, Sriwijaya CBD) agar investor mendapatkan kepastian lokasi usaha.
- **Ketersediaan energi dan air:** menjamin pasokan energi listrik dan air baku yang memadai serta berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan aktivitas industri.

Selain memperbaiki iklim investasi, langkah yang lebih spesifik diperlukan untuk memastikan hilirisasi benar-benar berjalan efektif. Strategi ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan insentif, tetapi juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, teknologi pengolahan yang memadai, serta diversifikasi produk hilir yang mampu bersaing di pasar global. Upaya peningkatan kualitas SDM menjadi kunci, antara lain melalui program *link and match* antara institusi pendidikan dengan kebutuhan industri, pendirian sekolah vokasi dan pusat pelatihan berbasis kemitraan dengan swasta, serta insentif bagi perusahaan yang aktif dalam menyediakan program magang bersertifikat. Di sisi lain, kolaborasi dengan pemerintah pusat, lembaga riset, dan sektor swasta diperlukan untuk

mempercepat transfer teknologi hilirisasi serta pengembangan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Tujuan hilirisasi sendiri mencakup diversifikasi produk olahan dari komoditas unggulan Sumatera Selatan. Batu bara diarahkan pada pengembangan gasifikasi, Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, pupuk, dan bahan kimia dasar. Kelapa sawit ditujukan untuk menghasilkan produk oleokimia, biodiesel, serta pangan olahan. Sementara karet memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk ban kendaraan, sarung tangan medis, hingga kebutuhan industri lainnya. Dengan diversifikasi tersebut, struktur ekonomi akan lebih bernilai tambah, menyerap tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekspor daerah.

4) Mengembangkan Ekonomi Digital

Pengembangan ekonomi digital di Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi beberapa tantangan, yang tercermin dalam penurunan peringkat dalam *East Ventures - Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025*. EV-DCI bertujuan untuk memetakan perkembangan pilar daya saing digital dan sektor yang turut membangun ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia. Sumatera Selatan turun enam peringkat dari peringkat 22 pada tahun 2024 menjadi peringkat 28 pada tahun 2025, dengan skor 37,1. Penurunan ini menunjukkan adanya urgensi perbaikan dalam beberapa aspek daya saing digital, terutama terkait dengan infrastruktur digital dan literasi digital masyarakat. Meskipun terdapat peningkatan pada jaringan 4G di Sumatera Selatan, masih terdapat wilayah dengan *blank spot*, yang membatasi akses masyarakat terhadap layanan internet yang memadai. Selain itu, masih belum optimalnya tingkat literasi digital dan keterampilan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi hambatan utama dalam optimalisasi potensi ekonomi digital di Sumatera Selatan.

Untuk meningkatkan ekonomi digital di Sumatera Selatan, beberapa langkah strategis dapat diambil:

a) Perluasan Infrastruktur Digital

- Memprioritaskan pengembangan infrastruktur digital, terutama di *blank spot* yang belum terjangkau layanan internet yang memadai.
- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah (melalui TP2DD), pemerintah pusat, dan operator telekomunikasi untuk memastikan pemerataan akses internet, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.

b) Peningkatan Literasi Digital

- Menggalakkan program pelatihan digital bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan fokus pada UMKM agar dapat memanfaatkan teknologi untuk pengembangan usaha.
- Memperkuat regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda), yang mendorong penggunaan layanan pembayaran nontunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

5) Mendorong Sektor Ekonomi dan Keuangan Hijau sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Pengembangan ekonomi dan keuangan hijau merupakan salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang berkelanjutan. Sinergi antara Pemerintah Daerah, industri, dan lembaga keuangan diperlukan untuk mendorong proyek-proyek berbasis hijau, baik melalui penyediaan regulasi yang mendukung, pendanaan, maupun insentif fiskal. Dukungan antarpemangku kepentingan akan memastikan bahwa agenda pembangunan hijau tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Adapun LU Pertanian dan UMKM memiliki posisi strategis sebagai lokomotif ekonomi hijau di Sumatera Selatan. Implementasi praktik berkelanjutan di sektor pertanian—misalnya penerapan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk kelapa sawit—dapat meningkatkan daya saing, memperkuat akseptasi produk Sumatera Selatan di pasar internasional, sekaligus memastikan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, integrasi pembiayaan hijau dalam mendukung UMKM dan petani akan membantu mereka mengadopsi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan energi terbarukan atau sistem irigasi hemat energi, sehingga tidak hanya menurunkan biaya produksi, tetapi juga mengurangi emisi karbon.

Untuk mempercepat adopsi praktik ekonomi hijau di tingkat akar rumput, peran *local champion* sangat penting sebagai *role model*. *Local champion* merupakan pelaku UMKM yang memiliki dedikasi tinggi, terbuka pada inovasi, serta mampu mendorong perubahan mindset di komunitasnya. Melalui program *capacity building*, pendampingan, dan *showcasing best practices*, *local champion* dapat menjadi motor penyebaran inovasi hijau ke kelompok-kelompok UMKM lainnya. Dengan sinergi Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia, penguatan kapasitas ini akan memperluas dampak ekonomi hijau secara lebih inklusif.

Selain penguatan di tingkat komunitas, langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah membangun ekosistem pembiayaan hijau yang kokoh. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait dapat memperkuat dukungan insentif bagi UMKM yang mengadopsi praktik berkelanjutan, sekaligus mendorong lembaga keuangan mengembangkan produk pembiayaan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Bank Indonesia telah meluncurkan Kebijakan Insentif **Likuiditas Makroprudensial (KLM)** yang memberikan keringanan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan proyek ekonomi hijau. Dengan plafon insentif yang diperluas hingga 5% dan realisasi ratusan triliun rupiah secara nasional, KLM menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pembiayaan hijau di daerah. Pemanfaatan KLM oleh perbankan di Sumatera Selatan, apabila dipadukan dengan kebijakan insentif fiskal daerah, akan memperkuat aliran kredit ke sektor pertanian berkelanjutan, hilirisasi komoditas, serta UMKM hijau. Sinergi ini tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga mempercepat transformasi ekonomi Sumatera Selatan menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.



3.399



5.165

8.715

3.901

2.999

3.713

1.364

2.164

5.619

7.774

6.377

4.264

6.574

4.023

6.587

5.917



Lampiran

A. Tabel Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Sumatera Selatan (mtm%)													
2023	1	0,35	1,30	0,22	0,18	0,46	0,04	-1,63	0,00	0,13	0,00	0,23	0,99
	2	0,08	-0,08	0,52	-0,22	0,03	0,27	-0,21	0,00	0,09	0,83	0,42	0,84
	3	0,20	0,35	0,02	-0,01	-0,02	-0,02	0,61	0,03	0,03	0,03	0,04	0,36
	4	0,33	0,17	0,23	0,04	0,15	0,00	1,72	0,04	0,04	0,00	0,29	0,47
	5	-0,04	0,58	-0,01	-0,02	-0,03	0,01	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,04	0,08
	6	0,39	1,19	0,11	-0,04	0,04	0,63	0,13	0,01	0,05	0,00	0,20	-0,50
	7	0,29	0,71	0,32	-0,03	-0,28	0,00	0,35	0,00	0,09	0,40	0,00	0,02
	8	-0,04	-0,60	-0,05	0,01	0,04	0,21	0,34	0,00	0,06	1,56	0,03	0,21
	9	0,37	1,06	0,01	0,09	-0,10	0,02	0,02	0,26	0,02	0,00	0,00	0,26
	10	0,50	0,41	0,02	1,81	0,18	0,03	0,27	-0,01	0,08	0,00	0,03	0,30
	11	0,54	1,66	0,02	-0,02	-0,04	0,06	-0,05	-0,02	-0,01	0,00	0,00	0,43
	12	0,15	0,26	0,00	-0,02	0,02	0,08	0,47	0,09	-0,03	0,00	0,01	0,19
2024	1	-0,08	-0,11	-0,80	0,10	0,07	0,21	-0,29	-0,07	-0,24	0,00	0,02	0,33
	2	0,01	0,20	-0,31	-0,05	0,02	0,07	-0,11	-0,11	-0,36	0,01	0,01	-0,08
	3	0,25	0,55	-0,40	0,03	-0,22	-0,03	0,12	-0,14	0,00	0,00	0,55	0,64
	4	0,43	0,13	0,03	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,01	0,00	0,02	0,12
	5	0,06	-0,05	-0,28	0,17	-0,70	0,05	0,04	-0,02	0,00	0,00	0,28	1,01
	6	-0,03	-0,48	0,25	0,28	-0,01	0,17	0,24	0,00	0,43	0,00	0,16	0,26
	7	-0,29	-1,68	0,35	-0,10	0,07	0,62	0,29	0,04	0,82	1,73	0,01	0,68
	8	-0,19	-1,06	0,17	0,03	0,16	0,24	0,32	0,01	-0,02	0,04	0,01	0,84
	9	-0,12	-0,51	-0,03	0,08	0,12	0,08	-0,12	-0,04	0,06	0,04	0,09	0,29
	10	0,09	0,07	0,02	0,11	0,00	0,00	-0,45	0,02	0,20	0,00	0,00	1,34
	11	0,58	1,49	-0,03	0,03	-0,14	0,14	0,40	0,01	-0,36	0,05	0,10	0,93
	12	0,50	1,72	0,00	-0,10	-0,03	0,19	-0,06	-0,01	0,08	0,00	0,03	-0,13
2025	1	-0,36	2,27	-0,21	-8,35	0,02	0,06	0,20	-0,07	0,45	0,00	0,21	0,86
	2	-0,41	-0,79	0,06	-3,58	0,23	0,07	0,51	-0,02	0,20	0,00	0,04	2,71
	3	1,53	1,18	1,15	7,71	-0,04	0,18	-0,17	-0,01	0,04	0,00	0,01	1,98
	4	1,39	0,48	-0,03	6,09	0,09	0,00	0,48	-0,39	0,08	0,00	0,18	4,63
	5	-0,35	-0,81	-0,79	-0,01	-0,11	0,00	-0,11	0,08	0,04	0,00	0,47	-0,86
	6	0,08	-0,10	0,11	-0,03	0,08	0,31	0,02	0,01	0,69	0,00	0,07	0,92
	7	0,14	0,30	-0,15	0,03	0,05	0,05	-0,15	0,00	0,02	0,68	0,06	0,27
	8	-0,04	-0,24	0,01	0,11	0,16	0,01	-0,23	-0,05	-0,07	0,07	0,06	0,44
	9	0,27	0,41	-0,19	-0,01	-0,09	0,10	0,03	0,02	-0,03	0,07	0,06	1,67
	10	0,13	-0,30	-0,11	-0,02	-0,18	-0,06	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	2,95
	11	0,02	0,02	0,00	0,01	-0,07	0,05	-0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,32
	12	0,49	1,06	-0,08	0,06	0,03	-0,01	0,39	0,00	-0,01	0,00	0,13	1,11

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Palembang (mtm%)													
2023	1	0,35	1,32	0,24	0,19	0,51	0,04	-1,72	0,00	0,15	0,00	0,23	1,07
	2	0,09	-0,08	0,57	-0,25	0,03	0,30	-0,23	0,00	0,03	0,86	0,46	0,88
	3	0,21	0,36	0,01	-0,01	-0,04	-0,03	0,63	0,03	0,03	0,04	0,05	0,36
	4	0,33	0,14	0,23	0,02	0,16	0,00	1,82	0,04	0,05	0,00	0,30	0,50
	5	-0,05	0,57	0,00	0,00	-0,03	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,09
	6	0,39	1,24	0,13	-0,05	0,05	0,67	0,15	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,55
	7	0,29	0,72	0,35	-0,04	-0,32	0,00	0,35	0,00	0,08	0,40	0,00	0,02
	8	-0,04	-0,61	-0,06	0,00	0,04	0,22	0,35	0,00	0,06	1,58	0,04	0,21
	9	0,37	1,07	0,01	0,09	-0,11	0,02	0,02	0,26	0,00	0,00	0,00	0,27
	10	0,53	0,41	0,03	1,97	0,19	0,00	0,28	0,00	0,06	0,00	0,03	0,29
	11	0,55	1,74	0,01	-0,01	-0,07	0,07	-0,06	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,44
	12	0,15	0,26	0,00	-0,02	0,02	0,08	0,47	0,09	-0,03	0,00	0,01	0,19
2024	1	-0,02	0,17	-0,05	0,01	0,02	0,17	-0,59	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,27
	2	0,21	0,85	0,01	-0,02	0,04	0,11	-0,13	0,00	-0,05	0,01	0,00	0,03
	3	0,46	1,68	-0,69	0,06	-0,24	-0,19	0,16	0,00	0,00	0,00	0,20	0,34
	4	0,38	0,13	0,01	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
	5	0,10	0,13	-0,02	-0,01	-0,94	0,08	0,25	0,01	0,00	0,00	0,17	1,00
	6	-0,07	-0,56	0,24	0,00	0,03	0,05	0,35	0,00	0,01	0,00	0,19	0,03
	7	-0,31	-2,15	0,25	-0,08	0,08	0,36	0,41	0,05	0,51	1,88	0,00	0,71
	8	-0,27	-1,40	-0,01	0,01	0,21	0,34	0,25	0,00	-0,06	0,06	0,00	0,40
	9	-0,13	-0,68	-0,01	0,05	0,17	0,05	-0,07	-0,03	0,07	0,00	0,13	0,27
	10	0,09	0,14	0,00	0,00	-0,03	0,00	-0,49	0,00	0,28	0,00	0,00	1,55
	11	0,39	0,91	0,18	-0,01	-0,23	0,19	0,52	0,00	-0,45	0,06	0,06	1,02
	12	0,42	1,80	0,03	0,03	0,12	0,26	0,11	0,02	0,40	0,00	0,01	0,32
2025	1	-0,47	2,43	-0,03	-7,70	0,08	0,00	0,18	0,00	0,11	0,00	0,09	0,96
	2	-0,30	-0,78	0,08	-2,94	0,26	0,10	0,59	-0,03	0,30	0,00	0,03	2,88
	3	1,52	1,22	0,36	7,25	-0,09	0,24	-0,22	0,00	0,06	0,00	0,00	2,08
	4	1,33	0,45	-0,04	4,95	0,13	-0,13	0,68	-0,40	0,13	0,00	0,25	4,34
	5	-0,19	-0,49	-0,03	-0,10	-0,21	-0,03	-0,05	-0,02	0,04	0,00	0,69	-0,99
	6	0,09	0,02	0,01	-0,06	0,14	0,40	0,05	0,00	0,00	0,00	0,03	0,81
	7	0,17	0,39	0,01	0,05	0,10	0,01	-0,25	0,00	0,00	0,67	0,08	0,45
	8	-0,07	-0,40	0,03	0,11	0,24	-0,01	-0,25	-0,08	0,01	0,09	0,09	0,32
	9	0,30	0,61	-0,01	0,00	-0,17	0,17	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	1,69
	10	0,16	-0,17	-0,17	0,00	-0,30	-0,09	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
	11	-0,01	0,03	-0,01	0,00	-0,12	0,06	-0,16	0,00	0,09	0,00	0,00	0,19
	12	0,39	0,91	-0,14	0,02	0,04	-0,01	0,42	0,00	0,22	0,00	0,16	0,73

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Lubuklinggau (mtm%)													
2023	1	0,34	1,06	0,04	0,12	-0,03	-0,01	-0,39	-0,14	0,00	0,00	0,05	0,13
	2	0,04	-0,07	0,00	0,16	0,06	0,04	-0,02	0,00	0,61	0,00	0,01	0,26
	3	0,11	0,18	0,04	-0,10	0,04	0,00	0,29	0,04	0,00	0,00	0,00	0,37
	4	0,35	0,62	0,32	0,22	0,08	0,08	0,70	0,00	0,00	0,00	0,07	0,06
	5	0,13	0,72	-0,04	-0,10	-0,08	0,11	-0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
	6	0,25	0,64	0,00	0,07	-0,08	0,00	-0,02	0,15	0,54	0,00	0,00	0,08
	7	0,31	0,68	0,03	0,07	0,13	0,07	0,27	-0,02	0,25	0,44	0,02	0,07
	8	-0,04	-0,45	0,00	0,07	0,02	0,06	0,27	0,10	0,00	1,33	0,00	0,20
	9	0,34	0,92	0,00	0,06	-0,03	0,00	-0,05	0,23	0,28	0,00	0,01	0,24
	10	0,19	0,39	0,00	0,03	0,00	0,39	0,19	-0,12	0,22	0,00	0,00	0,31
	11	0,33	0,90	0,01	0,00	0,26	0,00	0,06	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,35
	12	0,25	0,31	0,00	0,08	0,27	0,39	0,48	0,08	-0,45	0,00	0,13	0,89
2024	1	-0,13	-0,56	0,00	0,08	0,06	0,00	-0,11	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,63
	2	0,20	0,77	0,00	0,02	-0,12	0,10	-0,43	0,05	-0,01	0,00	0,07	0,79
	3	0,30	0,56	0,23	0,05	0,01	0,00	0,19	-0,03	0,33	0,00	0,72	0,25
	4	0,36	0,09	0,03	0,01	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10
	5	0,14	0,28	0,02	0,15	0,19	-0,01	-0,22	-0,05	0,00	0,00	0,14	0,57
	6	-0,10	-0,45	0,00	0,23	-0,06	0,06	0,17	-0,44	-0,16	0,00	0,09	-0,03
	7	-0,31	-1,34	0,09	0,02	-0,08	-0,11	-0,22	0,09	0,00	1,20	0,00	0,91
	8	-0,24	-1,28	0,01	0,07	0,10	0,18	0,11	-0,02	0,00	0,00	0,00	1,55
	9	-0,06	-0,52	0,05	0,08	-0,04	0,04	-0,11	-0,01	0,06	0,58	0,16	0,69
	10	0,02	0,06	0,00	0,04	-0,06	0,15	-0,41	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,69
	11	0,26	0,59	0,00	0,00	0,02	0,02	0,08	0,00	0,00	0,00	0,25	0,93
	12	0,58	1,58	0,00	0,03	0,19	0,03	0,52	0,03	0,00	0,00	0,03	0,20
2025	1	-0,64	1,67	0,00	-8,59	0,42	0,73	0,03	-0,08	0,14	0,00	0,00	0,64
	2	-0,13	0,53	0,00	-4,08	0,75	-0,01	0,30	0,00	0,02	0,00	0,03	1,98
	3	1,41	1,06	0,33	7,67	-0,08	0,08	-0,45	0,01	0,01	0,00	0,13	1,58
	4	1,29	-0,02	0,00	7,31	-0,08	0,00	0,05	-0,46	0,00	0,00	0,26	3,57
	5	-0,21	-1,07	0,00	0,00	0,56	0,39	-0,05	-0,11	0,08	0,00	0,49	0,44
	6	0,11	0,08	0,00	0,00	-0,09	0,34	0,32	0,00	0,61	0,00	0,00	0,48
	7	0,21	0,28	0,50	0,10	0,15	0,00	0,03	0,00	1,36	0,65	0,91	9,16
	8	0,07	0,26	-0,01	0,00	0,01	0,10	-0,41	0,03	0,21	0,10	0,14	0,10
	9	0,27	0,29	0,00	0,00	0,01	0,10	0,23	0,04	0,00	0,75	0,07	1,28
	10	0,09	-0,65	0,06	0,00	0,13	0,02	0,03	0,07	0,02	0,00	0,17	3,11
	11	0,02	-0,23	0,15	-0,08	0,03	0,12	0,05	-0,06	0,04	0,00	0,00	0,88
	12	0,37	0,84	0,03	0,08	0,01	0,01	0,38	0,05	0,02	0,00	0,11	0,64

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Ogan Komering Ilir (mtm%)													
2024	1	-0,11	0,09	-4,36	0,88	0,37	0,33	-0,16	0,00	-0,55	0,00	0,06	0,31
	2	-0,13	-0,22	-0,11	-0,42	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,96	0,00	0,04	0,24
	3	0,05	-0,55	0,20	-0,15	-0,33	0,44	-0,01	-1,04	-0,17	0,00	2,19	2,23
	4	0,42	0,02	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,12	0,12
	5	0,11	-0,08	-1,52	1,67	-0,04	-0,03	-0,03	-0,23	0,00	0,00	0,57	0,83
	6	0,19	-0,57	0,48	2,84	0,00	0,03	-0,05	0,24	2,75	0,00	0,00	1,60
	7	-0,40	-1,55	0,75	-0,37	0,07	2,89	0,00	0,00	3,52	1,61	0,06	1,19
	8	-0,18	-0,97	0,71	0,16	0,00	0,00	0,95	0,00	0,09	0,00	0,00	1,07
	9	-0,16	-0,36	-0,15	-0,01	0,00	0,00	-0,21	-0,11	0,07	0,16	0,00	0,26
	10	0,07	-0,26	0,13	1,35	0,00	0,00	-0,32	0,11	0,18	0,00	0,00	1,03
	11	0,92	2,20	-0,81	0,19	0,00	0,00	0,11	0,00	-0,47	0,00	0,32	0,21
	12	0,70	1,62	0,10	-0,34	0,16	0,00	-0,05	0,00	0,23	0,00	0,06	0,55
2025	1	-0,03	2,16	-1,12	-11,76	-0,07	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,87	0,86
	2	-0,44	-0,40	0,04	-5,57	0,04	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	3	1,68	0,97	5,25	11,47	0,07	0,00	-0,21	-0,05	0,00	0,00	0,02	1,78
	4	1,34	0,19	0,00	10,82	0,01	0,00	-0,13	-0,38	0,00	0,00	0,00	5,56
	5	-0,49	-0,49	-4,36	0,00	-0,01	0,02	~0	0,38	0,00	0,00	0,00	-0,66
	6	0,09	-0,44	0,58	-0,01	-0,03	0,13	-0,20	0,00	4,46	0,00	0,27	12,16
	7	0,05	0,22	-1,07	-0,05	-0,19	0,14	0,20	0,00	0,00	1,07	0,00	0,11
	8	-0,11	-0,48	-0,04	0,21	0,00	-0,13	-0,06	0,00	-0,62	0,00	0,00	1,13
	9	0,03	-0,18	-1,09	-0,11	0,08	-0,25	0,02	0,00	-0,17	0,35	0,32	1,78
	10	0,05	-0,23	0,00	-0,16	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96
	11	0,04	0,08	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
	12	0,67	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,03	0,00	0,00	0,09	1,60

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Muara Enim (mtm%)													
2024	1	-0,28	-1,14	0,00	0,17	-0,05	0,50	1,66	-0,49	-0,96	0,00	0,10	0,58
	2	-0,93	-1,57	-2,28	-0,10	-0,05	-0,11	0,00	-0,80	-1,37	0,00	0,00	-1,03
	3	-0,69	-1,81	0,00	0,03	-0,02	0,44	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,64
	4	0,81	0,25	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14	0,00	0,06	0,00	0,01	0,30
	5	-0,29	-0,75	0,00	0,02	-0,72	0,00	-1,23	0,03	0,00	0,00	0,58	1,55
	6	-0,02	-0,09	0,05	0,01	-0,21	1,12	-0,19	-0,03	0,33	0,00	0,25	0,10
	7	-0,07	-0,30	0,42	0,01	0,12	0,00	0,00	0,02	0,00	0,59	0,00	-0,09
	8	0,24	0,00	0,41	-0,01	0,07	-0,06	0,20	0,01	0,00	0,00	0,05	2,49
	9	-0,02	-0,14	0,01	0,43	0,03	0,30	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
	10	0,12	0,20	0,00	-0,31	0,31	0,00	-0,18	0,07	-0,08	0,00	0,00	0,90
	11	1,28	2,85	0,00	0,26	0,11	0,02	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00	1,31
	12	0,60	1,70	0,00	-0,53	0,00	0,00	-0,02	0,00	-1,60	0,00	0,00	-0,07
2025	1	-0,02	2,06	0,00	-10,14	-0,40	0,14	0,38	-0,45	2,79	0,00	0,00	0,44
	2	-1,02	-1,73	0,00	-6,75	-0,01	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,16	2,85
	3	1,40	1,34	0,00	7,92	0,08	0,15	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99
	4	1,80	1,16	0,00	10,41	0,06	0,18	-0,10	-0,38	0,00	0,00	0,00	5,46
	5	-0,98	-2,19	0,00	0,68	-0,04	-0,11	-0,71	0,43	0,00	0,00	0,00	-0,96
	6	-0,04	-0,13	0,00	0,18	-0,01	-0,05	-0,19	0,02	0,00	0,00	0,00	0,30
	7	0,06	0,15	0,00	0,68	-0,28	0,48	0,20	-0,37	2,22	0,42	0,16	10,23
	8	0,22	0,47	0,00	-0,01	0,03	0,34	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
	9	0,35	0,53	0,00	-0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
	10	0,13	-0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	4,73
	11	0,12	0,00	0,00	0,10	0,02	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12
	12	0,85	1,40	0,00	0,41	0,04	0,00	0,33	0,01	-1,20	0,00	0,00	2,59

B. Tabel Inflasi Tahunan Provinsi Sumatera Selatan

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Sumatera Selatan (yoy%)													
2023	1	5,34	6,63	3,37	1,47	4,78	2,50	14,94	-0,03	5,22	3,77	3,24	6,33
	2	5,43	7,25	3,85	1,14	4,11	1,90	14,32	-0,04	5,23	3,93	3,62	6,74
	3	4,92	5,85	3,67	0,68	3,64	1,82	15,11	0,04	5,23	3,97	3,56	5,99
	4	4,27	4,04	3,30	0,55	2,83	1,76	15,48	0,11	4,78	3,97	3,50	5,22
	5	3,38	3,12	2,74	0,42	2,24	1,37	11,61	0,12	3,51	3,97	3,24	4,05
	6	2,86	1,76	2,73	0,35	1,99	1,87	11,68	0,12	2,67	3,97	2,93	3,34
	7	2,38	0,83	1,95	0,22	1,49	1,74	10,58	0,13	2,66	3,89	2,69	4,02
	8	3,19	3,04	1,83	0,20	1,32	1,80	11,59	0,13	2,12	5,48	2,13	3,87
	9	2,28	4,59	1,69	0,12	0,24	1,25	0,18	0,32	0,54	5,48	1,89	3,81
	10	2,90	6,45	1,61	1,83	0,38	1,21	-0,49	0,31	0,58	2,86	1,52	3,88
	11	3,52	8,43	1,42	1,75	0,43	1,26	-0,17	0,29	0,57	2,85	1,36	4,15
	12	3,17	7,22	1,42	1,77	0,44	1,34	0,07	0,39	0,53	2,85	1,28	3,74
2024	1	3,35	7,71	1,04	1,67	0,06	1,10	0,95	-0,13	2,35	2,18	2,17	3,52
	2	3,15	7,81	0,28	1,64	-0,01	1,30	0,91	-0,21	1,51	1,65	1,51	2,75
	3	3,24	8,13	-0,50	1,83	-0,24	1,34	0,75	-0,38	1,45	1,62	1,78	3,03
	4	9,00	7,61	-1,39	1,84	-0,44	1,19	0,80	-0,47	1,90	1,62	1,82	4,15
	5	2,98	6,64	-1,68	2,02	-1,31	1,24	1,64	-0,52	1,63	1,47	2,05	5,12
	6	2,48	4,44	-1,18	2,30	-1,30	1,26	1,91	-0,51	2,07	1,47	1,97	5,94
	7	1,87	2,02	-1,40	2,17	-0,86	1,92	2,04	-0,28	1,61	2,86	1,59	6,45
	8	1,80	1,72	-1,18	2,17	-0,78	1,65	2,02	-0,26	2,00	1,78	1,56	7,29
	9	1,40	0,47	-1,41	2,17	-0,61	1,73	1,81	-0,42	2,67	1,82	1,53	7,35
	10	1,09	0,20	-1,39	0,70	-0,54	1,71	1,13	-0,39	2,05	1,82	1,40	8,51
	11	0,73	-1,21	-1,17	0,68	-0,64	1,78	1,60	-0,37	1,55	1,87	1,40	1,50
	12	1,20	0,49	-0,48	0,61	-0,67	1,81	1,35	-0,37	1,27	1,87	1,52	8,09
2025	1	0,92	2,89	0,11	7,89	0,72	1,66	1,84	0,37	1,97	1,87	1,71	8,66
	2	0,49	1,87	0,48	-11,15	-0,51	1,66	2,47	-0,28	2,54	1,86	1,74	11,69
	3	1,77	2,50	2,05	-4,32	-0,34	1,88	2,17	-0,15	2,58	1,86	1,20	13,18
	4	2,74	2,60	1,41	1,48	-0,24	1,81	1,69	-0,48	1,98	1,86	1,12	16,44
	5	2,33	1,82	0,89	1,30	0,36	1,76	1,54	-0,38	2,02	1,86	1,31	14,28
	6	2,44	2,21	0,75	0,99	0,45	1,90	1,32	-0,37	2,28	1,86	1,21	15,02
	7	2,88	4,27	0,25	1,11	0,43	1,32	0,87	-0,41	1,47	0,80	1,26	14,55
	8	3,04	5,13	0,10	1,19	0,43	1,09	0,32	-0,47	1,41	0,84	1,30	14,10
	9	3,44	6,11	-0,07	1,10	0,22	1,11	0,46	-0,41	1,32	0,87	1,28	15,67
	10	3,49	5,72	-0,19	0,97	0,04	1,05	0,89	-0,43	1,12	0,87	1,28	17,50
	11	2,91	4,18	-0,17	0,95	0,11	0,96	0,36	-0,44	1,54	0,82	1,18	16,78
	12	2,91	3,50	-0,24	1,11	0,17	0,75	0,82	-0,43	1,46	0,82	1,28	18,23

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Palembang (yoy%)													
2023	1	5,34	6,65	3,44	1,39	4,93	2,47	14,84	0,10	5,35	3,89	3,14	6,42
	2	5,44	7,26	3,97	1,03	4,26	1,84	14,20	0,10	5,33	4,04	3,59	6,93
	3	4,93	5,87	3,82	0,53	3,76	1,75	15,03	0,13	5,36	4,09	3,59	6,12
	4	4,28	3,98	3,43	0,41	2,94	1,70	15,50	0,17	4,93	4,09	3,55	5,38
	5	3,38	3,08	2,83	0,34	2,32	1,27	11,57	0,17	3,66	4,09	3,29	4,13
	6	2,87	1,74	2,82	0,23	2,11	1,86	11,64	0,15	2,82	4,09	3,03	3,34
	7	2,38	0,79	1,99	0,11	1,56	1,72	10,48	0,15	2,77	4,01	2,84	4,12
	8	3,21	3,09	1,85	0,07	1,39	1,83	11,59	0,15	2,18	5,65	2,25	3,94
	9	2,29	4,70	1,71	-0,03	0,20	1,25	0,05	0,33	0,44	5,65	2,01	3,86
	10	2,94	6,53	1,72	1,86	0,39	1,24	-0,61	0,33	0,45	2,90	1,63	4,01
	11	3,56	8,55	1,50	1,82	0,42	1,29	-0,25	0,33	0,45	2,90	1,46	4,29
	12	3,22	7,33	1,51	1,87	0,42	1,36	0,01	0,42	0,45	2,90	1,37	3,79
2024	1	2,54	6,21	1,07	1,95	0,12	0,92	0,57	0,27	0,31	2,13	1,10	3,04
	2	2,63	7,16	0,65	2,11	0,10	1,07	0,53	0,27	0,27	1,57	0,70	2,13
	3	2,90	8,54	-0,06	2,16	-0,20	0,98	0,32	0,23	0,23	1,53	0,87	2,02
	4	2,97	8,76	-0,16	2,16	-0,39	0,98	0,31	0,13	0,27	1,53	0,63	2,72
	5	3,03	8,10	-0,19	2,15	-1,34	1,06	1,62	0,14	0,27	1,53	0,71	3,68
	6	2,64	6,09	-0,07	2,16	-1,35	0,91	1,99	0,14	0,28	1,53	0,64	4,47
	7	2,09	3,07	-0,16	2,09	-0,97	1,28	2,28	0,19	0,73	3,21	0,64	5,18
	8	1,85	2,39	-0,14	2,10	-0,82	0,94	2,31	0,19	0,53	1,95	0,61	5,45
	9	1,41	0,73	-0,16	2,04	-0,58	0,93	2,10	0,01	0,60	1,95	0,74	5,56
	10	1,01	0,51	-0,16	0,02	-0,76	0,94	1,37	0,01	0,77	1,95	0,72	6,86
	11	0,95	-0,19	0,01	0,01	-0,94	1,26	1,98	0,01	0,34	2,00	0,78	7,35
	12	1,24	1,30	0,02	0,01	1,05	1,43	1,63	0,06	0,74	2,00	0,79	6,72
2025	1	0,78	3,59	0,00	-7,71	-0,99	1,26	2,42	-0,06	0,89	2,00	0,88	7,46
	2	0,27	1,92	0,07	-10,41	-0,77	1,25	3,16	-0,09	1,24	1,99	0,91	10,53
	3	1,32	1,45	1,13	-3,98	-0,63	1,68	2,77	-0,09	1,30	1,99	0,70	12,44
	4	2,28	1,44	0,97	0,76	-0,46	1,65	2,37	-0,42	1,36	1,99	0,92	15,88
	5	1,98	0,81	0,96	0,67	0,28	1,54	2,07	-0,45	1,40	1,40	1,99	1,45
	6	2,14	1,39	0,73	0,62	0,39	1,90	1,77	-0,45	1,39	1,99	1,29	14,48
	7	2,63	4,02	0,49	0,74	0,41	1,54	1,09	-0,50	0,88	0,79	1,36	14,19
	8	2,83	5,07	0,53	0,84	0,43	1,18	0,59	0,58	0,94	0,82	1,45	14,09
	9	3,28	6,42	0,53	0,79	0,10	1,31	0,69	-0,53	0,88	0,82	1,32	15,71
	10	3,36	6,09	0,35	0,79	-0,17	1,22	1,14	-0,53	0,59	0,82	1,32	17,14
	11	2,95	5,16	0,17	0,80	-0,06	1,09	0,45	-0,53	1,13	0,77	1,27	16,18
	12	2,92	4,25	0,06	0,85	0,10	0,82	0,98	-0,51	0,95	0,77	1,42	17,40

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Lubuklinggau (yoy%)													
2023	1	5,31	6,34	2,63	2,45	3,24	2,86	16,29	-1,89	3,75	1,62	4,38	5,35
	2	5,40	7,15	2,53	2,44	2,70	2,85	15,81	-1,93	4,14	1,62	3,85	4,66
	3	4,82	5,62	2,18	2,18	2,41	2,77	16,07	-1,19	3,78	1,62	3,20	4,58
	4	4,27	4,74	1,89	1,95	1,57	2,67	15,46	-0,81	3,23	1,62	2,95	3,40
	5	3,40	3,59	1,79	1,44	1,39	2,76	12,11	-0,74	1,83	1,62	2,73	3,21
	6	2,78	1,98	1,70	1,67	0,75	1,91	12,27	-0,48	0,99	1,62	1,70	3,36
	7	2,39	1,27	1,63	1,51	0,78	1,98	11,74	-0,32	1,44	1,54	0,99	3,01
	8	2,86	2,57	1,62	1,64	0,60	1,26	11,74	-0,23	1,44	2,51	0,79	3,07
	9	2,15	3,38	1,62	1,70	0,58	1,26	1,68	0,24	1,71	2,51	0,49	3,30
	10	2,53	5,54	0,57	1,34	0,25	0,75	1,00	0,12	1,93	1,87	0,30	2,41
	11	2,95	7,23	0,41	0,96	0,55	0,73	0,76	-0,31	1,92	1,78	0,20	2,48
	12	2,61	6,06	0,39	0,68	0,64	1,13	0,93	-0,11	1,46	1,78	0,28	3,13
2024	1	2,01	4,29	0,31	0,45	0,75	0,96	1,06	0,01	1,58	1,77	0,52	3,66
	2	2,15	5,08	0,31	0,37	0,57	1,00	0,70	0,06	0,82	1,77	0,48	3,52
	3	2,36	5,59	0,46	0,47	0,56	1,00	0,59	-0,04	1,05	1,77	1,21	3,39
	4	2,45	5,36	0,85	0,39	0,53	0,96	0,80	-0,06	1,22	1,77	1,52	4,79
	5	2,51	4,98	0,93	0,60	0,78	0,98	1,37	-0,11	1,22	1,77	1,66	5,26
	6	2,16	3,71	0,93	0,78	0,82	1,03	1,61	-0,68	0,49	1,77	1,75	5,15
	7	1,45	1,42	1,01	0,75	0,58	0,87	1,10	-0,57	0,29	2,14	1,73	6,03
	8	1,31	0,80	1,02	0,77	0,68	1,00	0,94	-0,68	0,29	1,20	1,68	7,47
	9	1,11	-0,07	1,07	0,82	0,68	1,04	0,86	-0,81	-0,04	1,78	1,79	7,95
	10	0,89	-0,56	1,07	0,84	0,60	0,78	0,25	-0,71	-0,29	1,78	1,79	8,34
	11	0,68	-1,36	1,06	0,84	0,33	0,74	0,11	-0,37	-0,30	1,78	2,05	8,96
	12	1,02	-0,08	1,06	0,82	0,22	0,45	0,22	-0,38	0,25	1,78	1,82	8,23
2025	1	0,50	2,17	1,06	-7,92	0,58	1,18	0,35	-0,46	0,40	1,78	1,82	8,25
	2	0,16	1,92	1,06	-11,69	1,45	1,07	1,08	-0,51	0,42	1,78	1,78	10,21
	3	1,28	2,43	1,17	-4,96	1,36	1,15	0,44	-0,47	0,20	1,78	1,18	11,67
	4	2,22	2,11	0,50	1,92	1,28	1,15	-0,32	-0,93	0,04	1,78	1,09	14,07
	5	1,85	0,74	0,48	1,77	1,66	1,55	-0,15	-0,99	0,12	1,78	1,45	13,92
	6	2,07	1,29	0,48	1,55	1,63	1,83	-0,01	-0,55	0,89	1,78	1,36	14,50
	7	2,61	2,95	0,89	1,62	1,89	1,94	0,24	-0,64	2,26	1,23	1,36	13,67
	8	2,92	4,55	0,87	1,55	1,77	1,86	-0,28	-0,59	2,48	1,34	1,50	12,04
	9	3,26	5,40	0,82	1,47	1,82	1,92	0,05	-0,54	2,42	1,51	1,41	12,69
	10	3,34	4,65	0,88	1,44	2,01	1,79	0,50	-0,47	2,46	1,51	1,58	14,11
	11	3,09	3,80	1,03	1,36	2,02	1,90	0,63	-0,53	2,49	1,51	1,33	15,34
	12	2,87	3,05	1,06	1,41	1,84	1,88	0,50	-0,51	2,51	1,51	1,41	15,84

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Ogan Komering Ilir (yoy%)													
2024	1	4,92	9,80	-3,48	1,44	1,16	2,48	0,39	-0,37	6,52	5,77	2,59	5,28
	2	4,60	9,73	-4,18	-0,31	0,89	3,35	0,56	-0,18	2,32	4,57	2,30	5,40
	3	4,56	9,31	-5,89	0,74	0,65	3,75	0,58	-1,22	1,86	4,57	3,89	6,51
	4	3,54	7,49	10,04	0,79	0,15	2,02	0,51	-1,46	1,45	4,57	4,90	6,54
	5	2,81	5,83	11,46	2,47	-0,46	1,99	-0,22	-1,90	-0,51	2,23	5,49	7,50
	6	2,27	3,16	-9,44	5,33	-0,24	2,02	-0,17	-1,57	2,49	2,23	5,06	9,33
	7	1,78	1,67	-9,17	5,60	-0,06	4,97	-0,23	-1,55	5,64	1,61	4,18	10,42
	8	1,95	1,55	-8,43	5,44	-0,03	4,97	0,72	-1,55	5,73	1,61	4,18	11,65
	9	1,72	1,01	-8,22	5,30	-0,03	4,97	0,50	-1,66	5,80	1,77	4,18	11,82
	10	1,44	0,07	-8,11	6,30	-0,03	4,97	0,09	-1,55	6,00	1,77	4,18	12,73
	11	0,31	-2,68	-5,82	5,91	0,08	3,68	0,27	-1,58	5,25	1,77	4,52	11,46
	12	1,48	-0,65	-1,92	5,81	0,25	3,68	0,22	-1,26	5,68	1,77	4,59	11,83
2025	1	1,57	1,40	1,41	-7,45	-0,19	3,34	0,59	-1,26	6,26	1,77	5,44	12,45
	2	1,25	1,21	1,57	12,23	0,19	3,34	0,84	1,26	7,30	1,77	5,40	14,41
	3	2,91	2,77	6,68	-2,01	0,22	2,89	0,63	-0,28	7,48	1,77	3,16	13,91
	4	3,85	2,90	3,78	8,67	0,23	2,89	0,49	-0,43	6,47	1,77	1,91	18,19
	5	3,23	2,49	0,79	6,89	0,26	2,94	0,52	0,18	6,47	1,77	1,34	16,45
	6	3,13	2,63	0,88	3,93	0,23	3,04	0,38	-0,05	8,24	1,77	1,61	17,07
	7	3,60	4,47	-0,94	4,26	-0,02	0,29	0,58	-0,05	4,56	1,23	1,56	15,56
	8	3,67	4,99	-1,67	4,32	-0,02	0,16	-0,44	-0,05	3,82	1,23	1,56	15,63
	9	3,86	5,17	-2,60	4,22	0,06	-0,09	-0,21	0,06	3,57	1,42	1,88	17,39
	10	3,85	5,21	-2,72	2,66	0,16	-0,09	0,17	-0,05	3,38	1,42	1,88	10,46
	11	2,93	3,02	-1,93	2,52	0,16	-0,09	0,07	-0,05	3,88	1,42	1,49	17,5
	12	2,90	2,63	-2,02	2,87	0,00	-0,09	0,31	-0,08	3,64	1,42	1,58	19,38

Tahun /bulan		Umum	Makanan, Minuman, & Tembakau	Pakaian & Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, & Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan & Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya
Muara Enim (yoy%)													
2024	1	6,31	11,35	7,75	0,36	-2,31	0,72	4,34	-1,85	8,98	0,00	8,14	4,18
	2	4,63	8,53	4,73	0,49	-2,29	0,57	4,15	-2,64	7,49	0,00	5,16	2,90
	3	3,76	6,12	4,73	0,99	-2,24	1,01	4,15	-2,64	7,54	0,00	3,94	4,56
	4	3,70	4,71	4,73	1,21	-2,20	1,71	4,80	-2,57	11,24	0,00	4,05	8,75
	5	3,18	3,33	4,72	1,27	-3,67	1,71	4,21	-2,54	11,24	0,00	4,66	10,19
	6	2,17	0,82	4,77	1,31	-3,87	2,85	4,01	-2,57	11,60	0,00	4,92	10,29
	7	1,04	-0,79	2,98	0,21	-2,18	3,29	3,45	-1,22	2,41	0,59	3,00	8,89
	8	1,52	0,02	3,45	0,18	-2,49	2,92	1,96	-1,13	6,15	0,59	2,82	12,12
	9	1,08	-0,87	1,25	0,76	-2,51	3,60	1,75	-1,21	11,45	0,59	2,02	11,64
	10	1,13	-0,48	1,25	0,47	-0,64	3,60	1,10	-1,13	5,42	0,59	1,09	12,67
	11	0,08	-2,64	-1,42	0,79	-0,46	3,64	1,11	-1,15	4,56	0,59	1,09	12,56
	12	0,74	-0,54	-1,42	0,32	-0,30	2,93	1,17	-1,10	-0,28	0,59	1,09	11,08
2025	1	1,00	2,68	-1,42	-10,01	-0,65	2,56	-0,10	-1,06	3,50	0,59	0,99	10,93
	2	0,91	1,02	0,05	-1,53	-0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09	0,02	0,10	1,12
	3	3,03	5,80	0,88	-9,37	-0,50	2,38	0,63	-0,26	4,88	0,59	1,15	16,82
	4	4,04	6,38	0,88	-0,27	-0,54	1,87	-0,76	-0,71	1,39	0,59	1,05	18,39
	5	3,32	4,84	0,88	0,39	0,13	1,76	-0,24	-0,31	1,39	0,59	0,47	15,47
	6	3,31	4,79	0,83	0,56	0,33	0,58	-0,23	-0,26	1,06	0,59	0,22	15,70
	7	3,45	5,26	0,41	0,52	0,25	0,75	-0,13	-0,27	0,51	0,42	0,22	15,65
	8	3,42	5,76	0,01	0,52	0,21	1,15	-0,50	-0,28	0,51	0,42	0,16	13,28
	9	3,81	6,46	0,00	0,09	0,20	0,86	-0,15	-0,28	0,51	0,42	0,16	14,77
	10	3,81	5,47	0,00	0,41	-0,11	0,86	0,03	-0,32	0,59	0,42	0,16	19,13
	11	2,62	2,55	0,00	0,24	-0,21	0,84	0,05	-0,34	0,59	0,42	0,16	18,91
	12	2,88	2,25	0,00	1,19	-0,16	0,84	0,40	-0,33	1,00	0,42	0,16	22,06

C. Daftar KUPVA Bukan Bank Berizin di Sumatera Selatan

Nama KUPVA BB	Alamat	Status Kantor	No. Telp/ Hp
PT Try Dharma Perdana	Jl. Kol. Atmo No.446 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081377918991 / 0711-351786
PT Sinar Valuta Asing Palembang	Jl. Sayangan No.164 RT 003/001 17 Ilir, Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081367727628
PT Berkat Sukses Bersama	Jl. R. Sukanto, PTC Mall GF-A2.27-28, 8 Ilir, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Pusat	0811786128
PT Makmur Alam Jaya	Jl. Beringin Janggut II No.6/351, 17 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan 30125	Kantor Pusat	081373088288/ 0711-317601
PT Ranting Emas Jaya Abadi	Jl. Jend.Sudirman No.98/456, 20 Ilir, Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan 30126	Kantor Pusat	0711-354858
PT Sentosa Valasindo Abadi	Jl. Petanang No. 1231, RT 17 RW 15, Palembang	Kantor Pusat	082280575006
PT Sumber Daya Usaha	Internasional Plaza Jl. Jenderal Sudirman No.147 Blok B-3, Palembang	Kantor Pusat	08117892478/ 0711-365691
PT H. La Tunrung A.M.C	Jl. R. Sukanto, No.79 RT 10/005 Kel.8 Ilir, Kec. Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan 30114	Kantor Cabang	082175059245/0711-5630188
PT Bhaktisakti Ganda Intiharmoni	Palembang Trade Center Mall (PTC) Lantai GF Blok A2, No.42-43 Jl. R Sukanto Palembang, Sumatera Selatan	Kantor Cabang	08558341789/ 0711-382418



Daftar Istilah

Mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya
Qtq	Quarter to quarter perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan Sebelumnya
Yoy	Year on year. Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya
Share Of Growth	Kontribusi suatu sektor ekonomi terhadap total pertumbuhan PDRB
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan
Migas	Minyak dan Gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi
Share effect	Kontribusi pangsa sektor atau sub sektor terhadap total PDRB
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang. Dengan skala 1-100
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100
Survei Konsumen	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau indikator dini (prompt indicator) mengenai tendensi/arrah konsumsi rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi stabilitas keuangan rumah tangga dan ekspektasi konsumen terhadap perkiraan inflasi kedepan untuk mendukung penyusunan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Weighted Net Balance	Istilah lain dari Survei Bersih Tertimbang yang merupakan nilai share masing-masing sektor/subsektor terhadap total sektor PDB (atas dasar harga konstan tahun 2000) dengan total bobot sama dengan 1.
Survei Kinerja Dunia Usaha	Survei yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan kegiatan ekonomi di sektor riil secara triwulanan, yaitu triwulan yang sedang berjalan dan perkiraan pada triwulan yang akan datang guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan, serta sebagai bahan informasi dalam penyusunan kajian ekonomi dan keuangan baik nasional maupun regional

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPR, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/keompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas, terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut
Ekspor	Adalah keseluruhan barang yang keluar dari suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil.
Impor	Seluruh barang yang masuk suatu wilayah/daerah baik yang bersifat komersil maupun bukan komersil
PDRB atas dasar harga berlaku	Penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang mencakup seluruh komponen faktor pendapatan yaitu gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan, penyusutan dan pajak tak langsung dari seluruh sektor perekonomian
PDRB atas dasar harga konstan	Merupakan perhitungan PDRB yang didasarkan atas produk yang dihasilkan menggunakan harga tahun tertentu sebagai dasar perhitungannya
Bank Pemerintah	Bank-bank yang sebelum program rekapitalisasi merupakan bank milik pemerintah (persero) yaitu terdiri dari bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Simpanan masyarakat yang ada di perbankan terdiri dari giro, tabungan, dan deposito
Loan to Deposits Ratio (LDR)	Rasio antara kredit yang diberikan oleh perbankan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun
Cash inflows	Jumlah aliran kas yang masuk ke kantor Bank Indonesia yang berasal dari perbankan dalam periode tertentu
Cash Outflows	Jumlah aliran kas keluar dari kantor Bank Indonesia kepada perbankan dalam periode tertentu

Net Cashflows	Selisih bersih antara jumlah <i>cash inflows</i> dan <i>cash outflows</i> pada periode yang sama terdiri dari <i>Netcash Outflows</i> bila terjadi <i>cash outflows</i> lebih tinggi dibandingkan <i>cash inflows</i> , dan <i>Netcash inflows</i> bila terjadi sebaliknya
Aktiva Produktif	Penanaman atau penempatan yang dilakukan oleh bank dengan tujuan menghasilkan penghasilan/pendapatan bagi bank, seperti penyaluran kredit, penempatan pada antar bank, penanaman pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan surat-surat berharga lainnya.
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	Pembobotan terhadap aktiva yang dimiliki oleh bank berdasarkan risiko dari masing-masing aktiva. Semakin kecil risiko suatu aktiva, semakin kecil bobot risikonya. Misalnya kredit yang diberikan kepada pemerintah mempunyai bobot yang lebih rendah dibandingkan dengan kredit yang diberikan kepada perorangan
Kualitas Kredit	Penggolongan kredit berdasarkan prospek usaha, kinerja debitur dan kelancaran pembayaran bunga dan pokok. Kredit digolongkan menjadi 5 kualitas yaitu lancar, Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar, Diragukan dan Macet
Capital Adequacy Ratio (CAR)	Rasio antara modal (modal inti dan modal pelengkap) terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
Financing to Deposit Ratio (FDR)	Rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terhadap dana yang diterima. Konsep ini sama dengan konsep LDR pada bank umum konvensional
Inflasi	Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (<i>persistent</i>)
Kliring	Pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu
Kliring Debet	Kegiatan kliring untuk transfer debet antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debet seperti cek, bilyet giro, nota debet kepada penyelenggara kliring lokal (unit kerja di Bank Indonesia atau bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring lokal) dan hasil perhitungan akhir kliring debet dikirim ke Sistem Sentral Kliring (unit kerja yang menangani SKNBI di KP Bank Indonesia) untuk diperhitungkan secara nasional
Non Performing Loans/Financing (NPLs/Ls)	Kredit atau pembiayaan yang termasuk dalam kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)	Suatu pencadangan untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya kredit yang diberikan oleh bank. Besaran PPAP ditentukan dari kualitas kredit. Semakin buruk kualitas kredit, semakin besar PPAP yang dibentuk, misalnya, PPAP untuk kredit yang tergolong Kurang Lancar adalah 15 % dari jumlah Kredit Kurang Lancar (setelah dikurangi agunan), sedangkan untuk kredit Macet, PPAP yang harus dibentuk adalah 100% dari total kredit macet (setelah dikurangi agunan)
Rasio Non Performing Loans/Financing (NPLs/Fs)	Rasio kredit/pembiayaan yang tergolong NPLs/Fs terhadap total kredit/pembiayaan. Rasio ini juga sering disebut rasio NPLs/Fs, <i>gross</i> . Semakin rendah rasio NPLs/Fs, semakin baik kondisi bank ybs.

Rasio Non Performing Loans (NPLs) – NET	Rasio kredit yang tergolong NPLs, setelah dikurangi pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), terhadap total kredit
Sistem Bank Indonesia Real time Gross Settlement (BI RTGS)	Proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan seketika (real time) dengan mendebet maupun mengkredit rekening peserta pada saat bersamaan sesuai perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI)	Sistem kliring bank Indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Industri	Suatu kegiatan yang mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya, menjadi yang lebih tinggi nilainya termasuk kegiatan jasa industri, pekerjaan perakitan (assembling) dari bagian suatu industri.
Pekerja	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha tersebut.
Pekerja Dibayar	Orang yang biasanya bekerja diperusahaan/usaha dengan mendapatkan upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya baik berupa uang maupun barang.
Pekerja Tidak Dibayar	Pekerja pemilik dan pekerja keluarga yang ikut aktif dalam pengelolaan perusahaan tetapi tidak mendapatkan upah/gaji, tidak termasuk mereka yang bekerja kurang dari 1/3 jam kerja yang biasa di perusahaan.
Input	Biaya antara yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa bahan baku, bahan bakar, barang lainnya di luar bahan baku/penolong, jasa industri, sewa gedung dan biaya jasa non industri lainnya.
Output	Nilai keluaran yang dihasilkan dari kegiatan proses produksi/proses industri yang berupa nilai barang yang dihasilkan, tenaga listrik yang dijual, jasa industri yang diterima, keuntungan jual beli, pertambahan stok barang setengah jadi dan penerimaan-penerimaan lainnya.
Nilai Tambah/Value Added	Selisih nilai <i>output</i> dengan nilai <i>input</i> atau biasa disebut dengan nilai tambah menurut harga pasar.
Produktivitas	Rasio antara nilai <i>output</i> dengan jumlah tenaga kerja baik yang dibayar maupun yang tidak dibayar.
Tingkat Efisiensi	Ratio antara nilai tambah atas dasar harga pasar terhadap <i>output</i> produksi.
Intensitas Tenaga Kerja	Suatu rasio antara biaya upah/gaji yang dikeluarkan untuk tenaga kerja terhadap nilai tambah.
Gross Margin	% <i>tase value added</i> dikurangi biaya tenaga kerja dibagi <i>output</i> .
Usaha	Kegiatan yang menghasilkan barang/jasa dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar dan atau menunjang kehidupan dan menanggung risiko.
Perusahaan	Suatu unit usaha yang diselenggarakan/ dikelola secara komersil yaitu yang menghasilkan barang dan jasa sehomogen mungkin, umumnya terletak pada satu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi, bahan baku, pekerja dan sebagainya yang digunakan dalam proses produksi.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Bambang Pramono

Koordinator Penyusun

Adhie Wicaksono

M. Ardian Dwinanto

Tim Penulis

Komang Greggy Sridana

Muhammad Muhlis Al Kautsar

Aldi Pratama Sembiring

Ihsan Bagus Atyantodito

Dwita Adilah

Karina Nisa Aprilia

Theodora Stefany

Anggitha Ariijhayutyas Pinilih

Karina Qurrota Annida

Nasrullah

Xenaneira Shodrokova

Kontributor

Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi

Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan

Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif, dan Syariah

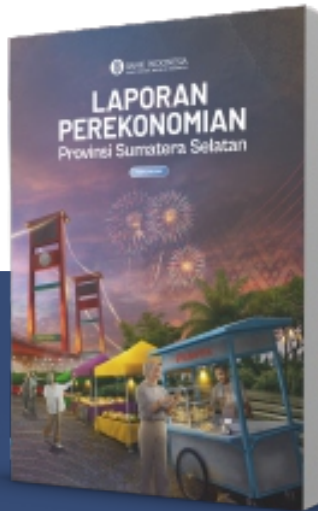
Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Unit Kehumasan

Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah

Produksi dan Distribusi

Dewi Sinta P. S.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Provinsi Sumatera Selatan

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang

Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013

<https://www.bi.go.id>

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 510, Palembang
Telp. 0711 - 354188 . Fax. 0711 - 312013
<https://www.bi.go.id>

